

Merajut Perubahan, Merawat Keberagaman

Perjalanan Inklusivitas Konsorsium
INKLUSI dalam Merawat Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan di Indonesia



Judul Buku**Merajut Perubahan, Merawat Keberagaman**

Subjudul: Perjalanan Inklusivitas Konsorsium INKLUSI dalam Merawat Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia

Editor

Maria Hartiningsih

Penulis Utama

Syafira Khairani

Nurhidayat

Sayyidatul Insiyah

Leli Qomarulaeli

Moh. Shofan

Sopi Sadili

Adrianus Bintang Hanto Nugroho

Ida Rochmawati

Penulis Prolog

Abdul Waidl

Penulis Epilog

Maria Hartiningsih

Penyunting Bahasa

Kalis Mardi Asih

Penata Letak dan Ilustrasi

Anisa Azalia

Penanggungjawab

Siti Khoirun Ni'mah

Abdul Waidl

Syafira Khairani

Rahmatul Amalia N.A.

Diterbitkan oleh

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Jl. Jati Padang Raya Kav. 3 No. 105, Pasar Minggu - Jakarta Selatan, 12540,

Indonesia

E-mail : office@infid.org

Website : www.infid.org

2025

“Merajut Perubahan, Merawat Keberagaman”

Perjalanan Inklusivitas Konsorsium
INKLUSI dalam Merawat Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan di Indonesia

Penulis

Syafira Khairani
Nurhidayat
Sayyidatul Insiyah
Leli Qomarulaeli
Moh. Shofan
Sopi Sadili
Adrianus Bintang Hanto Nugroho
Ida Rochmawati

Editor

Maria Hartiningsih

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
Jakarta
2025

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan selamat atas terbitnya "Perjalanan Inklusivitas Konsorsium INKLUSI dalam Merawat Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia". Cerita Perubahan ini bukan hanya sekedar kumpulan tulisan, melainkan pantulan semangat dan kerja keras yang telah dirajut selama tiga tahun terakhir oleh beragam semangat dalam menghargai kemanusiaan dan keberagaman.

Penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada para penulis dari Konsorsium Program INKLUSI yang terdiri atas *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID), Fatayat NU Jawa Barat, Fatayat NU Jawa Timur, UNIKA Soegijapranata, Medialink, Yayasan Inklusif, SETARA Institute, dan Maarif Institute. Terima kasih kepada para penulis yang telah menuangkan beragam cerita dan pengalaman menjadi suatu tulisan yang demikian indah untuk dibaca.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Mba Maria Hartingsih, yang telah menyunting dan merawat setiap cerita dalam buku ini dengan sepenuh hati, hingga terbit menjadi karya yang tak hanya layak dibaca, tetapi juga menjadi renungan bersama untuk negeri yang tercinta ini.

Melalui buku ini, kita diajak untuk melihat bagaimana gagasan besar tentang hak asasi manusia dan inklusi sosial dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret di masyarakat. Dari sekolah yang mulai membuka ruang diskusi tentang sekolah yang aman, hingga kebijakan negara yang menempatkan kelompok minoritas sebagai bagian penting dari pembangunan. Setiap kisah di dalamnya, para perempuan inspiratif, orang muda, guru sekolah, hingga pemimpin di masing-masing perannya, menunjukkan bahwa ketika ruang dialog dibuka, dan ketika perbedaan dihargai, maka perubahan menjadi mungkin.

Semoga Cerita Perubahan ini tidak berhenti sebagai dokumentasi program, tetapi menjadi cermin dan cahaya. Cermin untuk kita bercermin tentang sejauh mana kita telah bergerak menuju keadilan, dan cahaya yang menerangi jalan bagi siapa pun yang ingin melangkah menuju Indonesia yang lebih adil, setara, dan demokratis.

Kepada semua pembaca, terlebih para pemimpin, pembuat kebijakan, pendidik, dan pegiat sosial, saya berharap buku ini menjadi inspirasi dan pengingat: bahwa merawat keberagaman adalah bagian dari merawat masa depan bangsa. Karena dari keberagaman itulah lahir kekuatan, ketahanan, dan harapan bagi Indonesia yang lebih inklusif.

Dengan rendah hati, saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati setiap gagasan dan cerita dalam buku ini.

Jakarta, 10 Mei 2025

Siti Khoirun Ni'mah
Direktur Eksekutif INFID

DAFTAR ISI

Kata Pengantar oleh Siti Khoirun Ni'mah	iv
Prolog oleh Abdul Waidl	viii
Menyongsong Depok yang Ramah bagi Keberagaman oleh Nurhidayat – Yayasan Inklusif	1
Merajut Rasa Aman di Sekolah oleh Syafira Khairani – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)	17
Titik Terang Pengakuan Penuh Penghayat Kepercayaan: Pengalaman di Kota Bandung oleh Sayyidatul Insiyah – SETARA Institute	35
Semua Pihak Harus Kami Rangkul oleh Lely Qomarulaeli – Medialink	45
Komunikasi Tanpa Kekerasan: Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik oleh Moh. Shofan – Maarif Institute	59
Membangun Jalinan Inklusi Sosial oleh Sopi Sadili – Fatayat NU Jawa Barat	75
Inklusi di Jalan Waqf: Pengalaman Amatul Shafi oleh Sopi Sadili – Fatayat NU Jawa Barat	85
Perjumpaan di Manado: Sebuah Refleksi oleh Adrianus Bintang Hanto Nugroho – Universitas Katolik Soegiyapranata	95
Saudara Dekat Terasa Jauh, Hanya Memandang Tanpa Menyapa: Pengalaman Perjumpaan dari Jawa Timur oleh Ida Rochmawati – Fatayat NU Jawa Timur	113
Epilog oleh Maria Hartiningsih	131

PROLOG

Abdul Waidl¹

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai Fondasi Bersama Merangkai Indonesia

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, berjuta manusia hidup berdampingan dengan latar belakang agama, kepercayaan, budaya, dan tradisi yang beraneka ragam. Keberagaman ini adalah kekayaan sekaligus tantangan terbesar bangsa ini. Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) menjadi fondasi utama yang memungkinkan keberagaman itu hidup berdampingan secara damai dan harmonis.

Namun, menjaga kebebasan itu bukan perkara mudah. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi: intoleransi, diskriminasi, kekerasan berbasis agama, dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok minoritas dan rentan. Data dari SETARA Institute memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang kondisi KBB di Indonesia. Dalam laporan 2023, SETARA Institute mencatat adanya 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran KBB, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 114 tindakan dilakukan oleh aktor negara, sementara 215 oleh aktor non-negara.

Gangguan ini meliputi penyegelan, penolakan pendirian, dan vandalisme yang menimbulkan ketakutan bagi komunitas minoritas. Sedangkan, pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara terutama berasal dari pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP, institusi pendidikan negeri, dan forum koordinasi pimpinan daerah.

66 Pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara terutama berasal dari pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP, institusi pendidikan negeri, dan forum koordinasi pimpinan daerah.

Dalam konteks ini, delapan lembaga yang berkontribusi dalam buku ini telah menapaki jalan panjang advokasi KBB di sebelas provinsi dan dua puluh tiga kabupaten/kota.

¹ Abdul Waidl adalah Program Manager di International NGO forum on Indonesian Development (INFID)

Mereka adalah INFID, SETARA Institute, Maarif Institute, MediaLink, Yayasan Inklusif, UNIKA Soegijapranata, Fatayat NU Jawa Barat, dan Fatayat NU Jawa Timur.

Jejak Kolaborasi KBB di Lapangan

Perjalanan advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak hanya soal kebijakan dan hukum, tetapi juga soal pengalaman hidup manusia yang berjuang di tengah tantangan nyata. Kisah Amatul Shafi dari Fatayat NU Jawa Barat adalah salah satu contoh yang menggambarkan bagaimana kebebasan berkeyakinan diuji dan diperjuangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Shafi, perempuan muda dari komunitas Ahmadiyah, lahir dalam keluarga yang mewakafkan dirinya untuk pengabdian kepada Jemaat Ahmadiyah. Ia menjalani kehidupan penuh dinamika: dari pendidikan di sekolah Islam, menghadapi prasangka dan diskriminasi, hingga menjadi aktivis yang memperjuangkan inklusi dan kesetaraan gender di komunitasnya. Dalam tulisannya, Shafi mengibaratkan dirinya sebagai “baju yang bisa melindungi, menghangatkan dan merepresentasikan identitas kita.”

Pengalaman pahit seperti penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Parung dan stigma sosial yang melekat pada komunitasnya tidak membuat Shafi menyerah. Sebaliknya, ia memilih untuk melawan dengan cinta kasih dan literasi. Melalui Sekolah Inklusi Perempuan yang diselenggarakan Fatayat NU Jawa Barat, Shafi belajar dan mengajarkan prinsip GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial), membuka ruang dialog dan pemahaman yang selama ini sulit tercapai.

Kisah Shafi mengingatkan kita bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan hanya soal hak individu, tetapi juga soal keberanian komunitas untuk berdiri tegak dan membangun ruang inklusif di tengah tekanan dan diskriminasi.

Di Kota Bandung, SETARA Institute membawa titik terang bagi penghayat kepercayaan yang lama terpinggirkan. Dulunya, Bandung terpuruk di peringkat 89 dari 94 kota dalam Indeks Kota Toleran (2015, 2017), dengan penghayat kepercayaan menghadapi pengucilan, kesulitan mendapatkan KTP, serta risiko perundungan. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Inklusif pada 2021 membuka dialog antara penghayat dan aparat, memungkinkan mereka menyuarakan diskriminasi.

Kesbangpol, dipimpin Apep Insan Parid, memfasilitasi pembuatan KTP dan inovasi seperti Peraturan Daerah No. 5 tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum. Kolaborasi lintas isu melalui Koalisi ASPIRASI Jawa Barat dan pelatihan jurnalisisme inklusif mendorong media mewakili suara marginal. Hasilnya, Bandung melonjak ke peringkat 15 pada 2023, meski perundungan di Kabupaten Bandung masih menjadi pekerjaan rumah.

Di sisi lain, MediaLink menyoroti peran vital aparat kepolisian, khususnya Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dalam menjaga keamanan dan kebebasan beragama di tingkat desa dan kelurahan. Aipda Setyo Wardoyo, petugas Bhabinkamtibmas di Kelurahan Jatikramat, Kota Bekasi, mengungkapkan, "Tugas kami sebagai bhabinkamtibmas itu tidak gampang." Ia harus mengenal masyarakat, memetakan potensi konflik, dan menjadi jembatan dialog untuk mencegah konflik sosial keagamaan.

Bekasi yang dulu dikenal sebagai kota dengan tingkat intoleransi tinggi, berhasil meningkatkan indeks toleransi secara signifikan berkat kerja keras aparat, masyarakat, dan lembaga masyarakat sipil seperti MediaLink. Namun, penyelesaian konflik seringkali hanya sampai di permukaan. Konflik yang muncul biasanya berakar pada prasangka dan diskriminasi yang belum terselesaikan secara mendalam. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak: aparat, tokoh agama, komunitas minoritas, dan media, sangat diperlukan untuk membangun harmoni yang berkelanjutan.

Di Jawa Timur, Fatayat NU menginisiasi Diskusi Islam Damai (DID) dan Sekolah Inklusi Perempuan (SIP) untuk membangun ruang dialog antar perempuan dari berbagai aliran Islam, termasuk NU, Muhammadiyah, Syiah, Ahmadiyah, dan LDII. Forum ini menjadi ruang langka untuk berbagi pengalaman dan membangun solidaritas. Aminah Yahya, Ketua Muslimah Ahlul Bait Indonesia, mengungkapkan, “Ini pertama kali saya bertemu dengan antum, saya merasa sangat kecil karena ternyata saya tidak tahu apa-apa tentang perbedaan dan persaudaraan.” Perempuan-perempuan ini menyadari bahwa intoleransi adalah pintu masuk radikalisme dan bahwa peran perempuan sangat strategis dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian.

Di Depok, Yayasan Inklusif berjuang keras mengubah stigma kota paling intoleran menjadi ruang inklusif yang ramah bagi keberagaman. Data penerimaan P3K tahun 2022 menunjukkan diskriminasi sistemik terhadap guru agama minoritas, dan penyegelan masjid Jemaat Ahmadiyah berulang kali terjadi.

Yayasan Inklusif mendorong pemerintah daerah mengadopsi Pedoman Pengelolaan Kehidupan Keberagaman Inklusif, membuka ruang dialog dan perubahan kebijakan. Laeliyatul Masruroh, Wakil Ketua Yayasan Inklusif, berbagi pengalaman diskriminasi di kantor Kesbangpol, “Saya ditanya-tanya, kenapa gak pakai jilbab padahal muslim?”. Namun, ia tidak menyerah dan terus memperjuangkan inklusi.

MAARIF Institute menguatkan pendidikan karakter melalui pelatihan LOVE dan *Non Violence Communication* (NVC). MAARIF Institute mendorong transformasi inklusif di sekolah dan masyarakat. Sembilan guru dan aktivis lintas agama dari Malang, Ambon, hingga Bali berbagi cerita perubahan. Mereka menerapkan pendekatan empati dan kasih, seperti Imel Wee di Ambon yang membangun kebersamaan antaragama di sekolah, atau Adlan di Manado yang menggunakan LUVERS untuk harmoni multikultural. Pendekatan ini mengurangi sekat, prasangka, dan kekerasan, menciptakan lingkungan saling menghormati.

Meski menghadapi tantangan seperti fanatisme, pelatihan ini mengubah cara mengajar dan berinteraksi, menanamkan nilai toleransi dan keadilan. Evaluasi *The Most Significant Change* menunjukkan kesadaran nilai, keterhubungan, dan peran sebagai agen perubahan. Cerita-cerita ini membuktikan langkah kecil dapat menciptakan harmoni besar, mendorong pendidikan yang memerdekakan dan masyarakat yang inklusif, dengan harapan pelatihan ini terus diperluas.

Universitas Katolik Soegiyapranata Semarang di Manado terus mendorong toleransi di Manado Sulawesi Utara. Manado, dikenal sebagai kota toleran, menyimpan cerita kompleks tentang keberagaman agama. Dalam diskusi Mei 2023 di Gedung DPD RI Sulawesi Utara, peserta dari berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Konghucu, dan penghayat kepercayaan seperti Malesung, berbagi pengalaman.

Meski kerukunan antarumat sering digaungkan, cerita tentang diskriminasi muncul, seperti penolakan pendirian masjid di Bitung (2015) dan perusakan tempat ibadah Malesung di Minahasa Selatan (2022). Iswan Sual, dari Laroma, mengisahkan kesalahpahaman terhadap agama leluhur, meski pengakuan negara sejak 2017 meningkatkan keberanian komunitasnya. Dialog lintas iman di Tondano dan pertemuan di Semarang (November 2024) menunjukkan kemajuan penerimaan, meski tantangan seperti prasangka masih ada. Perjumpaan ini mengajarkan bahwa toleransi sejati lahir dari mendengar dan memahami, menciptakan harapan untuk masyarakat yang harmonis dan inklusif di tengah keberagaman Sulawesi Utara.

Sementara itu, INFID merajut rasa aman di sekolah, menjawab maraknya kekerasan—184 pengaduan ke Komnas HAM (2020–2023) dan 573 kasus pada 2024, 42% di antaranya kekerasan seksual. Melalui pelatihan Pendidikan Ramah HAM sejak 2021, INFID mengubah paradigma guru PAI dari pendekatan otoritatif ke inklusif. Guru seperti Anharurrohan di Surakarta beralih dari hukuman fisik ke dialog, mengajak salat duha dengan lembut dan membebaskan siswi dari paksaan berjilbab.

Zeni Syafrina di Padang membentuk Satgas Sekolah Ramah HAM, sementara Syamsul Bahri merevisi tata tertib sekolah. Pelatihan ini menyadarkan bahwa kekerasan juga hadir dalam kebijakan diskriminatif, mendorong sekolah menjadi ruang aman yang memerdekakan, sesuai cita-cita Ki Hajar Dewantara.

Setiap lembaga yang terlibat dalam advokasi ini memiliki pendekatan dan kekuatan masing-masing. INFID fokus pada pencegahan ekstremisme dan advokasi kebijakan nasional yang berpihak pada korban dan kelompok rentan.

SETARA Institute menyoroti isu diskriminasi dan kekerasan atas nama agama serta mendorong perubahan kebijakan. Maarif Institute memperjuangkan Islam yang inklusif dan *rahmatan lil ‘alamin* serta demokrasi yang adil. MediaLink mengadvokasi peran media dan aparat dalam membangun narasi positif dan menjaga keamanan. Yayasan Inklusif membekali para penyuluh agama agar memiliki kebebasan beragama dan berkeyakinan.

UNIKA Soegijapranata menanamkan nilai toleransi dan dialog antar tokoh informal agama-agama di lingkungan. Fatayat NU Jawa Barat dan Jawa Timur memperluas advokasi ke komunitas perempuan dan kelompok minoritas internal dalam Islam.

Kolaborasi dan sinergi antar lembaga ini memperkuat gerakan advokasi KBB di Indonesia, menjangkau berbagai wilayah dan lapisan masyarakat. Mereka membuktikan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil: dialog yang tulus, keberanian untuk mendengar dan menerima, serta keteguhan untuk melawan intoleransi dan diskriminasi.

“Perubahan besar dimulai dari langkah kecil: dialog yang tulus, keberanian untuk mendengar dan menerima, serta keteguhan untuk melawan intoleransi dan diskriminasi.”

Penutup

Kebebasan beragama dan berkeyakinan bukanlah milik satu kelompok, agama, atau generasi. Ia adalah hak bersama yang harus dijaga dan diwariskan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, menjaga KBB adalah tugas bersama yang tidak bisa ditawar.

Indonesia yang kita impikan adalah Indonesia yang merayakan keberagaman sebagai kekuatan, bukan ancaman. Sebuah negeri di mana setiap anak bangsa dapat hidup dengan damai, berdoa dengan tenang, dan bermimpi tanpa rasa takut.

Buku ini bukan sekadar kumpulan tulisan. Ia adalah undangan untuk merenung, belajar, dan bertindak. Ia mengajak kita semua -apapun agama, kepercayaan, atau latar belakang- untuk menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang inklusif, adil, dan damai.

Mari kita rawat keberagaman ini dengan cinta, kita jaga kebebasan ini dengan keberanian, dan kita bangun Indonesia ini dengan harapan.

Selamat membaca, selamat merangkai harapan,
dan selamat membangun Indonesia bersama.

Pasar Minggu, 7 Mei 2025





Menyongsong Depok yang Ramah bagi Keberagaman

Menyongsong Depok yang Ramah bagi Keberagaman

Nurhidayat

Yayasan Inklusif

Kota Depok beberapa tahun terakhir kerap disematkan sebagai kota intoleran dan diskriminatif. Namun, anggapan itu perlahan menunjukkan perubahan. Bersama sejumlah lembaga non pemerintah, Kesbangpol Kota Depok memotori perubahan itu.

Jika dulu Bekasi kerap dijuluki sebagai daerah “dari luar planet” atau kota paling absurd se-Indonesia, dalam lima tahun terakhir, Kota Depok seolah mengambil alih “mahkota” itu. Berbagai kejadian unik di kota ini kerap menjadi bahan jokes dan ejekan di media sosial. Mulai dari kasus babi ngepet, keranda terbang, orang pertama terjangkit COVID-19, hingga pasar dengan alat tukar dinar dan dirham. Namun, di antara julukan-julukan itu, ada satu julukan yang selalu membetot perhatian publik, yakni Depok sebagai kota paling intoleran se-Indonesia.

Kota Depok terletak di provinsi Jawa Barat, merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur dan berada di bagian selatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kota yang saat ini berpenduduk sekitar dua juta jiwa itu merupakan wilayah penyangga DKI Jakarta. Dikutip dari situs pemerintahan Kota Depok, kota ini bermula dari sebuah Kecamatan yang berada di lingkungan Kawedanan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten Bogor. Depok ditetapkan sebagai kota dan memisahkan diri dari Kabupaten Bogor pada 20 April 1999. Kota Administratif Depok terbentuk dengan penambahan wilayah dari lima kecamatan.

Julukan itu bukan tanpa alasan. Berbagai insiden intoleransi memang kerap terjadi di wilayah ini. Misalnya, peristiwa penggerudukan tempat ibadah Kapel di Bukit Cinere pada Sabtu, 16 September 2023, yang menimbulkan keresahan di kalangan umat Kristiani. Tak hanya itu, pada 9 Februari 2023, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok mengeluarkan Surat Edaran bernomor 421/960/sekret-2023 yang melarang siswa ikut serta dalam perayaan Valentine's Day.

Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Disdik itu ditujukan kepada pengawas SD dan SMP, kepala sekolah SD dan SMP negeri/swasta, serta pimpinan lembaga nonformal, dengan alasan menjaga siswa dari kegiatan yang dianggap bertentangan dengan norma agama, sosial, dan budaya.

Lebih jauh lagi, pada pertengahan 2022, muncul Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Religius yang menuai kritik dari berbagai pihak. Rancangan ini dinilai berpotensi mengancam kelompok minoritas dan meminggirkan hak-hak mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Alotnya mendorong inklusivitas di internal pemerintah kota juga menjadi keluhan banyak aktivis HAM. Laeliyatul Masruroh (35 tahun), bahkan pernah mengalami hal tidak menyenangkan ketika berhadapan dengan staf Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok. “Saya ditanya-tanya, kenapa gak pakai jilbab padahal muslim?” kata Wakil Ketua Yayasan Inklusif ini tak dapat menyembunyikan kekesalannya.

Peristiwa itu terjadi pada 27 Juli 2023 silam. Kala itu, Yayasan Inklusif berencana mengadakan Workshop Pedoman Pengelolaan Kehidupan Keberagaman Inklusif bagi Pemerintah Daerah di Kota Depok. Kegiatan yang melibatkan akademisi dan pejabat pemerintah ini juga mengundang Kesbangpol Depok untuk berpartisipasi. Namun, sehari sebelum acara berlangsung, undangan yang telah disampaikan justru dijawab dengan pemanggilan panitia workshop ke kantor Kesbangpol. “Kami diminta menunjukkan legalitas kelembagaan,” kata Laeliya menerangkan.

Bersama Darningsih, salah satu staf di Yayasan Inklusif, Laeliya pun datang untuk menunjukkan dokumen yang dimaksud. Ia diterima Ernawati, sekretaris Kesbangpol, beserta dua staf lainnya.

Sejak awal, Laeliya menyadari bahwa pembicaraan dalam pertemuan ini tidak akan mudah. Namun, ia tak menyangka jika pembicaraan malah menjauh dari topik yang seharusnya dibahas. Alih-alih membicarakan soal workshop, diskusi justru berfokus pada hal-hal yang sangat pribadi—termasuk pilihan Laeliya untuk tidak mengenakan jilbab.



Alih-alih membicarakan soal workshop, diskusi justru berfokus pada hal-hal yang sangat pribadi—termasuk pilihan Laeliya untuk tidak mengenakan jilbab.



Persoalan jilbab bukan satu-satunya perkara yang membuat Laeliya geram. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang dari satu jam itu, perempuan yang sedang menyelesaikan studi magisternya di Universitas Indonesia ini juga dibuat kesal dengan pertanyaan menyangkut agama yang dianutnya.

Mulanya, Laeliya ditanya soal hubungan antara Yayasan Inklusif dengan SETARA Institute. Lalu, soal pedoman yang digagas lembaganya itu. Mereka khawatir pedoman yang dibuat berujung pada penilaian seperti yang dilakukan oleh SETARA Institute. Penilaian yang dimaksud adalah Indeks Kota Toleran (IKT) yang saban tahun dikeluarkan SETARA Institute.

Mereka menilai hasil riset SETARA Institute yang menempatkan Depok sebagai kota intoleran tak berdasar dan tak mencerminkan kenyataan di lapangan. “Depok ini baik-baik saja, tidak ada masalah di kota ini,” ujar Laeliya, menirukan tanggapan salah satu staf Kesbangpol.

Laeliya mencoba merespons dengan membawa contoh kasus penyegelan Masjid Al-Hidayah milik Jemaat Ahmadiyah di Depok, berharap hal itu bisa membuka mata mereka terhadap realitas keberagaman di kota berpenduduk 2.145 juta jiwa (2023) itu. Namun, usahanya itu sia-sia.

Staf Kesbangpol justru menganggap penyegelan tersebut sebagai perkara kecil yang dibesar-besarkan, dan digunakan oleh SETARA Institute untuk menilai Depok sebagai kota intoleran. Mereka bahkan menyatakan penyegelan itu tidak melanggar hak asasi manusia karena dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. “Seharusnya mereka jangan mengaku Islam, karena percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad,” ujar Laeliya mengutip kalimat dari staf tersebut.

Sebagai seorang yang telah lama terjun dalam advokasi keberagaman dan inklusivitas, Laeliya terbiasa menghadapi argumen-argumen sempit semacam itu. Ia lalu merespons argumen tersebut dengan melempar pertanyaan “Jika mereka benar-benar meyakini nabi baru, apa ruginya bagi kita?”

Namun, pertanyaan itu justru dibalas dengan pertanyaan balik, “Anda sendiri agamanya apa?”

Laeliya kemudian memilih untuk tidak menggubris pertanyaan tersebut. Ia kembali menarik pembicaraan pada inti yang sebenarnya—menunjukkan legalitas lembaga dan kehadiran Kesbangpol dalam FGD. Walhasil, mereka menyatakan tidak bisa hadir dalam forum yang digagas Yayasan Inklusif, dengan alasan mereka tak ingin kehadiran mereka dianggap sebagai legitimasi bagi pedoman yang dibahas. Mereka juga menambahkan bahwa pimpinan mereka tengah sibuk dan merasa tidak mungkin hadir dalam acara tersebut.

Yayasan Inklusif adalah lembaga yang memiliki konsen terhadap isu keberagaman dan pembangunan toleransi. Sejak didirikan pada 2018, lembaga ini aktif melakukan berbagai kegiatan, mulai dari advokasi, pendampingan korban konflik agama, hingga mendorong pemerintah daerah untuk pengelolaan kehidupan keberagaman yang lebih inklusif.

Salah satu kekuatan lembaga ini terletak pada kemampuannya merangkul berbagai elemen masyarakat, seperti anak muda, majelis taklim, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok akar rumput.

Pada 2019, lembaga ini membentuk komunitas anak muda bernama Sahabat Inklusif. Komunitas yang telah diikuti lebih dari 70 anak muda ini menjadi mitra strategis lembaga ini dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan penanganan konflik berbasis agama.

Selain bergerak di level praktis, Yayasan Inklusif juga rutin memproduksi wacana kritis. Salah satunya melalui publikasi bulanan seperti *Monthly Review* yang memotret isu-isu penting yang berkembang dalam konteks *Religious Freedom* dan *Violent Extremism Review*, yang menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika pada isu kekerasan berbasis keagamaan. Pada 2022, lembaga ini merilis laporan tahunan tentang tren pelanggaran Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) di Jabodetabek dan tren politisasi agama di Indonesia.

Eksklusif dan Diskriminatif

Sikap eksklusif yang dipertontonkan staf Kesbangpol itu ternyata tidak hanya menjadi keluhan Laeliya. Supian Suri, Wali Kota Depok terpilih dalam pilkada 2024, juga menyoroti fenomena yang sama. Dalam wawancara yang disiarkan kanal YouTube *Kompas.com* pada Juli 2024, Supian mengungkapkan betapa jelasnya pola eksklusivisme yang mengakar dalam struktur pemerintahan Kota Depok, dan bagaimana hal itu berkontribusi terhadap citra kota intoleran yang melekat selama ini.

Menurut Supian, predikat “kota intoleran” yang disandang Depok bukanlah hal yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari sikap pemimpinnya yang cenderung menutup diri terhadap berbagai kelompok yang tidak sepaham atau tidak sejalan dengan mereka.

"Kan berawal dari eksklusivisme. Artinya, dengan eksklusif, sudah tersekat tuh, situasi di mana tidak lagi ada keterbukaan untuk banyak orang, merangkul banyak pihak, sebetulnya berawal dari situ," terangnya.

Hal serupa juga dikeluhkan Ikhrany Hilman, Anggota DPRD Kota Depok periode 2019-2024. Pada 2022, ia membongkar data penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Pada tahun itu, pemerintah merekrut 341 P3K untuk tenaga kesehatan dan guru, 63 di antaranya dialokasikan untuk guru agama. Namun, dari seluruh formasi tersebut, Ikhrany menemukan tak ada satupun slot untuk guru agama Kristen.

Ikhrany menyoroti hal ini karena sudah tiga tahun berturut-turut—yaitu pada 2020, 2021, dan 2022—Pemerintah menerima P3K guru, namun tidak pernah membuka slot untuk guru agama Kristen. Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu juga mencatat masih ada 16 SMPN di Kota Depok yang belum memiliki guru agama Kristen. Sementara itu, terdapat 2.007 siswa SDN di Depok yang beragama Kristen, namun hanya ada 46 guru agama Kristen yang tersedia, terdiri dari 7 PNS di Dinas Pendidikan, 1 PNS di Kemenag, 1 PNS APBD, dan 37 guru honorer.

“Bagaimana dengan guru agama dari agama minoritas yang lain? Ini kan membuktikan watak dari pemerintahan ini. Sementara ini kemarin sibuk membantah hasil survei dari SETARA Institute, tapi kebijakannya menunjukkan bahwa SETARA Institute benar,” tegas dia seperti dimuat RRI.co.id, November 2022 lalu.

Lembaga yang disebut Ikhrany itu menempatkan Kota Depok sebagai kota dengan tingkat toleransi paling rendah, setidaknya sejak tahun 2021. Dalam IKT 2023, Depok masih menduduki peringkat 94 dari 94 kota yang dinilai.

Indeks tersebut didasarkan pada pengukuran tiga indikator utama, favoritisme atau pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok agama tertentu; peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama; dan regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama. Ketiga indikator itu kemudian diterjemahkan menjadi 8 indikator turunan. Satu di antaranya adalah pengisian kuesioner *self-assessment* yang diberikan kepada seluruh pemerintah kota yang dinilai. Hasilnya, Depok duduk di peringkat paling buncit, lebih rendah dari Cilegon dan Banda Aceh.

Terlepas dari pengukuran itu, kebijakan yang mengarah pada favoritisme, seperti yang dikeluhkan Ikra vany, sebenarnya terpampang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026. Dokumen setebal 429 halaman itu, memuat istilah "mayoritas" sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Ini misalnya ditemukan pada halaman 26 terkait strategi penyediaan fasilitas keagamaan. Pada poin b dalam dokumen tersebut, disebutkan salah satu strategi penyediaan fasilitas keagamaan adalah mengembangkan pusat kegiatan keagamaan berskala kota yang ditujukan untuk pemeluk agama yang jumlahnya mayoritas.

Kebijakan ini kemudian berimplikasi langsung pada SDN Pondok Cina 1 di Kecamatan Beji, Kota Depok. Sekolah dengan 360 murid ini digusur demi pembangunan Masjid Raya Al Quddus yang direncanakan Pemerintah Kota Depok.

Tak hanya itu, pemerintahan ini juga dikenal melalui kebijakan diskriminatif yang diterapkan secara masif. Penyegehan Masjid Al-Hidayah milik jemaat Ahmadiyah di Sawangan, contohnya. Penyegehan masjid ini berangkat dari Peraturan Walikota Nomor 9 tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok.

"Kalau dihitung-hitung, dari 2013 ya sudah 7 kali masjid kami disegel," ujar Ade Firmansyah, pemuda Jemaat Ahmadiyah Depok.

Ade menceritakan, sebelum masjid disegel, hubungan antara Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat sekitar terjalin dengan baik. Berbagai kegiatan sosial yang melibatkan warga setempat, seperti penyelenggaraan bazar, sembako murah, dan pembagian daging kurban saat hari raya Idul Adha disambut baik oleh masyarakat.

Area masjid juga kerap dijadikan tempat warga sekitar berkumpul dan berolahraga. "Tempat itu mas, dulu sering buat main bulu tangkis sama warga," ungkap Ade sambil menunjuk area belakang masjid.

Masyarakat sekitar juga kerap mengundang Jemaat Ahmadiyah untuk menghadiri acara keagamaan, seperti peringatan Maulid Nabi yang diadakan di masjid yang terletak di RT 3 RW 7, tak jauh dari Masjid Al-Hidayah. Jemaat Ahmadiyah pun selalu memenuhi undangan tersebut.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok, Abdul Ghani Djamal, mengonfirmasi hal ini. Dia mengatakan hubungan antara Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat sekitar, khususnya di RT 3 berlangsung harmonis. “Penolakan justru berasal dari pihak luar yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jemaat,” ujar Abdul Ghani.

“**Penolakan justru berasal dari pihak luar yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jemaat**”



Keterlibatan pihak luar dalam penyegelan Masjid Al-Hidayah juga diakui Ahmad Fahrudin Murodi, Ketua Penyuluh Agama Kementerian Agama Kota Depok. Dalam catatannya, ada beberapa kelompok yang menyokong tindakan represif terhadap Ahmadiyah di Depok. Di antaranya, Front Pembela Islam (FPI), Aliansi Masyarakat Kota Depok, dan Forum Umat Bersatu (FUB) Kota Depok.

Namun, bagi Fahrudin, masalah yang kini berkembang justru soal lunturnya keharmonisan antara warga sekitar dan jemaat sejak penyegelan dilakukan. Dia berpendapat, meskipun aktivitas sehari-hari berlangsung dalam bingkai saling menghormati, dinamika yang lebih dalam menunjukkan adanya batasan tak kasatmata.

“Aktivitas sosial yang semula dilakukan bersama kini menjadi lebih terbatas. Masyarakat sekitar sekarang terlihat seperti menjaga jarak,” ungkapnya.

Dalam konteks ini, Fahrudin menilai bahwa tindakan pemerintah Depok tidak hanya gagal menyelesaikan akar masalah, tetapi juga menciptakan masalah baru yang berdampak pada memburuknya hubungan sosial yang sebelumnya telah terjalin dengan baik.

Dia sepakat, upaya yang harus dilakukan adalah mendorong pemerintah untuk proaktif dalam menjamin hak beragama bagi semua pihak.

Intoleransi No, Ekstremisme Yes

Upaya membenahi Kota Depok menjadi kota toleran dan inklusif telah menjadi pekerjaan panjang yang melibatkan sejumlah lembaga non-pemerintah. Sejak tahun 2022, Yayasan Inklusif bersama tujuh lembaga yang tergabung dalam Konsorsium Inklusi –INFID, SETARA Institute, Maarif Institute, MediaLink, Unika Soegijapranata Semarang, Fatayat Jawa Barat, dan Fatayat Jawa Timur– mengembangkan berbagai program terkait peningkatan kesadaran keberagaman, hak asasi manusia, dan toleransi antaragama di wilayah ini.

Di antara upaya-upaya itu, adalah, dikembangkannya Pedoman Pengelolaan Kehidupan Keberagamaan Inklusif bagi Pemerintah Daerah oleh Yayasan Inklusif. Pedoman ini bertujuan memberi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola kehidupan keberagamaan yang inklusif dengan memperhatikan dan menghormati hak-hak warga tanpa memandang latar belakang agama.

Direktur Yayasan Inklusif, Muhammad Subhi, menjelaskan, pedoman ini mencakup tiga aspek penting, yakni, pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus-kasus konflik berdimensi agama.

"Pedoman ini kami dorong untuk diterapkan di tiga wilayah: Bekasi, Bogor, dan Depok," terangnya.

Namun, mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan pedoman ini, bukan hal mudah. Subhi menceritakan pengalaman lembaganya di Depok. Pedoman itu, katanya, sempat dianggap tidak relevan.

"Pemerintah kota Depok beranggapan bahwa kota ini baik-baik saja. Mereka tidak melihat adanya masalah signifikan terkait intoleransi," ujarnya.

Hal ini tercermin ketika pemerintah menangani kasus penggerudukan Kapel Bukit Cinere pada Sabtu, 16 September 2023. Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dengan tegas menepis tuduhan bahwa kejadian tersebut merupakan bentuk intoleransi.

"Penggerudukan kapel itu terjadi karena salah persepsi. Kapel tersebut tidak memiliki izin," ujar Idris.

Dalam konferensi pers yang digelar tiga hari setelah insiden tersebut, Idris juga mengimbau agar kedamaian di Kota Depok tidak diganggu. "Jangan karena satu kasus langsung dikatakan intoleran," tegasnya.

Menurut Subhi, istilah "intoleran" memang sulit diterima oleh pejabat pemerintah Kota Depok. Para pejabat itu menilai kalau istilah intoleransi tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Depok. Namun, Subhi menambahkan, kalau kata "intoleransi" dianggap terlalu keras, maka jika disandingkan dengan istilah lain seperti "tingkat ekstremisme" atau "radikalisme tinggi," pemerintah justru lebih terbuka untuk menerima dan mendiskusikannya.

"Mereka lebih menerima jika kita berbicara mengenai potensi ekstremisme atau radikalisme." jelas Subhi.

Depok memang menjadi wilayah yang memiliki resiko ekstremisme dan radikalisme cukup masif. Salah satu kasus yang membetot perhatian publik ialah penangkapan Siska Nur Azizah bersama rekannya Dita Siska Millenia pada 2018 lalu. Keduanya ditangkap Datasemen Khusus Antiteror karena hendak menyerang polisi di Markas Komando Brigade Mobil di Kelapa Dua, Depok.

Pada tahun yang sama, warga Depok juga digegerkan oleh aksi teror berupa surat berisi ancaman pembunuhan terhadap 10 ulama. Surat tersebut ditujukan kepada Ustad Shobur di Cluster Gardenia, Grand Depok City, pada 3 Maret 2018.

Dari situlah, Subhi menyadari, jalan untuk membawa perubahan adalah dengan menggunakan isu ekstremisme dan radikalisme sebagai pintu masuk untuk mengubah perilaku intoleran yang telah mengakar di pemerintahan Depok. "Sambil terus mensosialisasikan pedoman, kami melihat bahwa diskusi mengenai ekstremisme bisa membuka peluang untuk mengubah sikap intoleransi," ujar Subhi.

Awal yang Alot untuk Perubahan

Aktivitas Yayasan Inklusif dalam mendorong toleransi dan tata kelola pemerintahan inklusif di Kota Depok terus bergulir. Bulan Maret 2024, bersama sejumlah lembaga masyarakat sipil lain, seperti Gusdurian, Yayasan Empatiku, Desantara dan Wahid Foundation, Yayasan Inklusif melayangkan surat audiensi kepada Kepala Kesbangpol Kota Depok. Audiensi tersebut disambut baik oleh Kesbangpol. Pertemuan berlangsung di kantor Kesbangpol Kota Depok dan dihadiri oleh Lienda Ratnanurdiany, Kepala Kesbangpol Kota Depok dan beberapa staf lainnya.

Dalam pertemuan itu, perwakilan lembaga masyarakat sipil menyampaikan bahwa mereka merasa turut bertanggung jawab atas pembangunan toleransi, inklusi sosial, dan keberagaman di Depok. Salah satu langkah yang mereka tawarkan adalah perbaikan kebijakan daerah. "Kami berharap pemerintah lebih terbuka terhadap kebijakan yang mendukung keberagaman dan toleransi," ujar Fanani, perwakilan dari Wahid Foundation.

Usulan itu diterima baik oleh Lienda. Dia menyatakan pihaknya terbuka dan mengapresiasi gagasan tersebut. "Kami sangat menghargai inisiatif ini. Pembangunan toleransi di Kota Depok adalah tanggung jawab bersama," kata Lienda.

Seperti juga pejabat lain, dalam pertemuan itu, Lienda masih berusaha menepis pandangan yang menyebut Depok sebagai kota yang intoleran. Menurutnya, kota ini tidak seburuk yang banyak diberitakan.

Lienda kemudian menyinggung SETARA Institute yang hampir setiap tahun mencitrakan Depok sebagai kota intoleran. Dia membandingkan dengan hasil survei yang dilakukan Lembaga Kajian Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan (LK3P) Universitas Indonesia. Dalam surveinya, LK3P UI mencatat Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Depok 2023 mencapai angka 73,43, termasuk dalam kategori tinggi.

Menanggapi itu, Subhi menyatakan bahwa SETARA Institute memiliki indikator pengukuran yang juga dapat diuji secara akademik, seperti juga survei yang dilakukan LK3P UI. Menurutnya, masing-masing kajian memiliki dimensi yang tidak bisa dibenturkan.

Dia juga memberi pemahaman bahwa apa yang dilakukan SETARA Institute bukan untuk mengorek keburukan pemerintah, lebih dari itu, mereka ingin membantu menunjukkan sisi pemerintahan yang perlu diperbaiki. “Kami kenal baik dengan SETARA Institute, kami bersama-sama dalam satu konsorsium. Namanya Konsorsium Inklusi.” Kata Subhi.

Kehadiran organisasi masyarakat sipil memang kerap dipandang problematik oleh Kesbangpol. Tak sedikit pertemuan antara Kesbangpol dan organisasi-organisasi sipil berakhir tanpa hasil berarti. Yayasan Inklusif telah dua kali bertemu dengan pihak Kesbangpol, hasilnya jauh dari kata positif.

Kesbangpol cenderung memandang organisasi seperti Yayasan Inklusif, atau bahkan SETARA Institute, hanya sebagai pihak yang berusaha mengungkap keburukan Kota Depok. Sikap itu juga yang dirasakan Subhi dalam pertemuan tersebut.

Mengubah Strategi

Alih-alih memecah suasana pertemuan yang mulai dingin, salah satu perwakilan dari Yayasan Empatiku menggeser pembicaraan dan mengarahkannya ke isu ekstremisme dan radikalisme di Depok.

Dia mengangkat kasus penangkapan seorang terduga teroris anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah di Sukmajaya pada 2021. Pembicaraan kembali menghangat.

Dari diskusi ini, muncul gagasan untuk merancang peraturan walikota terkait Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan (RAD PE). Lienda juga menyetujui gagasan itu. Pertemuan itu pun diakhiri dengan kesepakatan menunjuk Yayasan Inklusif untuk memandu penggodokan kebijakan tersebut.

Sejak saat itu, pertemuan demi pertemuan antara Kesbangpol dan organisasi masyarakat sipil berlangsung secara intens. Yayasan Inklusif, yang dipercaya sebagai pemandu dalam proses ini, mulai menyusun kerangka kebijakan RAD PE. Setiap pertemuan diisi dengan pembahasan berbagai perspektif, yang memperkaya proses penyusunan kebijakan dengan ide-ide yang saling melengkapi.

Tak hanya melalui pertemuan formal yang terjadwal, interaksi informal antara Kesbangpol, Yayasan Inklusif, dan organisasi masyarakat sipil lain pun semakin sering dilakukan. Ruang-ruang informal seperti diskusi santai di sela-sela rapat atau obrolan di warung kopi, justru menjadi wadah yang mempererat hubungan antara Kesbangpol dan organisasi masyarakat sipil. Hubungan yang awalnya tegang, seperti yang dialami Laeliya dengan beberapa staf Kesbangpol atau kebekuan yang sempat terasa seperti pada awal-awal pertemuan, perlahan mencair.

“Ruang-ruang informal seperti diskusi santai di sela-sela rapat atau obrolan di warung kopi, justru menjadi wadah yang mempererat hubungan antara Kesbangpol dan organisasi masyarakat sipil.”

Perubahan ini juga terlihat dalam cara Kesbangpol menyikapi hasil riset SETARA Institute. Lienda, yang awalnya resisten, mulai menunjukkan sikap terbuka. Dia menyatakan pemahamannya terhadap penilaian SETARA Institute dan berniat memperbaiki Indeks Kota Toleran (IKT) Depok.

“Apakah bisa kami difasilitasi bertemu dengan tim SETARA Institute dan berdialog tentang cara meningkatkan IKT Kota Depok?” pinta Lienda dalam salah satu kesempatan.

Kesaksian Halili Hasan, Direktur SETARA Institute, semakin menguatkan perubahan ini. Ia mengaku ditelepon langsung oleh Lienda untuk meminta kuesioner *self-assessment* penilaian IKT.

Halili juga mencatat bahwa Kota Depok, yang sebelumnya termasuk yang paling resisten, kini menjadi salah satu kota paling responsif dalam mengisi *self-assessment* tersebut.

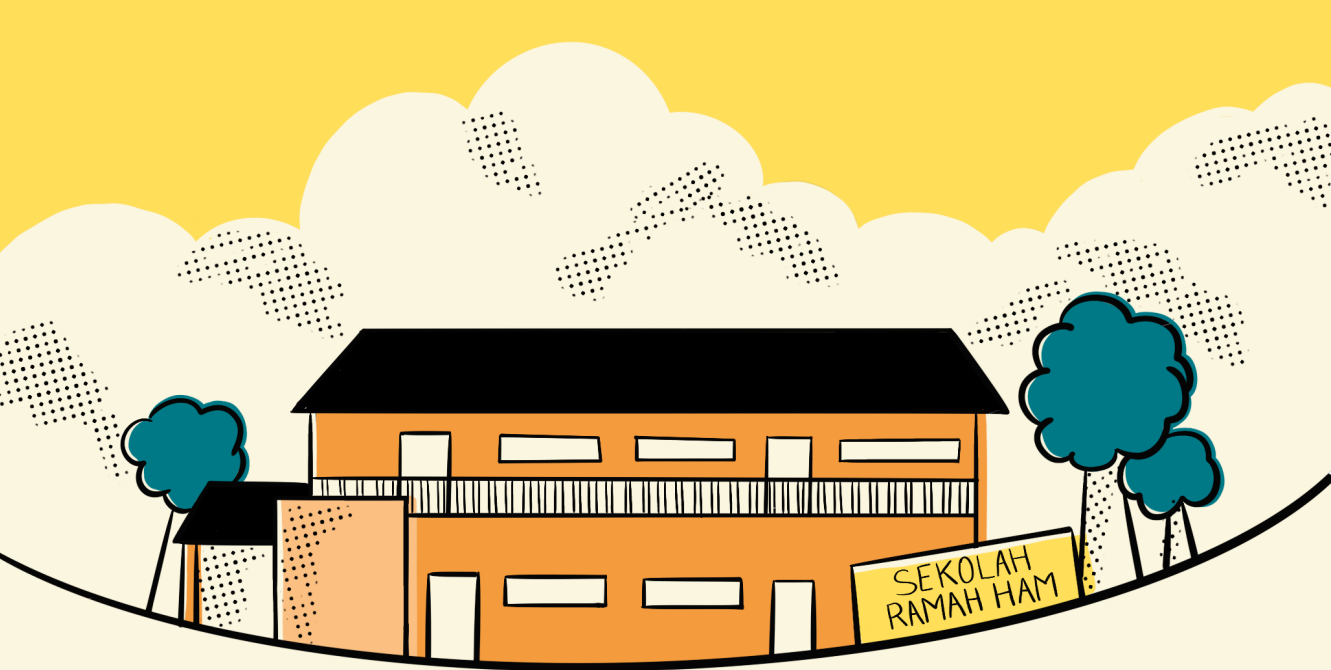
Diskusi yang berlangsung selama perumusan RAD PE juga semakin lebih konstruktif, terutama menyangkut isu intoleransi yang masih mewarnai kehidupan sosial di Depok. Sikap-sikap eksklusif yang masih ditunjukkan oleh beberapa pejabat pemerintahan juga menjadi titik perhatian dalam perumusan RAD PE.

Menjelang akhir tahun, tepatnya pada 31 Desember 2024, Wali Kota Depok, Muhammad Idris akhirnya menandatangani Peraturan Walikota (Perwal) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan (RAD PE). Langkah ini merupakan puncak dari proses panjang yang berlangsung cukup lama sekaligus menjadi langkah awal menyongsong Kota Depok sebagai kota yang ramah bagi keberagaman.

Perkembangan yang baik ini harus terus didampingi dan dipantau karena perubahan adalah proses, terutama di kalangan masyarakat dan di dalam diri warga sebagai individu.

Bukankah, seperti kata orang bijak,
*great things are not done by impulse, but
a series of small things brought together...*

“Great things are not
done by impulse, but a
series of small things
brought together”





Merajut Rasa Aman di Sekolah

Merajut Rasa Aman di Sekolah

Syafira Khairani

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Siang itu, di sebuah sekolah menengah kejuruan, suara derap langkah siswa bergema di lorong-lorong kelas. Sebagian anak tampak sedang bercanda, tetapi di sudut lain, seorang siswa menunduk, wajahnya tampak kesal. Ia baru saja dipermalukan di depan kelas lantaran diteriaki oleh gurunya dengan panggilan yang tidak layak. Selama seminggu penuh ia selalu dipanggil dengan cara demikian sebagai bentuk pendisiplinan terhadapnya. Pikir mereka, rasa malu ini bisa memberikan “efek jera” sebagai konsekuensi karena tidak mengikuti aturan sekolah.

Pada banyak sekolah di Indonesia, ruang sekolah tak selalu menjadi tempat aman bagi siswa. Suara tawa dan canda kerap tersembunyi dibalik rasa takut yang mereka simpan rapat. Kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikis masih terjadi dan dianggap wajar atas nama disiplin dan moral.

Antara tahun 2020 hingga 2023, Komnas HAM menerima 184 pengaduan terkait pelanggaran hak atas pendidikan. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sepanjang 2024 bahkan mencatat 573 kasus kekerasan di sekolah, dengan 42 persen di antaranya adalah kekerasan seksual. Angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya terdapat wajah-wajah murid yang kehilangan rasa aman, suara-suara yang secara struktural terbisukan, dan hak-hak yang terus diabaikan—menggambarkan seberapa dalam dan kompleksnya akar masalah pendidikan di Indonesia.

Sekolah Belum Menjadi Ruang Aman

Zizy (bukan nama sebenarnya), seorang perempuan muda asal Aceh, adalah salah satunya. Dalam sebuah webinar yang diadakan *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) dan *Working Group on Women and Preventing/ Countering Violent Extremism* (WGWC) pada Agustus 2023, ia membagikan kisah yang pernah dia pikir “biasa” di sekolahnya.

Zizy bercerita bahwa sekolahnya kerap melakukan razia pakaian dadakan. Rok, dalaman jilbab, *legging*, kaos kaki—semuanya menjadi obyek razia. Jika tidak sesuai aturan, mereka dihukum. “Kalau tidak pakai ciput (dalaman jilbab), rambut kami digunting. Kalau ada belahan rok, justru dibelah lebih lebar. Kadang, rok dibelahnya sedikit saja, entah karena memang terbelah atau memang sengaja dibelah agar mudah jalan,” cerita Zizy.

Mirisnya lagi, cara pandang ini terjadi dari generasi ke generasi, dirawat sedemikian rupa, dan kemudian dianggap wajar. Kurangnya agensi individu dalam menyadari adanya bentuk kekerasan (*self-awareness* dan *self-consciousness*) menjadi salah satu faktor kerentanan. Tidak jarang pula korbannya menyalahkan diri sendiri.

Dulu, Zizy tidak sadar bahwa itu adalah bentuk kekerasan. “Saya pikir, itu memang salah saya,” kenangnya.

Kisah Zizy hanyalah puncak dari gunung es. Persoalan diskriminasi dan intoleransi turut menambah polemik pendidikan di Indonesia. Di berbagai sekolah, kekerasan dilegitimasi melalui kebijakan yang diskriminatif, eksklusif, dan mencabut ruang aman anak. Praktik-praktik semacam ini menguat dan rentan menjadikan siswa perempuan sebagai subjek perundungan.

Di berbagai sekolah, kekerasan dilegitimasi melalui kebijakan yang diskriminatif, eksklusif, dan mencabut ruang aman anak.

Di antara faktor utama penyebabnya adalah nilai-nilai kebenaran agama yang diajarkan secara hitam-putih, benar-salah, baik-buruk. Ketidakpatuhan atas kebijakan sepihak ini dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan atas nilai-nilai moral yang dianut masyarakat.



Nilai-nilai kebenaran agama yang diajarkan secara hitam-putih, benar-salah, baik-buruk.



Fenomena kekerasan di dunia pendidikan yang terus meningkat menjadi catatan gelap bagi pemerintah. Pada 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menetapkan tiga dosa besar pendidikan, yakni perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Pemerintah menyebutnya sebagai “dosa besar”. Artinya pendidikan harus “disucikan” dan dikembalikan pada hakikat dasarnya: memerdekakan.

Kembali teringat pada cita-cita Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, bahwa “maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia.”

Akan tetapi, bagaimana jika institusi pendidikan justru menjadi tempat yang represif bagi anak, tumbuh suburnya relasi kuasa yang timpang, tertekannya kelompok minoritas dan lahirnya rasa takut. Sedangkan, rasa aman menguap entah ke mana.

Dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-25, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menekankan bahwa proses belajar mengajar yang berkualitas tidak akan terwujud tanpa adanya rasa aman bagi anak.

“Kalau kita tidak menyelesaikan masalah kekerasan, (kita) tidak bisa menyelesaikan masalah ketertinggalan literasi dan numerasi,” tegas Nadiem.

Merdeka Belajar Episode ke-25 adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

INFID dan Pendidikan Publik

Sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil yang kelahirannya beriringan dengan puncak kegelapan Orde Baru, INFID menaruh perhatian besar pada pemajuan HAM dan pembangunan inklusif di Indonesia.

Berdiri sejak tahun 1985, INFID menjalankan kerja-kerja advokasi kebijakan, selain turut menghadirkan pendidikan publik sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sipil dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi semua.

Merespons sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di lingkup pendidikan, INFID turut mendorong penguatan kapasitas lembaga pendidikan sebagai *duty bearer*.

Sejak tahun 2021, lembaga ini aktif memfasilitasi pelatihan mengenai HAM dan Demokrasi bagi guru-guru pendidikan agama Islam (PAI) dan manajemen sekolah. Satu tahun berikutnya, pada tahun 2022, INFID menyelenggarakan pelatihan khusus terkait pengintegrasian pendidikan berbasis HAM pada guru PAI dan ekosistem sekolah.

Pemilihan guru PAI sebagai subjek pelatihan bukan tanpa sebab. Dalam pengamatan INFID, orde baru menyisakan ortodoksi keagamaan yang terus dirawat dan diistimewakan oleh negara.

Di Indonesia, yang tampaknya menerapkan demokrasi religius², agama telah menjadi identitas kolektif yang memiliki kedudukan khusus dalam kultur masyarakat dan negara. Alih-alih menjadi kelemahan, INFID memandang guru agama Islam sebagai entitas penting dalam mewujudkan perayaan toleransi di tengah mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.

²Demokrasi religius merujuk pada suatu model demokrasi yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam sistem negara demokratis, dengan tetap menghormati keberagaman warga negaranya. Dalam konteks keindonesiaan, dimana nilai-nilai keagamaan telah lama hadir secara sosial kultural, konsep demokrasi religius berpengaruh penting bagi sebagian besar warga negaranya karena menempatkan agama sebagai sumber inspirasi untuk kebaikan bersama. (Sumber: <https://s3ppi.ummy.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/demokrasi-religius-untuk-indonesia-berkemajuan-dan-berkeadilan.pdf>)

Berangkat dari pemahaman tersebut, INFID berupaya mendorong perubahan paradigma guru, dari cara pandang tradisional menuju inklusif melalui kegiatan pelatihan “Pendidikan Ramah HAM bagi Guru PAI dan Ekosistem Sekolah.”

Dilema

Anharurrohman, akrab disapa Pak Anhar oleh murid-muridnya, adalah guru Pendidikan Agama Islam di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknik di Surakarta. Sekolahnya cukup besar, mayoritas muridnya laki-laki, dengan suasana sekolah yang cukup dinamis. Mengajar di sekolah kejuruan membuat pemahaman HAM menjadi tantangan karena dinamika interaksi yang keras dan aturan yang cenderung otoritatif.

Dalam perjalanan karirnya, Pak Anhar mulai menyadari bahwa pendidikan di sekolah seringkali tidak memenuhi kebutuhan siswa dalam memahami hak-hak mereka.

“Apakah metode yang ia yakini selama ini sungguh membentuk karakter siswa, atau sebaliknya?”

Namun, perjalanan panjangnya sebagai guru membuat Pak Anhar sampai pada satu titik persimpangan. Ia mulai mempertanyakan: “Apakah metode yang ia yakini selama ini sungguh membentuk karakter siswa, atau sebaliknya?”. Keraguannya bertambah ketika ia mendengar istilah *Hak Asasi Manusia* atau HAM dalam konteks pendidikan. Dia tidak menolak, tetapi baginya, istilah itu seperti dua sisi mata uang. HAM adalah sesuatu yang baik, tetapi juga bisa menjadi penghalang dalam menegakkan disiplin.

Di sekolahnya, beberapa guru masih menerapkan metode pendisiplinan yang keras, dengan alasan bahwa itu adalah bagian dari cara mendidik yang efektif. “Dulu, kami melihat HAM ini cukup membelenggu tenaga pendidik. Karena kami (guru) SMK, kami butuh disiplin keras, dengan cara-cara militer,” ungkapnya.

Keraguan itu bukan milik Pak Anhar seorang. Di sekolah lain, Zeni Syafrina—guru agama SMAN 15 Padang—mengaku pernah memandangi HAM sebagai momok. Dulu, ia berandai bisa kembali ke masa lalu, di mana guru dihormati tanpa harus khawatir dilaporkan karena melarang atau menertibkan murid dengan cara yang diyakininya.

“Saya maunya bisa kembali ke zaman dahulu, di mana guru bisa menertibkan siswa tanpa takut akan terjerat HAM,” kenangnya dengan senyum getir.

Selain Pak Anhar dan Bu Zeni, pandangan serupa juga diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Padang, Syamsul Bahri, ketika ia mencoba memperkenalkan HAM pada guru-guru di sekolahnya. Berbagai tanggapan bermunculan. Ada yang menilai HAM membelenggu tenaga pendidik dalam mendisiplinkan siswa.

“Guru sering merasa serba salah, karena sedikit-sedikit dikaitkan dengan HAM. Itu membuat kami takut bertindak,” ungkap Pak Syamsul membagikan respon guru-guru terhadap HAM.

Kekhawatiran ini tidak datang dari ruang kosong. Ia tumbuh dari pengalaman kolektif sebagai tenaga pendidik dan masyarakat kota Padang, sebuah kota dengan norma sosial yang homogen dan kuat nuansa agamanya.

Kota itu sering disebut oleh SETARA Institute dalam laporan tahunan Indeks Kota Toleran (IKT) sebagai satu dari 10 kota dengan tingkat toleransi terendah di Indonesia. Sorotan media dan lembaga HAM kerap terasa seperti beban berat di pundak mereka.

Sejumlah kasus pelanggaran HAM maupun kebijakan diskriminatif di daerahnya tentu jadi topik yang hangat. “HAM seringkali dijadikan senjata untuk menyerang sekolah,” lanjut Pak Syamsul.

Baginya, ada semacam *trust issue* terhadap pihak luar, entah itu LSM atau media. Mereka khawatir niat baik untuk mendisiplinkan siswa akan disalahartikan.

Namun, di tengah keraguan itu, muncul kesadaran baru. Pak Syamsul mulai menyadari bahwa pelanggaran HAM bisa terjadi tanpa niat buruk. “Hampir semua orang pernah melanggar HAM, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Ada ringan, sedang, dan berat,” ujarnya, reflektif.

Bagi kebanyakan guru, HAM memang terasa seperti konsep asing yang sulit diterapkan di ruang kelas. Menurut mereka, siswa harus diajarkan dengan disiplin ketat, karena begitulah dulu mereka dididik. Sistem pendidikan yang masih feodal membuat pendekatan ini terus berlanjut dari generasi ke generasi.

Tidak sedikit guru yang mengutarakan pandangannya mengenai HAM bertentangan dengan nilai-nilai agama. HAM adalah produk Barat, tidak cocok untuk konteks Indonesia—kurang lebih demikian pemahaman yang diyakini beberapa guru. Narasi tersebut telah bergulir begitu lama, diamini pula oleh banyak pihak.

Jendela Baru Pendidikan Inklusif

Perubahan paradigma tidak terjadi dalam semalam. Konsorsium INKLUSI, melalui *Pelatihan Pendidikan Ramah HAM bagi Guru PAI dan Ekosistem Sekolah* yang diprakarsai oleh INFID bersama Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) dan Yayasan Cahaya Guru (YCG), berupaya untuk menggeser paradigma para pengajar.

Benih-benih pemahaman baru pun mulai ditumbuhkan. Mereka diajak memahami pendidikan HAM dengan lebih praktis—merefleksikan cara guru mengajar, mendampingi dan mendisiplinkan anak—bukan dari sudut pandang kekuasaan, melainkan hak anak sebagai manusia, terlepas dari latar belakang agama, etnis, suku, maupun ekonomi.

Istilah *mendisiplinkan* kerap kali lekat dengan makna pemberian hukuman. Tidak sedikit pendekatan yang digunakan adalah menyebarkan rasa takut. “Jika paradigma disiplin terus dimaknai demikian, maka keluarannya adalah berbagai bentuk kekerasan,” terang Abdul Waidl, Program Manager INFID, menjelaskan latar belakang pelatihan ini.

Titik balik kesadaran banyak datang ketika Pak Kosim, dosen UIN Padang yang menjadi salah satu narasumber, menjelaskan bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan dalam mendidik anak. “Materi dari Pak Kosim membuka pandangan kami. Ternyata, mendisiplinkan tidak harus dengan hukuman fisik,” ungkap Bu Zeni.

Ia baru menyadari bahwa perintah salat bagi anak berlaku mulai usia tujuh tahun, tetapi Islam memberi waktu tiga tahun penuh—lebih dari lima ribu kesempatan—untuk mendidik dengan keteladanan, kasih sayang, dan penguatan kebiasaan baik, sebelum ada anjuran hukuman.

Pada sesi yang sama, diskusi di ruangan hotel itu berlangsung penuh dialektika. Beberapa guru menyampaikan ketidaksetujuan, yang lainnya mengangguk sepakat. Sesekali, kegamangan muncul.

Pak Abbas, seorang guru agama di Semarang, misalnya, berpendapat bahwa kekerasan dalam penegakan disiplin, apalagi terkait kewajiban syariat, adalah sah-sah saja. Ia bercerita bagaimana pengalaman keras di masa kecil justru membentuk dirinya menjadi pribadi yang disiplin hari ini.

“Dalam Islam juga tegas, ada hukum potong tangan, *qishash*, rajam,” katanya.

Pendapat serupa juga diutarakan oleh Pak Arif, guru agama di Kota Padang.

Dengan penuh semangat, Pak Arif membagikan pengalamannya sendiri sebagai guru yang mendidik anak-anak di sekolah kejuruan. Menurut dia, budaya kekerasan itu sudah mengakar dalam pola asuh di SMK tempat ia mengajar.

“Kalau tidak keras, anak-anak itu tidak akan patuh,” timpalnya dengan yakin.

Dalam serangkaian pelatihan, memang banyak dijumpai guru yang beranggapan bahwa pendisiplinan dengan kekerasan jauh lebih efektif, sehingga anak lebih patuh dan tidak mengulangi perbuatannya.

Akan tetapi, yang sering luput dalam perhitungan adalah cara kekerasan itu belum tentu efektif jangka panjang untuk membentuk karakter anak.

"Anak bisa jadi benci dan punya trauma di kemudian hari," terang Pak Kosim, merespon diskusi hangat tersebut.

Bu Zeni, yang selama ini merasa cara-cara itu baik-baik saja, untuk pertama kalinya mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri.

Guru-guru PAI yang dahulu merasa nyaman dengan metode tradisional mulai berlatih untuk lebih memahami siswa. Mereka belajar untuk lebih peka terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekolah, baik dalam interaksi sehari-hari maupun dalam pembuatan kebijakan. Perlahan, mereka mendorong sekolah agar menjadi ruang aman dan nyaman bagi anak, di mana setiap suara layak dihargai.

Membaca Ulang Kekerasan di Sekolah

Seiring berjalannya waktu, satu persatu guru mulai membuka mata terhadap diskriminasi dan bentuk kekerasan lain yang selama ini tersembunyi di balik ketidaktahuan mereka. Perlahan, kesadaran terhadap luasnya dimensi kekerasan di lingkup pendidikan pun muncul.

Guru mulai memahami bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk fisik atau verbal, terkadang ia hadir dalam wujud kebijakan yang diskriminatif.

Hal itu disadari Bu Mei, guru di SMA 5 Kota Depok, yang sudah mengabdikan sejak 2006. "Saya baru tahu bahwa HAM itu tidak hanya tentang *bullying* atau kekerasan fisik, tapi juga kekerasan dalam bentuk kebijakan.

“**Saya baru tahu bahwa HAM itu tidak hanya tentang *bullying* atau kekerasan fisik, tapi juga kekerasan dalam bentuk kebijakan.**”



Melalui pelatihan Pendidikan Ramah HAM, dia memahami bahwa diskriminasi terhadap siswa yang berbeda, hingga keputusan kebijakan yang tidak manusiawi, juga termasuk pelanggaran HAM.

Sebagai guru agama, Pak Anhar mengakui pernah memberikan hukuman fisik kepada siswa, bahkan di depan siswa lainnya, “Seperti *push-up* 25 kali atau hukuman hormat bendera selama 45 menit bagi siswa yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Setelah pelatihan, Pak Anhar semakin tersadarkan bahwa keputusannya memberikan hukuman tersebut dapat menjadi masalah di kemudian hari. “Saya berpikir banyak, khawatir kalau ini bermasalah,” jelasnya.

Pak Anhar mulai enggan menggunakan cara-cara paksaan. Pun, saat mengajarkan anak-anak untuk membiasakan salat sunah di luar pelajaran agama.

“(Salat duha) tidak diwajibkan. Tapi, bareng-bareng diajak,” cerita Mesiya dan Farayya, siswa kelas XI yang pernah dibimbing oleh Pak Anhar. Saat masuk waktu duha, Pak Anhar akan bergegas datang ke kelas-kelas. Dengan sabar, ia berdiri di depan ruang kelas sembari menunggu semua siswa keluar kelas. Pendekatannya sangat lembut, merangkul siswa sambil mengajak, “Ayo salat,” ucap mereka menirukan gestur Pak Anhar.

Pernah pula satu ketika, seorang kawan guru memanggil murid dengan sebutan yang tidak patut. Satu minggu penuh hukuman itu ia berlakukan lantaran ingin memberikan efek jera. Dengan penuh kesadaran, Pak Anhar mengingatkan bahwa cara tersebut termasuk perundungan.

Namun hal itu tidak mudah, karena ada saja rekan kerja yang menolaknya.

“*Ora urusan*. Kalau tidak seperti itu mereka akan mengulangi,” Pak Anhar menirukan jawaban rekannya.

Bagi Pak Anhar, materi Islam dan HAM yang didapatkannya ketika pelatihan semakin membuka khazanah berpikirnya. Tidak hanya kepada siswa, memberikan edukasi pada guru-guru lain memang jadi pekerjaan rumah Pak Anhar.

“Itu butuh proses. *Step by step*,” ucapnya pelan. Intensitas cara disiplin keras yang diterapkan kawan gurunya akan dapat diredam dengan perlahan. “Perlu *ngobrol* dari hati ke hati,” ujar guru yang dinilai lemah lembut oleh beberapa muridnya.

Refleksi serupa tidak hanya oleh guru PAI saja, tetapi juga Pak Talimin. Pengawas dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah Depok dan Bogor itu telah bertahun-tahun mendampingi sekolah termasuk menangani pengaduan kekerasan.

Dia mengenang salah satu kasus di sekolah binaannya ketika seorang murid merasa dirundung oleh gurunya lantaran dipanggil dengan julukan fisiknya. Ketidaktahuan membuat guru-guru menyepelkan permasalahan di depan mata.

“Ia pikir itu hal sepele, tetapi ternyata, julukan itu membuat murid sampai menangis,” ungkapnya. “Anak-anak itu mungkin terlihat biasa saja, tetapi di dalam hati mereka terluka.”

Sebagai pengawas, kesadaran terhadap bentuk-bentuk perundungan sudah lama terinternalisasi. Selama pelatihan, Pak Talimin terlihat antusias berbagi pengetahuannya dengan peserta lainnya, yang kemudian menciptakan ruang-ruang diskusi.

Bagi dia, proses belajar tidak memandang jabatan dan usia. Mengikuti pelatihan ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pemahamannya mendorong sekolah yang aman dan inklusif.

Upaya Sederhana Menuju Ruang Aman

Sekembalinya dari pelatihan, guru-guru mengantongi sejumlah catatan reflektif yang akan dilakukan. Mereka pulang tidak hanya dengan pengetahuan baru, tetapi juga komitmen untuk meneruskan perubahan di sekolah masing-masing, sekalipun dimulai dengan hal yang sangat sederhana.

Bagi Pak Talimin, pelatihan ini menjadi momen penting yang mengubah cara pandangnya terhadap pendidikan. Ia semakin tersadarkan bahwa zaman telah berubah, dan pola pikir pendidik pun harus ikut menyesuaikan.

“Jangan gunakan ukuran pendidikan kita yang lama untuk mendidik anak-anak sekarang,” ujarnya mantap.

Sebagai seorang pengawas, ia mulai mendampingi sekolah-sekolah binaannya untuk memberikan penguatan tentang *bullying*. Ia memastikan bahwa semua guru memahami bahwa setiap kata, setiap perlakuan, bisa berdampak besar bagi murid. “Dulu, kami berkaca pada pengalaman dididik (dengan keras). Tapi, sekarang, anak-anak berbeda. Mereka lebih peka. Perlu benar-benar hati-hati, karena apa yang kita ucapkan bisa menjadi bumerang yang menyakiti pelajar,” terangnya.

Pak Talimin kini aktif mengingatkan rekan-rekan guru bahwa mendidik tidak bisa lagi dilakukan dengan satu pola untuk semua anak. “Ada anak yang bisa *dikerasi*, ada yang tidak. Ada yang butuh perhatian khusus, ada juga yang tidak,” tambahnya.

Pelatihan ini juga mendorong guru untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih partisipatif. Salah satunya Pak Anhar, yang memilih metode berbeda, yaitu dengan membuka ruang dialog dan refleksi dengan siswa. Lebih dari sekadar mengajarkan dogma agama, Pak Anhar mulai membangun ruang diskusi yang kritis, terbuka, dan inklusif, tanpa perlu khawatir dihakimi. Pendekatan ini membuat siswa merasa nyaman.

Pak Anhar mengenang satu momen ketika seorang siswa bertanya tentang hukum merayakan *Valentine's Day*. Dengan sangat berhati-hati, ia merespon, tanpa menghakimi muridnya. Ia tahu, sebagai guru agama, ia bisa saja langsung melabeli perayaan itu sebagai haram. Tetapi, ia memilih pendekatan yang lebih humanis.

"Saya bilang, kalau mau kasih coklat, kasih juga buku Iqra. Kalau saya langsung menyebut halal-haram, mereka akan menjauh, takut sama saya," kisahnya.

Melalui diskusi yang terbuka, Pak Anhar berharap siswa akan memiliki kemampuan berpikir kritis sehingga punya kesadaran sendiri. "Saya khawatir, kalau mereka terus-terusan merasa berdosa, mereka menjadi pesimis (untuk beribadah)," tambahnya.

Perubahan tidak hanya terlihat dalam cara ia mengajar, tetapi juga dalam pandangannya terhadap aturan berpakaian di sekolah. Sebelumnya, sebagai guru agama, ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan seluruh siswi beragama Islam harus mengenakan jilbab.

Namun, setelah pelatihan, ia mulai menyadari bahwa pemaksaan bukanlah cara terbaik dalam mendidik. Ia mulai membiarkan pelajar perempuan berproses secara alami dalam memahami keyakinan mereka sendiri.

66

Setelah pelatihan, ia mulai menyadari bahwa pemaksaan bukanlah cara terbaik dalam mendidik. Ia mulai membiarkan pelajar perempuan berproses secara alami dalam memahami keyakinan mereka sendiri.

66

"Mengapa saya memaksakan mereka yang belum siap (berjilbab)?" tanyanya reflektif, "Biarlah proses yang mendewasakan dan memberikan pembelajaran kepada mereka," tambahnya. Kini, Pak Anhar meyakini bahwa jilbab adalah sebuah perjalanan spiritual, bukan sesuatu yang dapat dipaksakan.

Sasa, salah satu siswi Pak Anhar yang baru saja menyelesaikan bangku kelas XII, merasakan langsung cara ajar Pak Anhar yang dinilai sangat terbuka dan dua arah. “Pak Anhar menjelaskan secara bertahap dan memberi perumpamaan agar mudah dipahami,” ucap Salsa.

Mengenai kewajiban berjilbab, “Kalau belum istiqomah, *nggak* apa-apa. Yang penting, saling mengingatkan dengan cara yang baik,” jelas Salsa menirukan jawaban Pak Anhar.

Menurut Pak Anhar, jilbab itu tentang keikhlasan dan ketaqwaan seseorang terhadap Allah, sehingga tidak perlu dipaksakan.

Di SMAN 15 Padang, Bu Zeni juga mengambil langkah nyata. Setelah pelatihan, ia bersama tim sekolah membentuk Satgas Sekolah Ramah HAM yang lebih komprehensif, dari yang mulanya hanya berfokus pada isu *bullying*, kemudian juga yang menyangkut kekerasan seksual dan fisik.

“Kami sadar, (menerapkan) Sekolah Ramah HAM tidak cukup kalau hanya anti-*bullying*. Harus ada agen-agen yang siap mengatasi kekerasan dalam berbagai bentuk,” jelas Bu Zeni.

Pak Syamsul, di SMAN 1 Padang, melakukan hal serupa. Sekolah yang semula sudah memiliki Satgas TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) semakin diperkuat melalui sosialisasi anti-*bullying* dan kekerasan seksual.

Sebagai kepala sekolah, Pak Syamsul juga memiliki otoritas untuk merevisi sistem tata tertib sekolah. Salah satu kebijakan lama yang ia ubah adalah sistem poin pelanggaran yang kaku, yang memungkinkan siswa dikeluarkan dari sekolah hanya karena akumulasi pelanggaran.

“Para guru sepakat bahwa pendekatan pendidikan yang memerdekakan adalah jalan terbaik.”

Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar dalam ruang aman, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang kritis terhadap isu-isu HAM di sekitarnya.

“Kami revisi dengan mengadopsi konsep HAM. Saat ini kami sudah bisa mempertimbangkan aspek HAM,” tegasnya.

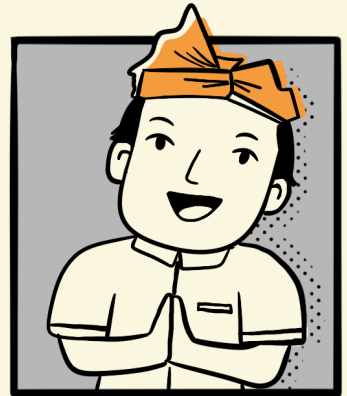
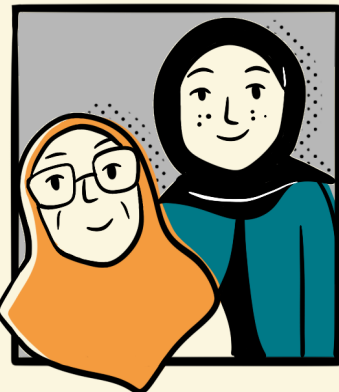
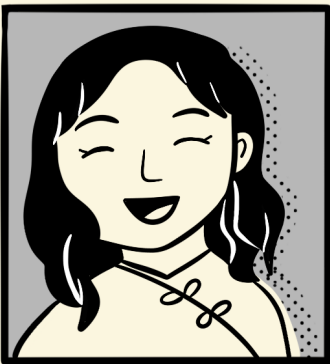
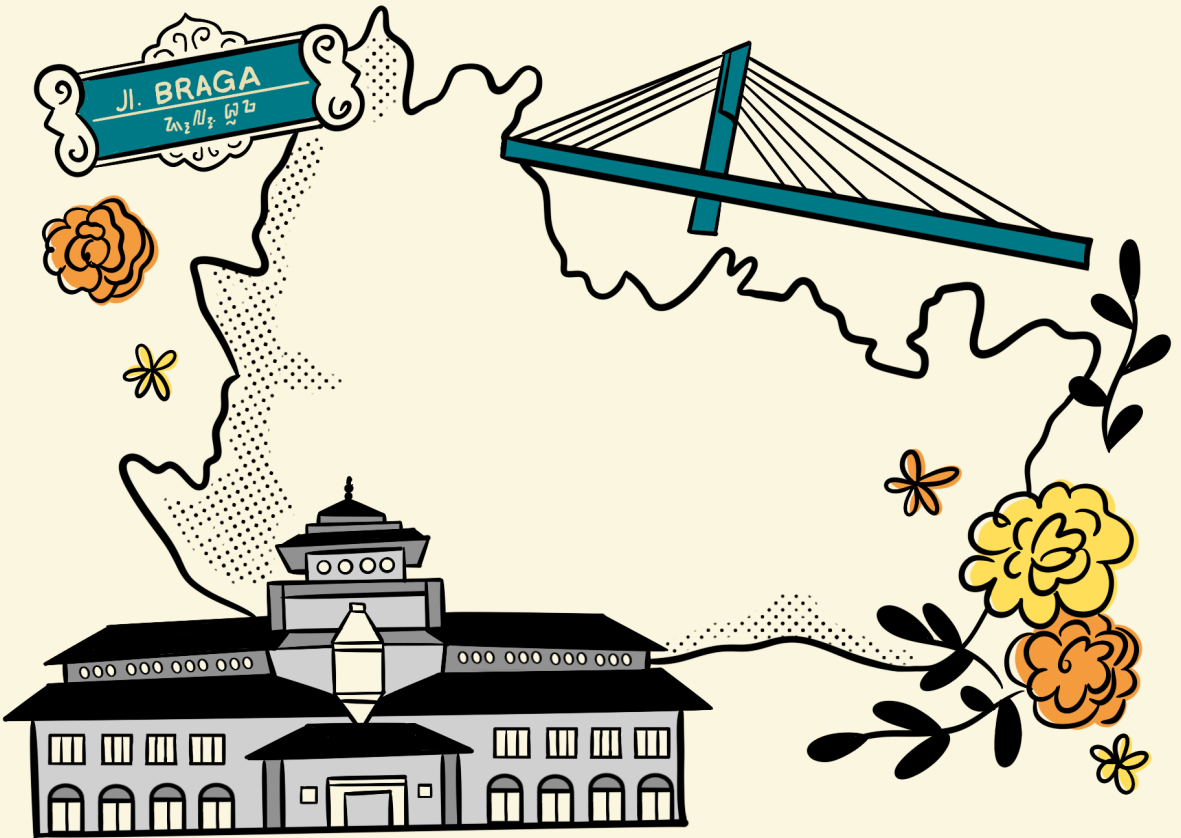
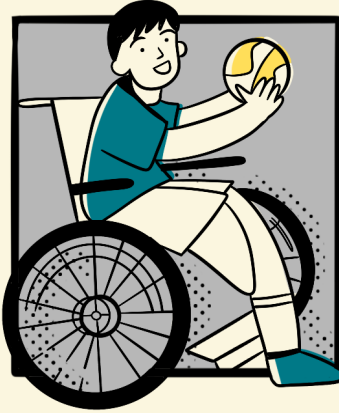
Para guru sepakat bahwa pendekatan pendidikan yang memerdekakan adalah jalan terbaik. Mereka sangat berharap pendidikan ramah HAM menjangkau lebih banyak guru di berbagai wilayah. Tidak hanya program, tetapi berakar menjadi budaya yang tertanam dengan kokoh.

Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar dalam ruang aman, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang kritis terhadap isu-isu HAM di sekitarnya.

Kisah Pak Anhar, Bu Zeni, Pak Talimin, Bu Meilisma, dan Pak Syamsul, hanyalah segelintir cerita dari lebih 150 peserta yang membersamai proses belajar ini. Mulai dari perubahan paradigma, perubahan sikap, hingga perubahan pengambilan kebijakan—semuanya bukanlah perkara sehari semalam.

Ini adalah perjalanan panjang, yang menuntut komitmen dan keberanian untuk bertanya, mengoreksi diri, dan melangkah lebih bijak. Para guru tahu, mereka masih berjalan di persimpangan, mencari jalan terbaik untuk mendidik anak-anak mereka.

Namun, satu hal pasti, mereka tidak sendiri. Banyak guru siap melangkah bersama menapaki jalan panjang itu. ***



3

**Titik Terang
Pengakuan Penuh
Penghayat
Kepercayaan:**

Pengalaman di
Kota Bandung

Titik Terang Pengakuan Penuh Penghayat Kepercayaan :

Pengalaman di Kota Bandung

Sayyidatul Insiyah

SETARA Institute

Wanti, penghayat kepercayaan di Kota Priangan, adalah satu dari ratusan atau mungkin ribuan penghayat kepercayaan yang mulai terbebas dari jerat diskriminasi. Semua bermula dari kegiatan Pelatihan tentang Tata Kelola Pemerintahan Inklusif (Inclusive Governance) yang diprakarsai oleh SETARA Institute di Kota Bandung, tahun 2021.

Kilas balik pada situasi beberapa tahun silam.

Kota Bandung menyimpan berbagai permasalahan terkait inklusivitas. Dalam temuan Indeks Kota Toleran SETARA Institute misalnya, dari 94 kota, Kota Bandung bahkan menempati urutan ke-89 di tahun 2015, stagnan di peringkat 89 pada tahun 2017, peringkat 69 pada tahun 2018, turun lagi di peringkat 74 di tahun 2020.

Indikator peringkat yang tidak pernah menempatkan Kota Bandung keluar dari 20 peringkat terbawah ini menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki catatan untuk menjadi koreksi, baik pada level pemerintah maupun pada level masyarakat.

Peristiwa intoleransi, masifnya kelompok konservatif, banyaknya kebijakan diskriminatif, hingga belum inklusifnya kapasitas aparatur pemerintah daerah, menjadi beberapa catatan bagi Kota Bandung untuk berbenah.

“Alih-alih menikmati hak konstitusional, selembarnya sebagai pemenuhan hak dasar pun belum dimiliki oleh banyak penghayat kepercayaan di kota itu.”

Salah satu permasalahan yang menjadi catatan adalah berbagai bentuk diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan di kota Bandung. Alih-alih menikmati hak konstitusional, selembarnya sebagai pemenuhan hak dasar pun belum dimiliki oleh banyak penghayat kepercayaan di kota itu.

Penghayat juga menghadapi banyak risiko ketika menunjukkan identitasnya, sehingga mereka enggan bersosialisasi. Ancaman perundungan dan berbagai jenis kekerasan termasuk diskriminasi, menghantui banyak penghayat kepercayaan saat itu. Itu sebabnya, Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang memerintahkan pencantuman Penghayat Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan dinilai sebagai pengakuan setengah hati (*half-hearted recognition*).

Membuka Sekat

Dalam forum *Inclusive Governance*, sekat-sekat yang selama ini menjadi penghalang inklusi sosial itu, mulai terbuka. Penghayat kepercayaan dengan lantang menunjukkan identitas mereka dan secara eksplisit, memperkenalkan diri.

Sebagai forum yang mempertemukan masyarakat sipil dengan aparatur pemerintah kota, Pelatihan *Inclusive Governance* tidak hanya dimaksud sebagai sarana peningkatan kapasitas, tetapi juga wadah penyaluran aspirasi warga Bandung kepada aparatur di pemerintahan.

Dalam forum itu, anggota komunitas penghayat dengan lugas menyampaikan beragam permasalahan dan diskriminasi yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan identitas.

Termasuk dokumen kependudukan, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan lain-lain, termasuk kolom agama “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” dalam KTP yang masih belum sepenuhnya dinikmati oleh penghayat kepercayaan.

Seusai pelatihan, kehangatan yang tercipta di antara para peserta terutama antara masyarakat sipil dengan aparat pemerintah kota Bandung terus berlanjut.

Berbekal pemahaman tentang Hak Asasi Manusia dan tata kelola pemerintahan yang inklusif dalam pelatihan, Asep Insan Parid, Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, berinisiatif melakukan kunjungan ke kantor Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI). Selain bersilaturahmi, dia juga melakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan.

Kesbangpol Kota Bandung kemudian mempertemukan perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan penghayat kepercayaan untuk memfasilitasi pembuatan KTP bagi penghayat kepercayaan.



Satu persatu tindak diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan mulai dihapus. Tabir inklusi sosial yang selama ini tertutup rapat bagi penghayat kepercayaan mulai terbuka.



Satu persatu tindak diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan mulai dihapus. Tabir inklusi sosial yang selama ini tertutup rapat bagi penghayat kepercayaan mulai terbuka. Bahkan, beragam prakarsa baik bermunculan sebagai bentuk fasilitasi Pemerintah Kota Bandung kepada warganya yang selama ini termarjinalkan.

“Penghayat jadi berani membuka diri, menunjukkan identitasnya, termasuk pemuda. Perempuan (penghayat) juga punya keberanian.

Dulu, ketika di lingkungan masyarakat, (mereka) diam. Saat ini, (mereka) sudah mau berbaur di masyarakat, misalnya, menjadi kader posyandu,” ujar Wanti, alumni pelatihan.

Advokasi yang dilakukan SETARA Institute dan berbagai organisasi masyarakat sipil di Kota Bandung tidak hanya berhasil mendorong pemerintah Kota Bandung agar lebih sadar terhadap permasalahan yang dihadapi penghayat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan diri para penghayat kepercayaan.

Menguatkan Pilar Kepemimpinan Birokrasi

Sejak tahun 2022, SETARA Institute bersama Konsorsium INKLUSI secara intensif melakukan *monitoring* sekaligus pendampingan pada pilar-pilar pembentuk ekosistem toleransi, yaitu pilar kepemimpinan politik, pilar kepemimpinan sosial, dan pilar kepemimpinan masyarakat.



Perkembangan menuju inklusi penghayat kepercayaan di kota Bandung terus diupayakan, terutama oleh pilar kepemimpinan birokrasi dan pilar kepemimpinan sosial.



Perkembangan menuju inklusi penghayat kepercayaan di kota Bandung terus diupayakan, terutama oleh pilar kepemimpinan birokrasi dan pilar kepemimpinan sosial.

Strategic engagement melalui dialog intensif dengan pejabat kunci terutama Kesbangpol Kota

Bandung menjadi pendekatan advokasi yang dipilih SETARA Institute. Dalam proses advokasi, serangkaian diskusi formal dilakukan secara daring melalui kanal komunikasi hingga dialog-dialog secara informal.

Untuk semakin menebalkan persepsi dan sikap toleransi dan inklusif aparat pemerintah kota -- sebagai kunci dari pilar kepemimpinan birokrasi -- dilakukan dengan mendengarkan progres yang dilakukan, sekaligus memberi saran dan masukan dalam upaya peningkatan toleransi.

Selain itu, juga mempertemukan aparaturnya dengan organisasi masyarakat sipil di Bandung.

Advokasi berjalan lebih mudah karena Pemkot Bandung, dalam hal ini Kesbangpol, sangat terbuka terhadap pendekatan yang dilakukan SETARA Institute bersama berbagai elemen masyarakat sipil. Keterbukaan ini mengarah pada progresivitas pemerintah dalam meningkatkan inklusi sosial pada penghayat kepercayaan.

“Kesbangpol berupaya agar suasana kondusif dalam masyarakat terjaga dan berusaha mengimplementasikan *inclusive governance*,” ujar Apep, dalam kegiatan Dialog Online: Menyusun Strategi Advokasi Penyelesaian Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Barat, yang difasilitasi Konsorsium INKLUSI.

Komitmen Apep sebagai perwakilan Pemkot Bandung bukan sekadar janji. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, Pemkot Bandung telah memprakarsai beragam inovasi.

Kerja-kerja advokasi terkait pendekatan pada pemerintah untuk pemenuhan hak-hak penghayat kepercayaan menghasilkan serangkaian kemajuan. Di antaranya, mempertemukan penghayat dengan BUMD untuk memfasilitasi akses pekerjaan bagi penghayat, sumpah jabatan bagi penghayat di sektor formal atau institusi pemerintah, hingga lahirnya Peraturan Daerah No. 5 tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum.

Media

Advokasi juga dilakukan untuk menjangkau berbagai elemen, diantaranya, media.

“Saya dari Bandung Bergerak,” ujar Emi, jurnalis media lokal Bandung, dalam kegiatan pelatihan jurnalisisme inklusif yang diselenggarakan oleh SETARA Institute bersama Konsorsium INKLUSI tahun 2023.

“Sebenarnya baru dua tahun kami hadir untuk memberikan ruang-ruang suara kepada teman-teman minoritas.”

Namun, yang menjadi kesulitan adalah ketika hanya medianya yang menyuarakannya. Tidak banyak media memberikan ruang bersuara pada kelompok minoritas.

Alih-alih bersikap promotif pada pemajuan hak kelompok minoritas, temuan SETARA Institute justru menunjukkan bahwa media massa justru turut membangun pola segregasi dalam konteks komunikasi.

Situasi itu adalah ironi, karena pers adalah syarat mutlak demokrasi. Beranjak pada kesadaran tersebut, pada tahun 2023 dilakukan serangkaian pelatihan jurnalisme inklusif yang menysasar kelompok media dan kelompok minoritas agama/ kepercayaan, termasuk penghayat.

Peningkatan kapasitas individu dalam mengimplementasikan nilai-nilai inklusi melalui produk-produk jurnalisme dapat berkontribusi pada semakin banyaknya media yang mewakili suara kelompok rentan.

Semakin masifnya program kolaborasi berdampak pada semakin banyaknya ruang-ruang pertemuan. Selain itu, juga menguatkan jaringan CSO di tingkat lokal untuk meningkatkan program-program yang promotif pada penguatan inklusi sosial.

Penguatan jaringan CSO di tingkat lokal melalui kolaborasi lintas isu menjadi pendekatan baru dalam upaya penguatan pilar kepemimpinan sosial di Bandung.

Kolaborasi lintas isu ini menjadi semangat baru bagi kelompok marginal, terutama minoritas agama/kepercayaan, disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan minoritas ragam gender/seksual.

Pertemuan dan kolaborasi antar kelompok marginal semakin meningkatkan rasa aman dan nyaman untuk berkolaborasi dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Berbagai kelompok minoritas yang termarginalkan ini bersatu di bawah bendera Koalisi ASPIRASI Jawa Barat.

Pelatihan Advokasi Keberagaman bagi CSO dan Komunitas Lokal di Bandung yang diselenggarakan SETARA Institute tahun 2024 memberi banyak manfaat bagi peserta. Di antaranya, pada Deti, penghayat kepercayaan. Dia mengaku mendapat banyak pengetahuan terkait strategi advokasi agar eksistensi kaum marginal lebih diakui.

Kesadaran menumbuhkan kolaborasi lintas isu itu ditindaklanjuti dengan kolaborasi kampanye digital untuk mengajak khalayak memiliki pemahaman yang terbuka dan inklusif terhadap kelompok minoritas yang selama ini kerap mendapat stigmatisasi.

Perjuangan Belum Berhenti...

Strategic engagement melalui serangkaian diskusi dan pelatihan, baik dengan aparat pemerintah daerah maupun elemen masyarakat sipil yang didukung, salah satunya, oleh Konsorsium INKLUSI, menunjukkan hasil yang signifikan.

Di antaranya, Kota Bandung berhasil berbenah dengan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam peringkat IKT.

Pada tahun 2021, untuk pertama kalinya Kota Bandung berhasil keluar dari 20 peringkat terbawah, bahkan mampu mencapai peringkat 36, dan terus mengalami progresi menjadi peringkat 26 di tahun 2022, hingga peringkat 15 pada tahun 2023.

Keberhasilan ini menjadi sinyal, bahwa pemerintah kota dan masyarakat tengah mengarah pada kondisi yang lebih inklusif dan toleran. Meski demikian, perjuangan masih jauh dari selesai.

Cerita-cerita sukses menginklusi penghayat kepercayaan belum sepenuhnya berhasil.

Penghapusan diskriminasi di lingkungan pendidikan di Bandung Raya menjadi refleksi bersama, bahwa tidak ada kata berhenti dalam melakukan advokasi hak-hak penghayat.

“Kami titip ke SETARA Institute karena masih ada yang *bully* ke siswa penghayat. Kalau di kota Bandung mungkin sudah tidak ada, tetapi di Kabupaten Bandung masih terjadi,” ujar Wanti dalam suatu kesempatan.

Perjuangan bersama untuk menyempurnakan jaminan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan harus terus dilakukan. Namun, di Bandung Raya, kita melihat titik terang pengakuan penuh bagi mereka...

WARUNG SEJAHTERA

SEDIA-
MINYAK
MIE

TELUR
TERIGU

MENTEGA
DETERJEN

PULSA
GORENGAN





Semua Pihak Harus Kami Rangkul

Semua Pihak Harus Kami Rangkul

Leli Qomarulaeli

Perkumpulan Medialink

Salah satu tugas kepolisian sebagai aparat hukum adalah menjamin kebebasan warga dalam beragama dan berkeyakinan. Namun, praktiknya, abdi negara ini sering dianggap bersikap tidak netral dalam menyelesaikan konflik-konflik berbasis agama dan keyakinan.

Keragaman suku, ras, agama, budaya dan sosial sangat memungkinkan munculnya konflik sosial keagamaan di Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat, kesigapan aparat, dan tentu saja regulasi sebagai penjaminnya agar keragaman tersebut dapat dikelola secara baik.

Indonesia juga dikenal sebagai bangsa dengan tingkat kekerasan berbasis agama yang relatif tinggi. Banyak faktor yang melandasi kenapa kekerasan model ini terjadi, di antaranya, karena dimotivasi oleh interpretasi ajaran, teks, atau doktrin agama.

Kepolisian merupakan aparat yang paling akrab dengan tugas-tugas penyelesaian konflik seperti ini, mulai dari mitigasi potensi konflik, mediasi antar pihak yang berkonflik, hingga melakukan *punishment* terhadap para pihak.

Seperti diamanatkan konstitusi, Kepolisian Republik Indonesia memang diberi mandat untuk memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian. Fungsi ini meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam ranah yang paling bawah, tugas-tugas seperti ini dijalankan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, lebih dikenal dengan sebutan Bhabinkamtibmas. Mereka adalah garda terdepan dalam menjalankan fungsi kepolisian dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Di pundak Bhabinkamtibmas, tugas untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelesaikan perselisihan dan konflik sosial keagamaan harus mendapat penyelesaian tahap pertama.

Lantas, bagaimana mereka menjalankan tugasnya di masyarakat? Konflik-konflik apa saja yang banyak mereka tangani? Apa *reward* yang mereka terima dari masyarakat?

“Tugas kami sebagai Bhabinkamtibmas itu tidak gampang” ujar Aipda Setyo Wardoyo, SE.

Petugas Bhabinkamtibmas Kelurahan Jatikramat Polsek Jatiasih Kota Bekasi itu mengatakan, dia bertugas melakukan pendekatan ke masyarakat, bahkan diharuskan mengetahui seluk beluk dan potensi masalah yang kerap muncul di lingkungannya.

Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Menurut Pasal 1 Ayat 4 mengenai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015, tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas adalah

66 **Di pundak Bhabinkamtibmas, tugas untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelesaikan perselisihan dan konflik sosial keagamaan harus mendapat penyelesaian tahap pertama.**



pengemban Polmas yang ada di desa atau kelurahan. Pengemban polmas ini merupakan setiap anggota Polri yang melakukan Polmas di dalam masyarakat atau komunitas.

“Sebagai petugas Bhabinkamtibmas, kami berkewajiban membuat laporan, baik mingguan atau pun bulanan kepada atasan,” tambahnya, ketika ditemui di sela-sela acara lokakarya terkait pencegahan potensi terorisme di Jabodetabek yang diadakan Medialink beberapa waktu silam.

Bagaimana dengan konflik kebebasan beragama dan berkeyakinan di wilayahnya?

Sampai tahun 2017, dalam Indeks Kota Toleran (IKT) yang surveinya dilakukan oleh SETARA Institute, Bekasi masih termasuk salah satu kota dengan toleransi rendah. Namun mulai tahun 2018, Bekasi masuk peringkat enam dari 10 kota dengan skor toleransi tertinggi dari 94 kota yang disurvei. Sejak itu peringkatnya terus meningkat, dan berada pada peringkat 2 IKT 2023.

Tak Sampai ke Akar?

“Kita mengikuti standar operasional yang sudah ditetapkan atasan,” lanjut Setyo Wardoyo.

Menurut dia, kepolisian selalu memiliki modus operandi dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, termasuk di dalamnya konflik kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, Setyo tidak mau merinci standarnya.

Namun, terlepas dari keengganan Setyo Wardoyo memberi penjelasan terkait standar kepolisian dalam penyelesaian konflik keagamaan, faktanya di lapangan upaya itu hampir tak pernah selesai hingga ke akarnya.

“Soal itu saya *no comment* mas, bukan ranah saya. Tugas saya adalah melakukan pendekatan ke masyarakat, melakukan pembinaan, dan tentu bila tidak terjadi konflik itu bonus bagi tugas-tugas saya,” jelasnya dengan diplomatis.

Namun, Setyo Wardoyo mengaku merasa beruntung dapat mengikuti acara workshop yang diadakan atas kerja sama Medialink dengan Polda Metro Jaya. Menurutnya, banyak hal yang bisa dijadikan sebagai informasi dan wawasan bagi dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas di masyarakat.

“Beruntung saya bisa mengikuti acara ini mas. Ini menjadi bekal saya untuk melihat permasalahan di masyarakat secara luas,” ujar Setyo Wardoyo memberi ekspresi positif atas penyelenggaraan acara tersebut.

Hal senada juga diutarakan oleh Budi Wilardjo yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Bagi dia, banyak materi yang dapat dijadikan sebagai bekal acuan dalam melakukan pendekatan di masyarakat.

“Banyak materi terkait terorisme dan radikalisme yang kami dapatkan dalam *workshop*. Tak hanya itu, kami juga mendapatkan materi tentang pentingnya mengenal toleransi dan tindak intoleransi, dan tentu saja bagaimana cara mengendalikan masalah tersebut sehingga kami lebih siap,” tegas Budi.

Bukan hanya Setyo Wardoyo dari Polsek Jatiasih, Kota Bekasi, atau Budi Wilardjo dari Polsek Benda, Kota Tangerang saja yang mendapatkan materi workshop terkait Pencegahan Antisipasi Terorisme dan Radikalisme, serta Infiltrasi Nilai-Nilai Inklusivitas, tetapi juga Bhabinkamtibmas di wilayah lain di Jabodetabek.

Medialink berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya dengan penuh kesadaran melihat perlunya petugas Bhabinkamtibmas dibekali dengan materi terkait tema tersebut. Program ini dijalankan dengan format workshop dan diskusi interaktif dengan audience petugas Bhabinkamtibmas di lingkungan Polda Metro Jaya.

Menurut Dr. Rida Hesti Ratnasari, aktivis perempuan, pengajar, dan Wakil Ketua IV Baznas Kota Depok, materi untuk menumbuhkan nilai-nilai toleransi sangat penting dipahami oleh Bhabinkamtibmas selain materi tentang radikalisme dan terorisme. Materi ini termasuk strategi *soft approach* yang dilakukan petugas kepolisian dengan cara mengunjungi masyarakat, mengedukasi, menjalankan, sekaligus mengawasi pelaksanaannya.

“Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak kepolisian yang perannya langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga penguasaan literasi tentang inklusi dan toleransi menjadi penting, agar dapat memahami masyarakatnya secara paripurna,” ujar Rida, salah satu pemateri lokakarya.

Ada hal menarik dari perjalanan lokakarya di setiap wilayah. Selain sesi peserta mengajukan pertanyaan, pemateri juga mengajukan pertanyaan kepada peserta. Pertanyaan tersebut tidak hanya berkisar di seputar terorisme dan radikalisme, tetapi juga menyangkut konflik keagamaan, seperti pelarangan kegiatan keagamaan atau pelarangan pendirian tempat ibadah.

“Bagaimana kalau masalah-masalah seperti ini muncul di wilayah tugas Anda? Bagaimana cara menyelesaikannya?”

“Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak kepolisian yang perannya langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga penguasaan literasi tentang inklusi dan toleransi menjadi penting, agar dapat memahami masyarakatnya secara paripurna”

- Rida

Tentu dua pertanyaan besar ini mengundang petugas Bhabinkamtibmas mengeksplorasi pengalaman mereka di lapangan. *Based on a true story*, mereka mengungkapkan, tidak mudah menyelesaikan masalah-masalah di lapangan.

Sebagai anggota kepolisian, di satu sisi mereka memiliki tugas untuk melayani dan melindungi hak asasi warga negara tanpa melihat perbedaan status, agama, golongan. Namun, di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada cipta kondisi keamanan untuk kepentingan dan ketertiban bersama.

Aipda Sahru Ramadhan, misalnya, mengakui, dia berpedoman pada standar operasional lapangan, yaitu mempertanyakan izin berkegiatan. Menurut petugas Bhabinkamtibmas di Kota Depok itu, bila kegiatan tak memiliki izin, maka kepolisian harus melakukan tindakan lanjutan sesuai keputusan tersebut.

Namun, ada juga petugas Bhabinkamtibmas yang berpandangan lain. Walau pun kegiatan belum mendapat izin, petugas kepolisian memiliki dua tugas yang secara bersamaan harus dijalankan.

Polisi harus melindungi dan menjaga keamanan mereka yang mengikuti kegiatan, namun, di sisi lain juga harus memberi ruang kepada mereka yang keberatan terhadap kegiatan tersebut.

“Kita harus berada pada posisi tidak memihak karena ada dua kepentingan berbeda, namun tetap harus menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” ujar petugas Bhabinkamtibmas lainnya.

Dengan kata lain, kepolisian harus berperan menjaga keduanya agar berlangsung aman. Polisi boleh melakukan tindakan tegas yang terukur jika ada yang bertindak melebihi batas sehingga membahayakan orang lain. Fakta lapangan tersebut menunjukkan bahwa petugas Bhabinkamtibmas di lapangan harus menjaga keseimbangan antara empati dan *trust*.

“Kita harus berada pada posisi tidak memihak karena ada dua kepentingan berbeda, namun tetap harus menjaga keamanan dan ketertiban bersama”

Sulitnya melaksanakan tugas di tengah konflik kelompok berbeda membuat pihak kepolisian harus jeli.

Yang pasti, mereka harus menjalankan tugasnya berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka dilarang menggunakan kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, apalagi berdasarkan tekanan kelompok tertentu yang tidak mengikat secara hukum.

Dalam posisi di tengah masyarakat yang berkonflik, petugas kepolisian juga dituntut untuk menjadi mediator yang netral dan objektif sehingga semua kepentingan dapat terakomodasi secara penuh tanpa ada tuduhan memihak salah satu kelompok.

Motivasi untuk Perubahan

Apa *lesson learned* yang dapat dipetik dari pelaksanaan program workshop di lingkungan Bhabinkamtibmas se-Polda Metro Jaya terkait isu pencegahan potensi terorisme, radikalisme, dan intoleransi di Jabodetabek?

Harus diakui bahwa ada beberapa hal yang menjadi kelemahan, di antaranya; secara literasi, pemahaman petugas Bhabinkamtibmas se-Polda Metro Jaya belum memiliki pemahaman komprehensif tentang isu intoleransi/inklusivitas yang dapat dijadikan sebagai bekal dan pegangan dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Mereka sering mendengar istilah inklusivitas atau intoleransi, namun, tidak dapat menjelaskan kedua konsep tersebut. Materi yang dapat dijadikan sebagai panduan pun belum ada.

Ini berbeda dengan konsep politik identitas, terorisme, atau radikalisme. Mereka bisa menjelaskan dengan lancar karena sudah ada buku panduan yang dijadikan pegangan dalam tugas sehari-hari.

Kendati demikian, ada pula cerita baik di samping kelemahan tersebut. Motivasi mereka terhadap materi paparan terkait inklusivitas sangat mengesankan. Bahkan, secara sadar mereka akan menjadikan materi *workshop* sebagai bekal dasar pelaksanaan tugas.

Dengarlah cerita Aipda Dadang, petugas Bhabinkamtibmas di Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.

Aipda Dadang mengisahkan bahwa selama ini area tugasnya merupakan wilayah multietnis dan agama, sehingga dibutuhkan pemahaman utuh untuk mengantisipasi potensi konflik di wilayah itu.

“Saya beruntung mengikuti *workshop* ini, karena banyak materi yang saya butuhkan sebagai penunjang tugas-tugas saya di lapangan,” ujarnya.

Aipda Dadang menjadikan materi terkait toleransi dan inklusivitas untuk memperkuat toleransi di wilayah dengan lima rumah ibadah itu. Penguatan ini semakin mencolok ketika ada seleksi pemilihan ketua RW yang kandidatnya berasal dari agama berbeda.

Menurut Dadang, karena kesadaran masyarakat yang tinggi dan kebersamaan yang kuat membuat proses kandidasi tersebut berjalan aman tanpa direcoki oleh isu sentimen agama.

“Saya coba merangkul semua pihak untuk menjalin kekompakan. Intinya, saya ingin wilayah tugas saya aman dan minim konflik,” tambah Dadang.

Cerita menarik juga datang dari Bhabinkamtibmas di wilayah Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Briptu Indah Kinanti.

Menurut Indah, suasana Pondok Cabe Ilir yang dikenal toleran dan guyub memang sudah terbentuk sebelum dia menjadi petugas Bhabinkamtibmas di wilayah tersebut. Kemampuan komunikasi Indah Kinanti yang mumpuni membuat suasana toleransi semakin menguat.

Indah berhasil bersinergi dengan kelompok masyarakat, termasuk wilayah yang mayoritas masyarakatnya anggota *Front Pembela Islam* (FPI).

Kemampuan Indah Kinanti mengimplementasikan *soft strategy* juga diakui oleh Sekretaris Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Lukman Hakim.

“Beliau rutin turun mendatangi rumah-rumah tokoh bahkan rumah warga untuk menjangkau aspirasi mereka. Strategi itu yang membuatnya diterima semua kalangan warga,” ujar Lukman Hakim.

Keberhasilan Briptu Indah Kinanti juga menjadi cerita baik di lingkungan kepolisian. Keberadaan dan kemampuannya mematahkan *stereotype* kuat di lingkungan kepolisian bahwa petugas Bhabinkamtibmas adalah laki-laki.

Meski pun jumlahnya masih sedikit, namun masuknya perempuan ke wilayah *male dominated route* itu menjadi sinyal baik bahwa lingkungan kepolisian cukup sadar terhadap isu *Gender Equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI).

Cerita Aipda Dadang dan Briptu Indah Kinanti hanya sekelumit praktik baik, yang membuat perubahan di kalangan Bhabinkamtibmas.

66

Meski pun jumlahnya masih sedikit, namun masuknya perempuan ke wilayah *male dominated route* itu menjadi sinyal baik bahwa lingkungan kepolisian cukup sadar terhadap isu *Gender Equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI).

88

Cerita lainnya masih banyak. Misalnya, banyaknya petugas Bhabinkamtibmas di lingkungan Polda Metro Jaya yang semakin paham dan peduli terhadap isu inklusi dan toleransi. Mereka juga semakin termotivasi untuk terlibat aktif dalam setiap masalah di lingkungannya, terlebih yang terkait dengan pluralisme agama.

Penguatan Inklusivitas di Kalangan Bhabinkamtibmas

Berdasarkan kegiatan *workshop* bersama Bhabinkamtibmas di lingkungan Polda Metro Jaya, ada beberapa hal yang harus segera dipenuhi untuk menyempurnakan pemahaman terhadap isu-isu inklusi dan toleransi.

Salah satunya adalah pentingnya penerbitan referensi yang membahas tema-tema tersebut. Medialink berinisiatif menerbitkan buku saku sebagai referensi berisi ringkasan informasi penting, panduan praktis, atau catatan yang sering dibutuhkan petugas untuk memahami isu-isu terkait inklusi, toleransi, terorisme, dan radikalisme. Dengan bentuknya yang dibuat kecil dan sederhana sehingga bisa dibawa ketika sedang bertugas atau melakukan kunjungan ke masyarakat.

Buku saku ini berisi tulisan tentang ketiga tema yang materinya merupakan hasil diskusi mitra konsorsium seperti Yayasan SETARA Institute, Yayasan Inklusif, dan Yayasan Maarif. Dari hasil diskusi tersebut, Medialink menyarikannya dalam bentuk tulisan yang mudah dibaca, mudah dicerna, dan disusun dengan bahasa populer.

Tak hanya itu, dalam buku saku tersebut dilengkapi dengan tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang sikap politik dan regulasi pemerintah terhadap ketiga isu itu.

Buku saku itu kemudian didistribusikan kepada petugas Bhabinkamtibmas di lingkungan Polda Metro Jaya, salah satunya di kampung-kampung toleransi yang dibina oleh Bhabinkamtibmas.

“Penerbitan buku saku ini memberi tambahan materi kepada kami untuk memahami inklusivitas dan penerapannya di masyarakat,” ujar Briptu Kinanti.

Apresiasi serupa juga diberikan oleh Aipda Dadang. Dia sudah lama menunggu penerbitan buku saku seperti itu. “Saya memang sering mendengar istilah inklusif, masyarakat inklusif, tapi tidak tahu persis pemaknaannya,” ujarnya.

Upaya memberi pemahaman tentang isu-isu inklusivitas di lingkungan Polda Metro Jaya juga dilakukan melalui beberapa acara diskusi internal yang diselenggarakan di lingkungan Polda Metro Jaya.

“Dalam diskusi ini kita juga menjawab ketertarikan mereka dengan tema-tema seperti hoaks, inklusivitas dalam bermedia sosial, dan lainnya,” tutur Direktur Eksekutif Medialink Ahmad Faisol.

Dia berharap kegiatan-kegiatan yang merupakan bentuk *follow up* dari kegiatan sebelumnya, dapat terwujud di lingkungan kepolisian yang kondusif.

“Dari lingkungan internal inilah kemudian tersebar cerita-cerita baik dan positif ke lingkungan yang mereka bina,” lanjutnya.***



LUVERS

KETIDAKPEKAAN
TERHADAP
EMOSI DAPAT
MENYULUT
KONFLIK.

KASIH TUHAN
TIDAK
MENGENAL
SEKAT

LOVE

TOLERANSI BUKAN
HANYA KATA-KATA
TETAPI
TINDAKAN
NYATA!

5

Komunikasi Tanpa Kekerasan:

Berani Berubah
untuk Hidup
yang Lebih Baik

Komunikasi Tanpa Kekerasan: Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik

Moh. Shofan

Maarif Institute

Pendidikan merupakan karakter suatu bangsa. Semakin baik pendidikan suatu negara, semakin baik pula moral, ekonomi, dan budaya negara tersebut. Pendidikan karakter bersifat luas dalam cakupan dan sulit didefinisikan secara tepat. Tetapi, yang dimaksud dengan pendidikan karakter di sini adalah suatu istilah yang menjelaskan berbagai aspek pengajaran dan pembelajaran bagi perkembangan personal.

Pendidikan karakter meliputi beberapa area, seperti penalaran moral, pembelajaran sosial dan emosional, pendidikan atau kebajikan moral, pendidikan keterampilan hidup, pencegahan kekerasan, dan resolusi konflik.

Semua individu adalah pelaku pendidikan karakter. Dalam lingkungan sekolah, pendidikan karakter harus dimulai dari guru. Guru bukan hanya mengajarkan pelajaran karakter, tetapi juga harus mampu menempa dirinya agar berkarakter.

Pendidikan karakter mengedepankan contoh dan perilaku dibandingkan ilustrasi angka yang mereduksi hakikat karakter itu sendiri. Materi pendidikan karakter dipahami melalui kegiatan belajar-mengajar dalam metode, dan bukan ditagihkan melalui tes. Guru tidak lagi harus duduk di meja sambil membaca buku atau menikmati tontonan presentasi siswa. Guru harus mampu menjadi inspirator setiap siswa dalam belajar. Oleh sebab itu, anggapan bahwa sekolah favorit adalah sekolah dengan kemampuan kognitif tinggi tidak sepenuhnya benar.

Sayangnya, kurikulum pendidikan di Indonesia masih belum menyentuh aspek karakter ini. Kumpulan cerita perubahan dari sejumlah wilayah kota, seperti Malang, Lamongan, Manado, Ambon, NTT, dan Bali, ini memberikan gambaran tentang cerita perubahan. Sebuah pandangan dan tanggapan yang unik dan “apa adanya”, namun mengandung makna penting untuk dikaji.

Sebanyak sembilan guru dan aktivis sosial-keagamaan lintas agama dari sejumlah wilayah tersebut menceritakan kisah inspiratif dan pengalaman mereka selama mengikuti pelatihan LOVE dan NVC (*Nonviolent Communication*) yang diselenggarakan oleh MAARIF Institute dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini.

CINTA adalah sesuatu yang ‘dilakukan’; sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, yang datang dari hati dengan menggunakan proses Komunikasi Tanpa Kekerasan (NVC), untuk belajar cara mengekspresikan diri secara terbuka dan jujur kepada teman, pasangan, atau keluarga, tanpa tujuan lain kecuali untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam diri kita.

BB
CINTA adalah sesuatu yang ‘dilakukan’; sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, yang datang dari hati dengan menggunakan proses Komunikasi Tanpa Kekerasan (NVC) DD

Dalam cerita inspirasi ini, mereka menceritakan kisah kehidupan, lingkungan sekolah, masyarakat, perubahan sosial, dan toleransi umat beragama, seraya menentang segala bentuk penindasan, kekerasan, kesenjangan sosial, dan sikap intoleran. Mereka juga berperan aktif dalam mentransformasikan kesadaran nilai-nilai secara lebih intensif dan masif di masyarakat.

Cerita ini penting untuk didengar sebagai kontribusi dalam melawan sikap intoleransi dan ekstremisme kekerasan, baik di sekolah maupun di masyarakat.

Praktik-praktik baik sebagaimana dalam rangkaian cerita perubahan ini memberikan contoh inspiratif tentang bagaimana mekanisme pencegahan untuk memerangi segala bentuk kekerasan.

Love dan NVC untuk Transformasi Sosial

Para guru dan aktivis lintas agama yang diminta memberikan testimoni mampu menginspirasi murid-muridnya dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, seraya menghargai sesama serta memperlakukan mereka dengan adil dan setara. Begitu pula para aktivis lintas agama, yang selalu mendorong terjalinnya hubungan antar iman dengan melakukan kegiatan dialog lintas iman, kegiatan sosial, serta pertemuan lintas budaya. Semua ini merupakan berkah yang mereka peroleh dari pelatihan LOVE dan NVC.

Menurut mereka, pendekatan LOVE dan NVC lebih memungkinkan terjadinya transformasi sosial.

Hasil temuan di lapangan ini tentu berguna untuk mengukur keberhasilan kegiatan pelatihan tersebut. Sebagian dari mereka juga mengaku bahwa sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada di sekolah, hanya saja diperlukan metode yang tepat agar nilai-nilai tersebut dapat diajarkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selama ini, sebagian guru masih menggunakan metode lama seperti ceramah, sehingga anak cenderung merasa bosan.

Dampak dari LOVE dan NVC menunjukkan bahwa tidak sedikit guru yang menerapkan hening sebagai metode dalam proses pembelajaran. Siswa tidak sekadar belajar materi pelajaran, tetapi juga belajar mengelola emosi dengan baik.

Oleh sebab itu, mengondisikan siswa (apersepsi) dengan hening sebelum menerima materi atau memberikan permainan kepada mereka sangat dibutuhkan. Inti dari hening adalah menghasilkan perasaan positif dan mengintensifkan emosi, membiarkan pikiran dan perasaan positif beresonansi dalam pikiran, serta membangun semangat sepanjang hari.

Untuk melihat sejauh mana efektivitas program yang telah dilakukan MAARIF Institute, hasil pantauan dan evaluasi selama kami melakukan riset dan wawancara dengan sejumlah guru dan aktivis lintas iman di beberapa kota cukup menggembirakan-meskipun ada beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program.

Namun, di atas segala kelemahannya, semangat serta usaha para guru dan aktivis lintas iman dalam melakukan pendidikan perubahan layak mendapat apresiasi tinggi.

Sejumlah kegiatan yang digelar oleh MAARIF Institute merupakan upaya serius untuk mengawal isu-isu yang dapat memecah belah warga. Di Ambon, misalnya, pascakonflik 1999, sudah begitu banyak terjadi perubahan.

Para peserta yang terdiri atas para aktivis, anak-anak muda, guru-guru, dan tokoh lintas agama maupun masyarakat bergiat bersama untuk membangun persaudaraan, menginisiasi kesadaran di antara mereka guna mencegah berulangnya prahara. Para pegiat lintas agama berinisiatif saling mengunjungi acara-acara keagamaan untuk membangun persahabatan di antara mereka.

Pelatihan LOVE dan NVC yang telah dilakukan di sejumlah tempat di Ambon telah membawa dampak yang sangat positif. Hal ini, misalnya, diakui oleh Imel Wee, seorang guru informatika di Ambon. Menurut dia, di kota yang rentan konflik akibat sentimen agama, LOVE memberinya alat untuk membangun masyarakat yang lebih dewasa.

Ia belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang kesadaran kritis dan penghargaan terhadap keberagaman. Imel menerapkan pendekatan LOVE di sekolahnya dengan mengadakan kunjungan ke sekolah Islam dan mendorong siswa untuk berbaaur tanpa memandang agama. Ia juga berusaha menghilangkan kecurigaan antarsiswa dan guru, seperti ketakutan menerima makanan dari agama lain.

“Saya ingin menciptakan lingkungan tanpa sekat,” katanya. Hasilnya, siswa mulai saling menerima, bahkan menghadiri kegiatan ibadah bersama dengan penuh rasa percaya.

“**Saya ingin
menciptakan
lingkungan
tanpa sekat**”

Tantangan muncul dari sikap fanatisme beberapa siswa dan guru. Namun, dengan pendekatan penyadaran yang ia pelajari dari LOVE, Imel berhasil mengubah persepsi mereka. “LOVE adalah proses penyadaran,” ujarnya. Ia berharap pelatihan ini terus diadakan untuk memperkuat hubungan antarmanusia di Ambon.

Menghapus Sekat dan Membuka Ruang Perjumpaan

Betapa pentingnya pelatihan LOVE ini dikemukakan oleh Adlan Ryan Habibie, seorang dosen di IAIN Manado dan ketua organisasi kepemudaan. Dia menemukan alat baru untuk memimpin, yaitu LUVERS (*Loved, Understood, Valued, Respected, Safety*).

Pelatihan NVC pada bulan Oktober 2024, menurut dia, bisa membuka ruang perjumpaan dengan peserta dari berbagai agama dan profesi. “NVC menghapus sekat-sekat yang memisahkan kami,” katanya.

Konsep LUVERS menjadi panduan Adlan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Sebagai pemimpin organisasi, ia mulai memahami karakter anggota timnya dengan lebih baik dan menggunakan LUVERS untuk membangun kebersamaan. “Sebelum pelatihan, organisasi saya penuh dengan keputusan impulsif. Kini, kami lebih bijaksana,” ujarnya. Ia juga menerapkan lima emosi dasar untuk mengelola konflik pribadi, terutama dalam kehidupan rumah tangga, sehingga lebih mudah memahami pasangan dan anak-anaknya.

Di lingkungan multikultural Manado, Adlan menggunakan LUVERS untuk berinteraksi dengan tetangga dan komunitas lintas iman. Ia menyadari bahwa setiap orang ingin dicintai dan dihormati, dan pendekatan ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Meski penerapan NVC membutuhkan waktu, Adlan merasa hidupnya kini lebih terhubung.

“LUVERS mengajarkan saya bahwa tindakan baik akan kembali kepada kita,” katanya. Dia berharap pelatihan serupa terus diadakan untuk memperkuat toleransi di Sulawesi Utara.

Hal yang sama dirasakan oleh Jaja Citrama, seorang aktivis muda Muhammadiyah di Manado. Awalnya, ia melihat pelatihan NVC sebagai kegiatan biasa. Namun, pertemuan dengan peserta dari berbagai agama dan budaya mengubah pandangannya. “NVC membuka ruang dialog kultural,” katanya.

Dia menyadari bahwa prasangka terhadap “yang lain” sering kali menciptakan sikap eksklusif, dan NVC menawarkan solusi melalui komunikasi persuasif. Jaja belajar teknik komunikasi persuasif dari Prof. Muqowim, yang menekankan pentingnya memahami perspektif orang lain, membangun narasi positif, dan menggunakan argumen logis.

Ia menerapkannya pada seorang teman yang memiliki prasangka terhadap penganut agama lain. Dengan pendekatan persuasif, Jaja berhasil membuka pikiran temannya dan membuatnya lebih menghormati perbedaan.

Di tempat kerjanya, sebuah amal usaha Muhammadiyah, Jaja menggunakan komunikasi persuasif untuk mengelola tim yang beragam. Ia mendengarkan dengan empati, memahami kebutuhan masing-masing anggota, dan menciptakan keputusan yang inklusif.

“Komunikasi persuasif menghindarkan kita dari ujaran kebencian,” katanya. Meski prosesnya panjang, Jaja yakin bahwa langkah kecil ini akan menciptakan harmoni dalam masyarakat plural seperti Manado.

Masih di kota yang sama, Nedine Helena merasa hidupnya berubah setelah pelatihan NVC. Sebagai pekerja magang di sebuah LSM, ia sering menghadapi situasi tegang. NVC mengajarkannya untuk tetap tenang, mendengarkan dengan empati, dan menghindari konfrontasi. Saat menjadi narasumber sosialisasi Pilkada 2024, ia menggunakan pendekatan NVC untuk mengelola emosi peserta, sehingga tercipta diskusi yang produktif.

Pelatihan ini juga mengubah sifat Nedine yang awalnya egois dan cuek. Ia mulai melayani orang lain, seperti mencuci piring teman atau membersihkan ruangan, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. “Melayani terasa berat pada awalnya, tetapi kini jadi bagian dari hidup saya,” katanya. Ia juga mendorong teman-temannya untuk berubah, meski menghadapi tantangan dari mereka yang enggan melayani.

Nedine percaya bahwa NVC mengajarkannya melihat manusia sebagai manusia, bukan berdasarkan agama atau budaya. Ia kini hidup lebih rileks dan merasa tugasnya sebagai warga masyarakat adalah melayani tanpa memandang latar belakang. “NVC membuat hidup saya lebih berarti,” ujarnya, berharap pelatihan ini terus dikembangkan.

Di belahan kota lain, Fathur Dopong, seorang guru Agama Islam di SMK Negeri 6 Kupang dan aktivis kepemudaan, juga merasakan perubahan mendalam setelah pelatihan NVC.

Di Nusa Tenggara Timur, keberagaman adalah kenyataan sehari-hari, tetapi konflik sering muncul karena toleransi dipandang hanya sebagai warisan budaya, bukan praktik hidup.

Pelatihan NVC mengajarkan Fathur bahwa inklusivitas adalah pondasi kedamaian yang dibangun dengan cinta. Fathur mulai menerapkan nilai inklusivitas di sekolahnya. Ia mengajak siswa belajar melalui diskusi dan permainan yang menyenangkan, menekankan kesetaraan dan impian dunia yang lebih baik.

“Saya ingin siswa memahami bahwa setiap orang berhak dihormati,” katanya. Dampaknya terasa nyata. Siswa menjadi lebih terbuka, dan warga di lingkungannya mulai saling peduli.

Di luar kelas, sebagai kepala RT, ia membangun hubungan sosial yang lebih erat dengan warga, mengurangi potensi konflik melalui empati. Fathur merasa lebih bahagia dan bersyukur, menyadari bahwa cinta dapat mengurangi kesepian dan kekerasan.

“Inklusivitas bukan hanya teori, tetapi cara hidup yang membawa dampak positif,” ujarnya. Ia berharap nilai-nilai ini terus diajarkan untuk membangun peradaban yang harmonis.

Senada dengan Fathur, Elisabeth Helen Sumarsono, seorang Kristen dari Kupang, merasakan hal yang sama. Ia mengaku seperti mendapat anugerah saat mengikuti pelatihan NVC. Awalnya, ia merasa tidak nyaman berada di antara peserta yang beragam, tetapi fasilitator dengan cerdas menciptakan suasana yang hangat.

Salah satu aktivitas yang membekas adalah ketika ia diminta melakukan kebaikan secara diam-diam untuk peserta lain. “Merancang kebaikan mengubah cara saya melihat dunia,” katanya.

Elisabeth juga terkesan dengan penggunaan kalimat positif untuk menggantikan tepuk tangan. Ia teringat penelitian tentang dampak kata-kata positif, yang memperkuat keyakinannya bahwa bahasa kasih adalah alat universal.

Di akhir pelatihan, ketika peserta saling berbisik tentang harapan baik, Elisabeth merasa pulang dengan hati penuh inspirasi. Kembali ke gerejanya, Elisabeth menerapkan pendekatan NVC di kelas katekisasi. Ia mendorong anak muda Kristen menggunakan kalimat positif dan mengadakan kegiatan "*Sharing is Caring*" untuk menunjukkan empati kepada komunitas lintas agama. "Bahasa kasih menembus sekat perbedaan," katanya.

Kegiatan ini membuat anak muda menyadari bahwa cinta adalah nilai universal yang memperkuat hubungan antarumat di Kupang.

Bergeser ke kota Bali, Rivan Hidayat menemukan perspektif baru melalui pelatihan NVC pada September 2024. Ia belajar bahwa memahami emosi adalah kunci untuk menjadi rasional. Mengutip penelitian Antonio Damasio, ia menyadari bahwa emosi adalah bagian integral dari pengambilan keputusan. "Orang dengan kecerdasan emosional tinggi membuat keputusan yang lebih bijaksana," katanya.

NVC juga mengajarkan Rivan untuk menghindari primordialisme, yang sering dipicu oleh emosi tak terkelola seperti takut atau amarah. Ia mulai memandang orang lain dari kemanusiaannya, bukan identitas kelompok. Di Bali, yang kaya akan keberagaman, keterampilan NVC menjadi alat untuk menjaga harmoni. "Ketidakpekaan terhadap emosi dapat menyulut konflik," ujarnya.

Rivan kini berusaha berkomunikasi dengan kesadaran penuh, mendengarkan dengan tulus, dan merespons dengan empati. Ia percaya bahwa rasionalitas lahir dari pengelolaan emosi yang tepat, menciptakan ruang untuk dialog dan kerja sama. "Kedamaian sejati lahir dari keberanian memahami," katanya, berharap pelatihan NVC terus diadakan di Bali.

Meruntuhkan Tembok Pemisah “Kita” vs “Mereka”

Dampak dari pelatihan LOVE juga dirasakan oleh Pdt. Mahardika, peserta pelatihan asal Lamongan, Jawa Timur. Sebagai pendeta yang telah lama melayani jemaat Kristen, ia merasa tugasnya adalah menjembatani hati umat dengan ajaran kasih Tuhan. Namun, pelatihan LOVE membuka matanya pada makna inklusivitas yang lebih luas. Ia belajar bahwa kasih tidak mengenal batas agama, suku, atau budaya—setiap manusia memiliki kebutuhan universal untuk diterima dan dihargai.

Sesi tentang kebutuhan dasar manusia menjadi titik balik bagi Mahardika. Ia menyadari bahwa gereja sering kali, tanpa disadari, membangun tembok pemisah antara “kita” dan “mereka”. Pelatihan ini mengajarkannya untuk melihat setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang unik, dengan pengalaman dan perspektif yang berharga. “Inklusivitas bukan sekadar konsep,” katanya, “tetapi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.”

Kembali ke gerejanya, Mahardika mulai mengubah pendekatan pastoralnya. Ia mengadakan diskusi lintas iman dan mengundang tokoh agama lain untuk berbagi pengalaman. Ia juga menyambut jemaat baru dengan lebih terbuka, memastikan mereka merasa aman dan dihargai.

Salah satu momen yang membekas adalah ketika ia mengadakan pertemuan dengan pemuka agama Islam setempat. Awalnya, terasa ada ketegangan di udara, tetapi dengan pendekatan dialog yang jujur, mereka menemukan titik temu dalam nilai-nilai kemanusiaan universal.

Tantangan tidak absen. Prasangka dan stereotip di masyarakat kadang menghambat usahanya. Namun, Mahardika terus melangkah, terinspirasi oleh pelatihan LOVE yang mengajarkannya mengikis prasangka melalui komunikasi yang empatik.

Kini ia percaya bahwa gereja harus menjadi rumah bagi semua, bukan hanya untuk satu golongan. “Kasih Tuhan tidak mengenal sekat,” ujarnya, “dan saya dipanggil untuk menghidupi ajaran itu setiap hari.”



Prasangka dan stereotip di masyarakat kadang menghambat usahanya. Namun, Mahardika terus melangkah, terinspirasi oleh pelatihan LOVE yang mengajarkannya mengikis prasangka melalui komunikasi yang empatik.



Dan terakhir, Asroriati, seorang guru Agama Islam di SMA Budha Trimurti Pakisaji, Malang, menemukan makna baru dalam perannya sebagai pendidik. Menurut dia, pelatihan LOVE membawanya ke sebuah ruangan penuh keberagaman-guru, pemuka agama, dan aktivis dari berbagai latar belakang. Awalnya, ia merasa canggung, terbiasa berinteraksi hanya dengan sesama Muslim. Namun, suasana pelatihan yang hangat dan sesi permainan peran mengubah pandangannya.

Dalam salah satu sesi, Asroriati diminta memahami perspektif seorang guru dari agama lain. Ia tersadar bahwa selama ini ia sering melihat perbedaan sebagai batas, bukan jembatan.

“Saya belajar bahwa toleransi bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan nyata,” katanya.

Kembali ke sekolah, ia mulai mengubah cara mengajarnya. Ia memperkenalkan diskusi lintas agama dan mengajak siswa berbagi nilai kebaikan dari ajaran masing-masing. Hasilnya, siswa yang sebelumnya ragu untuk bertanya kini lebih terbuka.

Asroriati juga membangun hubungan lebih erat dengan rekan guru dari latar belakang berbeda. Ia mulai mengajak mereka berdiskusi, berbagi pengalaman, dan bekerja sama dalam proyek sekolah.

Tantangan muncul ketika beberapa orang tua siswa mempertanyakan pendekatannya. “Mengapa seorang guru Islam begitu aktif mempromosikan toleransi di sekolah Buddha?” tanya mereka. Dengan kesabaran, Asroriati menjelaskan bahwa nilai kasih sayang dan perdamaian adalah inti ajaran Islam dan dapat diterapkan di mana saja.

Salah satu momen berharga adalah ketika seorang siswa non-Muslim, Daniel, mendatanginya untuk bertanya tentang Islam. Dengan penuh empati, Asroriati mendengarkan dan menjelaskan tanpa menghakimi. Momen itu memperkuat keyakinannya bahwa toleransi dibangun melalui hati yang terbuka.

Kini, sekolahnya mulai berubah-siswa saling menghormati, dan guru-guru lebih kolaboratif. Asroriati juga aktif di forum pendidikan, berbagi pengalaman untuk menginspirasi pendidik lain.

Demikianlah, cerita perubahan ini menunjukkan bahwa karakter berperan sebagai kemudi dan kekuatan, sehingga untuk membangun karakter, salah satu strateginya adalah melalui jalur pendidikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para guru, strategi pembangunan karakter melalui proses pembelajaran dengan pendekatan LOVE sangatlah efektif. Dengan kata lain, signifikansi perubahan atau dampak yang ditimbulkannya cukup positif.

Semangat perubahan secara eksplisit ditegaskan oleh para guru selama melakukan aktivitas mengajar, pula oleh para aktivis lintas iman dalam kegiatan keagamaan.

Melalui LOVE, para guru dan juga para aktivis lintas iman didorong untuk melihat dampak dari perbuatan mereka masing-masing pada orang lain dan bagaimana mereka bisa membuat sebuah perbedaan.

Cerita-cerita dan berbagai pengalaman inspiratif diharapkan dapat mengubah paradigma pendidikan yang eksklusif menuju paradigma pendidikan yang toleran dan inklusif, yakni dengan menerjemahkan nilai-nilai toleransi, kejujuran, tanggung jawab, serta nilai-nilai positif lainnya kepada siswa dalam mentransformasikan kesadaran nilai secara lebih intensif dan massif.

The Most Significant Change

Evaluasi terhadap keberhasilan pelatihan LOVE dan NVC ini menggunakan model *The Most Significant Change* (MSC). Dengan metode MSC, perubahan paling signifikan dilihat dari lima aspek.

Pertama, adanya kesadaran nilai (*value awareness*) tentang inklusi sosial keagamaan dari setiap aktivitas yang dilakukan peserta, baik secara personal maupun sosial sesuai dengan peran masing-masing.

Kedua, ada tidaknya perubahan antara sebelum mengikuti pelatihan dengan sesudahnya, terutama dalam konteks nilai-nilai inklusi sosial keagamaan. Bagaimana kondisi peserta sebelum pelatihan dan apa yang terjadi setelah pelatihan

Ketiga, perasaan yang dialami ketika peserta pelatihan berhasil menerapkan nilai-nilai inklusi sosial keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara personal maupun institusional. Keempat, keterhubungan (*connectedness*) peserta pelatihan dengan lingkungan sekitar, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun secara luas di masyarakat, baik dalam konteks nyata maupun dunia maya. Apakah peserta semakin terhubung dengan berbagai kalangan tanpa melihat latar belakang mereka atau justru semakin memisahkan diri dari realitas sekitar.

Kelima, kemampuan menjadi agen atau model perubahan dalam penerapan nilai-nilai inklusi sosial keagamaan. Peserta menjadi teladan perubahan dalam nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para peserta pelatihan yang berprofesi sebagai guru dan aktivis lintas iman menuliskan cerita perubahan pasca pelatihan, baik perubahan yang terjadi di wilayah personal, institusi, maupun kebijakan.

Cerita-cerita perubahan tersebut dapat dituangkan dalam sebuah tulisan sekaligus menjadi salah satu wujud bahwa pelatihan ini tidak sia-sia.

Cerita perubahan mereka adalah bukti bahwa langkah kecil yang dilakukan dengan ketulusan dapat menciptakan gelombang besar dalam kehidupan pribadi, komunitas, dan masyarakat luas.

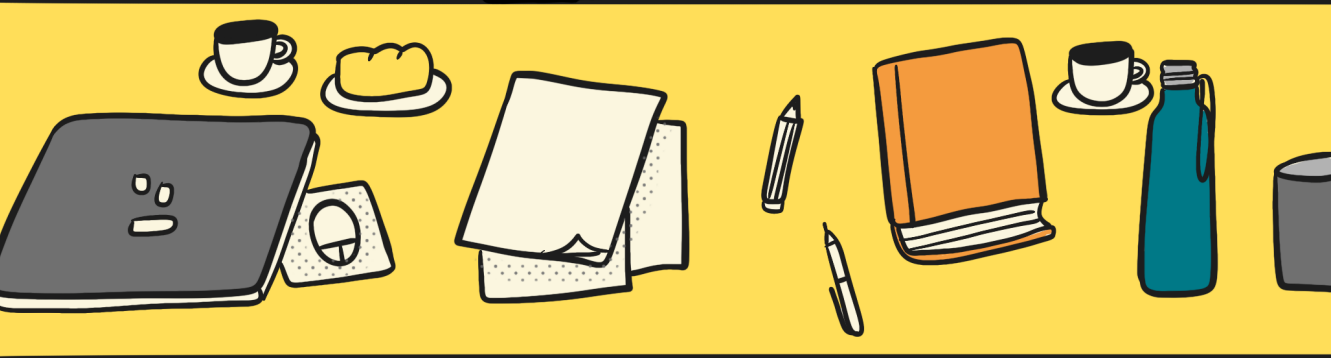
Gelombang Perubahan Kini dan Esok

Kesembilan cerita ini adalah mozaik dari transformasi yang lahir dari pelatihan LOVE dan NVC. Dari Lamongan hingga Bali, para peserta membawa pulang bukan hanya ilmu, tetapi juga semangat untuk berubah dan mengubah. Mereka menghadapi tantangan-prasangka, resistensi, dan kebiasaan lama-tetapi dengan ketulusan dan pendekatan yang dipelajari, mereka berhasil menciptakan perubahan nyata.

Di sekolah, siswa kini lebih terbuka dan saling menghormati. Di gereja, jemaat belajar menerima keberagaman. Di komunitas, warga mulai berbagi cerita dan membangun ikatan. Dalam organisasi, keputusan diambil dengan lebih bijaksana. Perubahan ini mungkin dimulai dari langkah kecil, tetapi dampaknya terasa luas, seperti riak air yang terus meluas di permukaan danau.

Melalui pelatihan ini, MAARIF Institute telah menanam benih inklusivitas dan kasih di hati para peserta. Evaluasi dengan model *The Most Significant Change* (MSC) menunjukkan bahwa perubahan terbesar terjadi dalam kesadaran nilai, transformasi sebelum dan sesudah pelatihan, perasaan positif saat menerapkan nilai, keterhubungan dengan lingkungan, dan kemampuan menjadi agen perubahan. Cerita-cerita ini adalah bukti bahwa pendidikan karakter, ketika dihidupi dengan tindakan nyata, dapat mengubah paradigma dari eksklusif menuju inklusif.

Ke depan, para peserta berharap pelatihan LOVE dan NVC terus diadakan, diperluas, dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Mereka percaya bahwa nilai-nilai kasih, empati, dan toleransi adalah fondasi untuk membangun masyarakat yang harmonis.***





Membangun Jalinan Inklusi Sosial

Membangun Jaringan Inklusi Sosial

Sopi Sadili

Fatayat NU Jawa Barat

Saya ingin menjadi seperti kaca mata, karena perempuan akan mendidik generasi mendatang. Perempuan bisa menjadi "light of house", cahaya di rumahnya, dengan membuka perspektif lain....

Namanya Adinda. Perempuan berusia 23 tahun ini adalah alumni salah satu Perguruan Tinggi Negeri Bandung. Ia aktif menjadi relawan pada Komunitas Roemah Planet. Adinda adalah anak kedua dari empat bersaudara. Di dalam keluarga, dia dipanggil Ceuceu, panggilan khas masyarakat Sunda pada kakak perempuan tertua.

Sejak SMP, Adinda tumbuh dalam keragaman Islam. Saat orang tuanya merantau di ibu kota, dia dikirim ke pesantren modern di kota kelahirannya. Dia belajar di bawah bimbingan tiga kiai dari aliran berbeda: NU, Muhammadiyah, dan Persis. Masing-masing kiai memiliki peran yang berbeda— yang satu mengurus pendidikan di asrama, sementara yang lain mengelola pendidikan formal dan keuangan.

Ketiganya berjalan beriringan dalam koridornya masing-masing. Menyenangkan, sekaligus pada beberapa kesempatan, menyisakan perasaan bimbang. Apalagi sebagai santri, harus senantiasa *sami'ina wa atho'na*. Mendengar dan taat; patuh tanpa mengkritisi.

Misalnya, pada satu malam Jumat, Kiai NU, seperti biasa meminta santri melaksanakan kegiatan rutin, Yasinan. Pada saat bersamaan, Kiai Muhammadiyah meminta santrinya untuk belajar mandiri, mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Adinda dan teman-temannya dihadapkan pada pilihan, harus patuh kepada siapa, meskipun pada akhirnya, semua santri tergesa-gesa berganti pakaian mengaji dan berkumpul di surau untuk kembali bersama-sama melantunkan surah Yasin.

Kehidupan di pesantren yang padat kegiatan mengharuskan Adinda terpisah dari orang tua dan menuntutnya untuk belajar beradaptasi. Semua dilaluinya dengan tabah, meskipun sesekali rasa kangen itu menyeruak di kala lelah. Untungnya, seolah mengerti kerinduan sang anak, Bapak dan Mama sesekali *sambang* sekaligus membawakannya makanan.

“Aku inget banget, Mama bawain aku lontong sayur. Tapi, karena sibuk, aku gak sempet makan. Begitu mau istirahat, baru inget kalo ada lontong sayur. Karena dari pagi, jadinya agak basi. Tapi karena itu pemberian Mama, aku makan semuanya sampai habis,” tutur Adinda, saat menceritakan kenangannya selama mondok.

Dari Muslim Biasa, Menjadi Seorang Salafi

Meskipun mengenyam pendidikan pesantren, kedua orang tua Adinda bukanlah sosok muslim yang sangat religius. Saat itu, sang ibu juga belum mengenakan jilbab. Barangkali, perubahan itu hadir tanpa disadari, selama masa pendidikan di pesantren. Ketika lulus dan pulang ke rumah, dia kehilangan figur kedua orang tuanya, bukan karena mereka tidak lagi ada di rumah, tetapi karena mereka berubah menjadi sosok asing, yang sangat berbeda dengan citra Mama sebelumnya.

Sang ibu, meminta anak-anaknya memanggil Umi pada dirinya dan Abi pada ayahnya. Gaya berpakaianya serba tertutup. Orang bilang, gaya *Syar'i* dengan cadar yang menutup separuh wajah. Hanya matanya yang nampak teguh di jalan *hijrah*. Orang tuanya berpindah dari muslim pada umumnya menjadi Salafi.

Foto-foto kenangan masa kecil tak lagi menggantung di dinding. Alunan musik favorit juga tidak lagi terdengar. Rumah masa kecil yang hangat menjadi lebih sepi dan senyap. Tetangga sekitar rumah juga turut menjaga jarak. Bahkan demi bertemu teman-teman di komunitasnya, Umi rela menempuh jarak puluhan kilometer jauhnya.

Merantau ke Bandung

Tak lama, setelah kepulangannya dari pondok pesantren, Adinda kembali berpisah dari keluarga untuk melanjutkan kuliah di Bandung. Di kota ini, ia bertemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang.

Kendati demikian, gaya berpakaianya saat masih berstatus mahasiswa baru, membuat teman-teman di kelas merasa sungkan dan menjaga jarak. Seorang teman dengan jujur menyampaikan pendapatnya. Menyadari ini, ia lantas menyesuaikan. Dia menanggalkan gamis dengan jilbab lebarinya dan berpakaian sebagaimana teman-teman perempuan di kelas.

Bandung menyuguhkan petualangan yang menyenangkan dan gairah keilmuan. Ia bertemu dengan banyak buku dan guru, dan menyelami kehidupan sebagai aktivis kampus dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan diskusi. Merekalah yang kemudian mengenalkannya pada pemahaman tentang keragaman dan moderasi beragama.

Sejujurnya, Adinda tidak mempermasalahkan pilihan ibunya. Tetapi, semakin dia tenggelam dalam diskusi-diskusi tentang agama dan keyakinan, semakin dia ingin berbagi pengalaman ini dengan Umi. Namun, upaya demi upaya yang dilakukannya terasa sisa-sisa karena sang ibu terus menolak.

Sang ibu menjulukinya ‘gurat batu’ karena Adinda yang selalu punya pemikiran sendiri di antara anak-anak ibunya. “Aku punya kebebasan memilih mau jadi seperti apa, karena Umi paham, di antara anak-anaknya aku tuh selalu punya pemikiran sendiri.”

Kata Umi, “*Ceuceu mah sok mawa karep sorangan.*”³

Di tahun ke empat, kesibukan perkuliahan berganti proposal penelitian. Kesibukan organisasi, menjadi kegiatan penyuluhan bersama dosen-dosen di kampus: kegiatan yang mengangkat isu pencegahan radikalisme dan ekstremisme di sekolah-sekolah SMA.

Dosennyalah yang membawa Adinda ke dalam kegiatan-kegiatan program INKLUSI yang diselenggarakan Fatayat NU Jawa Barat: Kelas Journalistik Inklusif *Offline*, Diskusi Islam Damai, dan Sekolah Inklusi Perempuan.

Program INKLUSI digagas oleh INFID, suatu NGO yang bergerak di bidang HAM dan Demokrasi, yang berperan aktif mengadvokasi pencegahan dan penanganan ekstremisme berkekerasan, intoleransi dan radikalisme, serta menggaungkan nilai-nilai kebebasan berkeyakinan dan beragama di masyarakat. Melalui *Kick-Off* Program INKLUSI yang diluncurkan pada tanggal 26 Januari 2023, INFID secara resmi memulai kerja-kerja tersebut bersama anggota konsorsium yang terdiri dari Maarif Institute, Perkumpulan Media Link, Fatayat NU Jawa Barat, Fatayat NU Jawa Timur, SETARA Institute, Unika Soegijapranata dan Yayasan Inklusif.

Program INKLUSI dirancang untuk menggemakan substansi dari Perpres No 7 tahun 2021 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE). Program ini secara spesifik menasar terciptanya *good governance* di media massa, BUMN, sekolah menengah, organisasi perempuan, dan media sosial untuk meningkatkan inklusivitas dan resiliensi sosial.

³ Bahasa Sunda, artinya, Ceuceu suka melakukan apa yang ingin dilakukannya sendiri.

Laporan Indeks Kinerja HAM Indonesia yang disusun SETARA Institute dan INFID tahun 2022 menunjukkan, aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapatkan skor 3,7 dari 7. Skor ini tergolong rendah dan menunjukkan adanya masalah dalam praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat.

Berbagi Cerita di Sekolah Inklusi Perempuan

“**Sekolah Inklusi Perempuan menjadi ruang jumpa dengan empat sahabatnya kini: Lasmi, Tanti, Dini, dan Rifa.**”



Program Sekolah Inklusi Perempuan yang digelar kemudian menjadi ruang jumpa dengan empat sahabatnya kini: Lasmi, Tanti, Dini, dan Rifa.

Lasmi adalah penganut Sunda Wiwitan yang pernah mengalami diskriminasi karena keyakinannya. Beruntung bagi Lasmi, *Pupuhu*⁴ di komunitas senantiasa menguatkan dan mendorongnya untuk terus mengenyam pendidikan tinggi. Pun, dengan Tanti, yang saat duduk di bangku Sekolah Dasar pernah mengalami *bullying* atas keyakinan yang dianutnya juga.

Di sisi lain, ada Rifa. Dia adalah peserta dengan penampilan paling *nyentrik* di kelas. Rifa punya pengalaman serupa dalam soal agama dan keyakinan. Sama seperti Adinda, dia sebelumnya adalah gadis agamis dengan pakaian serba *Syar'i*. Hingga sebuah pengalaman traumatis dialaminya, yang mendorongnya menanggalkan segala aksesoris keagamaan. Perubahan drastis membuat keluarganya yang konservatif terkejut. Rifa dianggap kerasukan jin dan perlu *di-ruqyah*.

Dia berkisah, “Saya *inget* banget, keluarga saya membawa saya ke pesantren di Jawa Tengah dengan dalih pengajian. Ternyata mereka mau melakukan *ruqyah* dengan cara disembur air garam. Waktu disembur saya *diem* aja, karena kalau marah nanti disangka beneran ada setannya.

⁴ Pemimpin komunitas/tetua

Gak cukup sekali, mereka *ruqyah* saya lagi ketika pulang. Kali ini badan saya disiram semuanya. Mereka bilang, setan yang ada dalam diri saya terlalu kuat. Di lain waktu, saya diajak ke pengajian. Di pengajian itu akhwat-ikhwan dipisah. Saya *liat* orang sampai cium kaki ustadznya. Lalu, ketika hening, saya bicara agak lantang, kalian tuh disini buat Allah atau apa.”

Sebagai penganut Syiah, Dini juga sering mengalami tindakan intoleransi terhadap komunitasnya. Bisa dibilang, Dini tumbuh dengan menyaksikan banyak kepahitan atas iman yang diyakininya.

“Aku inget waktu kecil pas lagi sekolah, tiba-tiba ada truk polisi. Kami nanya ‘Pak, ada apa bapak ke sini?’, Pak Polisinya jawab, ‘Kami juga *gak tau*, kami disuruh ke sini. Memang di sini ada apa?’. polisi dan satpol juga merasa aneh ditugaskan ke sekolah, tempat belajar.”

Barangkali, cerita-cerita inilah yang kemudian menjadi benang penghubung Adinda dengan keempat sahabatnya. Karena mengalami tantangan yang sama dalam beragama atau berkeyakinan, maka terjalinlah empati dan rasa ingin saling melindungi. Meskipun Sekolah Inklusi Perempuan saat itu didominasi oleh peserta perempuan yang sudah berumah tangga, namun anak-anak muda itu tidak kehilangan suaranya. Kehadiran mereka justru menjadi oase. Kisah mereka memberi warna tersendiri dan menjadi bahan refleksi bagi peserta lainnya.

Selama tiga hari, mereka terus bersama-sama. Mereka duduk bersebelahan dan istirahat pun berdampingan. Di hari terakhir, Dini bahkan mendapat kejutan kue ulang tahun di lobi hotel. Selebrasi yang semakin mempererat jalinan persahabatan menjadi tanda bahwa perjalanan kelima sahabat ini baru saja resmi dimulai. Di kemudian hari, kelimanya terus bertukar cerita dan informasi melalui media sosial. Sesekali juga menghadiri kegiatan bersama.

Menemukan Ruang untuk Umi

Tanti dan Lasmi, dua sahabat di Sekolah Inklusi Perempuan memiliki latar belakang yang sama, mereka bekerja di bidang kesehatan. Pada awal tahun 2025, Lasmi menyampaikan kabar gembira pada Adinda. “Tanti bilang ada Program Penyuluhan kanker,” ujar Adinda.

Dengan penuh semangat, Adinda bergegas menanyakan hal itu kepada Tanti. Rupanya benar, Perusahaan tempat Tanti bekerja sedang mengadakan program penyuluhan. Ketiganya kemudian berencana menyelenggarakan kegiatan di tiga kota, yakni Karawang, Bandung, dan Garut.

Adinda kemudian menawarkan program penyuluhan itu kepada ibunya. Umi, yang selama ini cenderung menutup diri dari interaksi dengan



Umi, yang selama ini cenderung menutup diri dari interaksi dengan tetangga, mendengarkan dengan seksama. Tanpa diduga, tawaran itu disambut antusias.



tetangga, mendengarkan dengan seksama. Tanpa diduga, tawaran itu disambut antusias. Umi tak hanya setuju untuk menghadiri penyuluhan, tetapi juga berinisiatif menyediakan tempat pertemuan dan menyiapkan camilan untuk tetangga.

Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menutup diri, Umi membuka rumahnya lebar-lebar; rumah belajar sederhana dan selama ini hanya diisi oleh anak-anak dari Salafi.

Meskipun perasaan penuh harapan mengalir dalam diri Adinda, namun ada sedikit kekecewaan yang menyusup ketika penyuluhan berlangsung. Tim dari institusi Tanti ternyata tak hanya membagikan informasi, tetapi juga mempromosikan produk pada akhir acara. Maka, rencana awal untuk mengadakan kegiatan di tiga kota hanya terlaksana di Karawang saja.

Namun, pengalaman ini memberi pelajaran berharga bagi Adinda dan teman-temannya. Mereka menyadari bahwa isu kesehatan yang bersifat umum dan mendesak bisa menjadi jembatan untuk menjangkau komunitas yang selama ini tertutup. Satu langkah kecil ini, meski tidak sempurna, menjadi bagian penting dari perjalanan panjang menuju inklusi sosial yang lebih luas.

Namun, semua upaya itu tak mungkin dilakukan sendiri. Diperlukan waktu lama, ketekunan dan keselarasan bergerak dari berbagai pihak. Ikhtiar bersama melalui program INKLUSI yang menciptakan ruang jumpa bagi mereka yang berbeda agama dan berkeyakinan merupakan langkah penting. Berbagai kegiatan dalam program itu dimaksudkan untuk membuka wawasan dan menguatkan kesadaran sehingga melahirkan inisiator-inisiator dalam jalinan kebaikan. Dari satu orang menjadi lima orang, terus menyebar sehingga menjadi utuh menyeluruh.



Semua upaya itu tak mungkin dilakukan sendiri. Diperlukan waktu lama, ketekunan dan keselarasan bergerak dari berbagai pihak. Ikhtiar bersama melalui program INKLUSI yang menciptakan ruang jumpa bagi mereka yang berbeda agama dan berkeyakinan merupakan langkah penting.



Bila hari itu tiba, masyarakat telah hidup rukun, saling memahami dan menghormati dengan ketulusan, sehingga tertutuplah ruang untuk penghakiman dan kepentingan politik kekuasaan.

Memang jalan masih panjang, tetapi setiap langkah adalah kemenangan...***

TRAINING OF TRAINER
Sekolah Inklusi Perempuan
MERAWAT KEBERAGAMAN
MENUJU MASYARAKAT
FATAYAT NU JAWA

LOVE FOR ALL
HATRED FOR
NONE





Inklusi di Jalan *Waqf:*

Pengalaman
Amatul Shafi

Inklusi di Jalan Waqf :

Pengalaman Amatul Shafi

Sopi Sadili

Fatayat NU Jawa Barat

“Saya memilih baju, seperti hadits Islam yang mengiaskan perempuan sebagai baju yang bisa melindungi, menghangatkan dan merepresentasikan identitas kita...,” ungkap Shafi ketika menjawab pertanyaan fasilitator tentang representasi dirinya jika diibaratkan sebagai benda.

Amatul Shafi (33), lahir dalam keluarga Ahmadi. Kakeknya adalah tokoh Ahmadi di Sukabumi. Meskipun tidak mengemban tugas sebagai *mubaligh*, sang kakek gemar menelaah ajaran Ahmadiyah dan menuangkannya melalui tulisan. Hasil pemikiran-pemikiran ini disusun menjadi buku. Meskipun tidak diterbitkan, buku-buku ini diwariskan kakek kepada anak-anaknya. Barangkali, sebagai pedoman iman bagi generasi mendatang.

Salah satu yang mewarisi buku-buku ini adalah Ayah Shafi. Putra ke-11 dari 14 bersaudara itu adalah karyawan swasta di Riau. Sembari bekerja, ia aktif melakukan *tabligh* dengan membuka cabang baru dan mendirikan masjid bagi komunitas Ahmadi.

Kegemarannya berdakwah ini menyita banyak waktu sang Ayah, termasuk waktu bersama keluarga kecilnya. Sosok yang ceriwis dalam dakwahnya, justru berbanding terbalik di mata anak-anaknya. Ayahnya pendiam, tetapi bersemangat bila bercerita tentang ajaran-ajaran Ahmadi kepada putri bungsunya, Shafi.

Berbeda dengan ayah, sang ibu yang berasal dari Deleng Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, lahir sebagai penganut kepercayaan lokal *Pamena* dari masyarakat suku Karo. Saat dakwah Kristen dan Islam masuk ke desa, kedua orang tua sang ibu memutuskan memeluk Islam.

Namun, belum sempat mempelajari bagaimana sejatinya menjadi seorang muslim, ibu harus meninggalkan kampung halaman, merantau ke Jakarta dan melanjutkan sekolah. Dalam proses pencariannya di kota metropolitan itu, dia pergi ke rumah-rumah ibadah agama lain. Untungnya, ibu bertemu teman yang mau mengajarkan tata cara beribadah Islam.

Saat masih di ibu kota, kedua orangtua sang ibu meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi pukulan berat baginya. Kehilangan orangtua, artinya kehilangan pijakan dan sumber dana. Dia merasa kehidupannya kian berat dan menghimpit. *Engkau di mana, Tuhan?*

Sang ibu bercerita, saat itu ia menenggelamkan wajahnya dalam bantal untuk meredam suara jeritan. Kerasnya hidup membuat batinnya lelah. Kendati demikian, ia tidak menyerah. Dia tetap bekerja keras sebagai perawat dan menambah penghasilan melalui layanan *homecare*.

Kakek adalah salah satu pasien yang dirawat ibu. Melalui kakeklah, ibu menemukan iman dalam Ahmadiyah. Pertemuan dengan kakek juga yang mengantarnya bertemu ayah, putra dari kakek, yang menjadi jodohnya. Dari pernikahan mereka, kakek memiliki tiga cucu. Shafi adalah anak ketiga, satu-satunya perempuan dan putri yang diwakafkan ayah kepada Ahmadi; waqf yang diikrarkan ayah kepada *hudhur*, saat putrinya masih di dalam kandungan.

Hudhur adalah sebutan untuk pemimpin Jemaat Ahmadiyah dunia. Sejak tahun 2003, pucuk kepemimpinan dijabat oleh Yang Mulia (Aba) Hadhurat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih V yang berkedudukan di London.

Anak yang Diwakafkan Ayah

Program wakaf yang dikenal dengan nama *waqf-e-Nau*, dimulai pada tahun 1987, setelah kelahiran kedua kakak laki-lakinya.

Ingatlah saat istri Imran berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada-Mu, agar (janin) yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdikan kepada-Mu. Maka terimalah nazar itu dariku; Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Doa Nabi Imran – dalam QS. Al-Imran, ayat 35, untuk Maryam yang masih berada di dalam kandungan menjadi latar belakang hadirnya program wakaf ini.

Sebagaimana Imran, sang ayah bernazar, jika istrinya mengandung lagi ia akan mewakafkan anak tersebut. Melalui *waqf*, orang tua mempersembahkan putra-putri mereka untuk mengabdikan hidupnya bagi penyebaran agama dan jemaat. Dengan demikian, setiap keputusan mengenai kehidupan anak akan dikembalikan kepada *hudhur* sebagai imam dalam jemaat. Nama Amatul Shafi pun merupakan pemberian dari *hudhur*, menandai komitmen dan dedikasi yang telah ditetapkan sejak awal.

Meskipun telah mewakafkan kepada jemaat, tidak lantas membuat orangtua lepas tangan. Justru dalam ikatan *waqf* ini, orangtua perlu memenuhi kewajiban untuk mempersiapkan putra-putrinya agar menjadi pribadi yang berkualitas, taat dan cerdas.

Mewakafkan diri bukan berarti kehilangan hak sebagai manusia, karena saat anak-anak ini memasuki usia 15 tahun, mereka diberikan kebebasan untuk memilih; berhenti atau melanjutkan pengabdianya.

Melanjutkan, artinya, kepentingan jemaat di atas keinginan diri sendiri. *Waqf e-Nau* menjadi *Waqf Zindiqi*, wakaf seumur hidup. Barangkali, karena Ayah dan cerita-ceritanya, telah menumbuhkan cinta kasih kepada *Hudhur* dan Jemaat, hingga pada saatnya, Shafi memilih untuk berkhidmat pada Ahmadiyah sebagai jalan hidupnya, sebagai *way of life*.

Melalui pengabdian ini, ia mengenal *hudhur* yang menuntunnya menemukan wujud cinta kepada Tuhan. Perjalanan sebagai anak *waqf* memberinya kebermaknaan dalam hidup. *Waqf as a reason to live*, yang menjadi alasannya memilih profesi dokter, sebagaimana anjuran dari *hudhur*.

Shafi kecil memiliki kehidupan nomaden yang unik. Ia telah menjelajah banyak tempat. Dari Jawa Barat, Riau, hingga Sumatera Utara. Kehidupan nomaden berjalan normal, kecuali sosok Ayah yang sibuk berdakwah sehingga menyisakan sedikit perasaan *fatherless*.

Saat SMP, ia bersekolah di salah satu lembaga pendidikan Islam Bekasi. Teman dan guru di sekolah tahu bahwa ia adalah seorang Ahmadiyah. Setiap hari Jumat, Shafi juga akan meminta izin untuk melaksanakan shalat Jumat. Izin diberikan dan tidak ada yang memperlmasalahkannya, sampai suatu waktu sekolah mengundang ustadz untuk memberikan ceramah di acara Peringatan Hari Besar Islam (PBHI).

Ceramah ustadz membahas sisi negatif dari ajaran Ahmadi. Isi ceramahnya cenderung memprovokasi. Esoknya, Shafi dipanggil kepala sekolah. Rupanya Kepala Sekolah menanyakan kembali apa yang disampaikan ustadz kepada Shafi. Setelahnya, semua kembali seperti biasa. Kehidupan sekolah yang cemerlang. Karena Shafi termasuk murid berprestasi. Kehidupan masa remajanya diisi dengan belajar seperti anak-anak pada umumnya.

Seingatnya, hanya satu kali ia mengalami kejadian tidak menyenangkan, yakni ketika menjadi panitia remaja pada kegiatan pertemuan tahunan Jemaat Ahmadiyah atau Jalsah Salanah, di Parung tahun 2005. Momentum istimewa yang dinantikan hari itu berakhir menjadi pesta yang sepi.

Penyerangan yang dilakukan sekelompok orang membatasi aktivitas jemaat, tetapi tidak lantas menghentikan prosesi ibadah yang tetap berlangsung khidmat. Dia hanya menyadari, ada yang berbeda.

Sekolah Inklusi Perempuan

Pengalaman tentang Parung ini, dia ceritakan juga dalam forum Sekolah Inklusi Perempuan. Forum yang dihadiri 30 perempuan itu berlangsung tiga hari di Fave Hotel Hyper Square, Bandung. Mereka yang datang adalah perwakilan dari komunitasnya masing-masing untuk belajar memahami perspektif GEDSI dan Inklusi. Shafi menjadi satu-satunya peserta yang mewakili Lajnah Imaillah, komunitas perempuan Ahmadiyah.

Mendengar ceritanya tentang Parung, Hanifah, fasilitator trainer Sekolah Inklusi Perempuan terkesan dengan pengalamannya. “Pernah saya mendampingi suatu kelompok keagamaan mengunjungi Markas Ahmadiyah di Parung.”

Mereka semangat sekali saat masuk waktu salat Zuhur, karena katanya Ahmadiyah kalau salat tidak pakai baju. Namun, saat shaf berbaris mereka bingung dan bertanya “Loh, mana orang Ahmadiyahnya,” kenang Hanifah.

“Ya itu orang Ahmadiyahnya yang sedang salat berbaris pakai baju,” jawab Hanifah yang sudah familiar dengan Ahmadiyah.

Menurut Hanifah, memang masih banyak masyarakat percaya buta pada berita keliru tentang Ahmadiyah yang disebarkan pemuka agamanya tanpa melakukan tabayyun. Hal tersebut diamini oleh Shafi.

Ahmadiphobia, barangkali istilah ini tepat untuk menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat terhadap komunitasnya, seolah komunitas ini sama berbahayanya dengan teroris dan radikal. *Ahmadiphobia* juga menjadi alasan kenapa beberapa jemaat memilih menyembunyikan identitasnya, bahkan menanggalkan iman sebagai Ahmadi.

66

Menurut Hanifah, memang masih banyak masyarakat percaya buta pada berita keliru tentang Ahmadiyah yang disebarakan pemuka agamanya tanpa melakukan tabayyun. ۞۞

“Beberapa keluarga yang kukenal meninggalkan Ahmadi demi nafkah dan karir. Ketika mereka berhasil menempati posisi strategis di pemerintahan, mereka khawatir identitas sebagai Ahmadi membuatnya kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan,” ujar Shafi.

Peraturan pemerintah yang mendiskreditkan komunitas dan stigma negatif yang menyebar di masyarakat meninggalkan jejak traumatis bagi jemaat. Mereka yang tidak mampu bertahan dalam iman, memilih melepaskan.

Baginya, itu pilihan hidup setiap orang dan tidak ada yang dapat menghentikannya, termasuk komunitas. Menghadapi diskriminasi eksternal dan kekecewaan karena ekspektasi terhadap oknum internal, membuat Shafi semakin menyelami esensi dari ajaran Ahmadiyah. Anjuran yang senantiasa dibawa *hudhur* dalam khutbah-khutbahnya adalah senantiasa menjadi pribadi yang penuh cinta kasih.

Love for All, Hatred for None, menjadi spirit dakwah Shafi.

Syiar Inklusi di Komunitas

Selepas kegiatan, Shafi berinisiatif menuliskan pengalamannya dalam Sekolah Inklusi Perempuan di Warta Ahmadiyah, media online milik Ahmadiyah yang menghimpun informasi seputar Ahmadiyah di Indonesia. Penulisan ini berkaitan juga dengan tugas yang diembannya, sebagai anggota bidang literasi yang bertanggung jawab menghidupkan literasi di komunitas.

Tulisannya mendapat respon dari salah satu seniornya di Lajnah Imaillah. Banyak pertanyaan ditujukan kepadanya, seperti, “apa itu GEDSI?”

Waduuuh! Menjelaskan GEDSI tentu tidak semudah menjelaskan resep makanan. Perlu waktu yang tidak sebentar.

Untuk menjawab pertanyaan itu, dia membawa perspektif GEDSI dan Inklusi yang dipelajarinya dalam kegiatan Muawanah —pertemuan rutin kajian umum bagi anggota Lajnah Imaillah. Satu kali pertemuan ini tentu tidak cukup menuntaskan jawaban, tetapi barangkali memang harus perlahan dan bertahap sehingga menjadi nilai yang utuh dalam diri setiap anggota jemaat. Beberapa jemaat bahkan menemuinya selesai kajian, untuk kembali memperdalam pemahamannya, khususnya mengenai perbedaan antara gender dan jenis kelamin biologis.

Pada malam *Ta'lim Tarbiyat* Remaja, dia juga mencoba memberikan pemahaman ini melalui diskusi GEDSI dan Cyber Bullying pada Perempuan. Kegiatan *ta'lim* dikemas menyesuaikan kebutuhan remaja dan kondisi masa kini. Mereka diajak memahami bagaimana kesetaraan gender, bentuk kekerasan berbasis online dan cara untuk menghadapinya.

Bagi Shafi, Sekolah Inklusi Perempuan yang diselenggarakan Fatayat NU Jawa Barat bukan hanya merupakan kegiatan alih ilmu pengetahuan. GEDSI dan Inklusi yang dipelajari selama tiga hari, adalah prinsip dasar yang perlu dimiliki komunitasnya dan komunitas perempuan lainnya.

Dia dan teman-teman perempuannya di Lajnah Imaillah juga menghadapi tantangan serupa. Stigma terhadap perempuan merupakan tantangan dalam upaya mewujudkan nilai-nilai GEDSI dan Inklusi di lingkungan Ahmadiyah. Salah satunya dalam pembangunan Masjid Ahmadiyah. Meskipun ingin mewujudkan masjid yang ramah bagi difabel, namun kewenangan pembangunan masjid masih sepenuhnya dipegang oleh laki-laki.***





Perjumpaan di Manado:

Sebuah Refleksi

Perjumpaan di Manado : Sebuah Refleksi

Adrianus Bintang Hanto Nugroho

Universitas Katolik Soegiyapranata Semarang

Dalam benak banyak orang, Manado adalah kota multiagama yang toleran. Ketika terjadi banyak kekacauan dan silang-sengketa keagamaan di Jawa, orang berpaling ke ibukota Sulawesi Utara itu untuk mencari inspirasi tentang keteduhan, keramah-tamahan, dan penerimaan bagi mereka yang dianggap 'liyan'

Malam, pertengahan Mei 2023.

Aroma khas yang merebak saat hujan pertama turun segera menyambut begitu kami menginjakkan kaki di Bandara Sam Ratulangi. Angin dingin menyusup dari rumahnya di gugusan pulau-pulau Nusa Utara, mencari jalan untuk berhembus masuk melalui lorong bandara menyapu tubuh di tempat pengambilan bagasi.

Di sekeliling kami yang hanya mengenakan kaos tipis, orang-orang memakai jaket cukup tebal, seolah mereka bukanlah orang asing dan telah mengenal lama sambutan hangat semacam itu. Selidik punya selidik, benar saja, ternyata mereka adalah penduduk Sulawesi Utara yang pulang dari bekerja di tanah-tanah yang jauh.

Binar mata mereka seakan mengatakan, beberapa saat lagi mereka akan berada di tengah kehangatan keluarga, baku tukar cerita dan *baku sedu* dengan segelas teh hangat dan sepiring pisang goreng colodabu-dabu di atas meja.

Alangkah bahagianya....

Setelah setengah jam menunggu akhirnya kami mendapatkan semua barang bawaan kami. Dengan gontai kami berjalan keluar gedung bandara. Taksi yang sudah dipesan telah menunggu di ujung lokasi penjemputan. Sesudah membuka pintu mobil, kami langsung menghempaskan tubuh lelah kami ke kursi mobil yang dingin. Hujan lebat bulan Mei mengiringi perjalanan kami dari bandara menuju pusat Kota Manado.

Perjalanan panjang, dimulai dari menyusur tol trans Jawa dari Semarang menuju Surabaya, dilanjutkan dengan penerbangan 4,5 jam membelah langit Sulawesi, membuat tubuh terasa lantak. Kami tidak sabar untuk segera tiba di penginapan.

Laju taksi melambat saat mendekati perempatan yang cukup ramai. Terbiasa dengan atmosfer keceriaan a la Manado, sopir kami rupanya tak tahan dengan situasi hening yang dibawa oleh orang-orang dari seberang lautan ini.

“Sudah seminggu ini Manado hujan setiap malam. Agak susah dapat penumpang, masih untung malam ini ada bapak dan ibu. Rombongan dari mana ini, Pak,” tanyanya membuka pembicaraan sambil menoleh ke arah Pak Ridwan yang duduk di kursi depan.

“Dari Semarang, Pak. Besok mau ada kegiatan di Manado,” balas profesor bidang sistem informasi itu sambil tersenyum tipis.

Suasana hening kembali setelah perbincangan singkat itu hingga mobil hampir memasuki kawasan pusat kota.

“Bapak, ibu, tidak ingin makan malam? Ini ada nasi kuning enak di depan.”

Mobil menepi di bahu jalan dan sejurus kemudian saya menemani Bu Tere memesan beberapa bungkus nasi kuning di sebuah warung makan yang katanya terkenal di wilayah Manado karena rasanya yang tiada banding itu. Nasi kuning dengan lauk ikan Cakalang itu dibungkus dengan semacam daun seperti janur sehingga bentuknya sangat estetik. Unik sekali.

“Dibungkus daun lontar itu, Bu. Kata orang sini namanya *woka*. Biar hangatnya masih terasa kalau dimakan di rumah nanti. Rasanya juga bisa lebih enak dibandingkan dibungkus dengan kertas coklat biasa,” jelas sopir yang menangkap kekaguman para penumpangnya terhadap bungkus nasi kuning yang tak biasa itu.

Namanya Rahman. Sopir taksi itu berusia sekitar pertengahan 40-an. Dari namanya jelas afiliasi keagamaannya. “*Kita* asli Manado, tapi orang tua dari Kotamobagu. Agak jauh dari sini,” ungkapnya, sambil menjelaskan asal keluarganya.

Lalu, dia bercerita tentang kerukunan antar umat beragama di Manado setelah tahu kami datang ke kotanya untuk melakukan diskusi dan penelitian tentang hubungan lintas agama. Ketika tahu kami bekerja di sebuah universitas Kristen di Jawa, dia pamerkan kepada kami gereja-gereja besar di sepanjang jalan yang kami lewati. “Kalau ini namanya gereja katedral, kalau *nda* salah yang paling besar di Manado.”

Lahir dan besar di Sulawesi Utara, dia sungguh menyelami dan mengalami denyut nadi kehidupan warga di Bumi Nyiur Melambai itu.



Meski berbeda agama tapi torang samua basudara, bahasa Indonesianya itu semua orang bersaudara. Sudah seharusnya baku sayang



– Seorang Supir Taksi di Manado

“Meski berbeda agama tapi *torang samua basudara*, bahasa Indonesianya itu semua orang bersaudara. Sudah seharusnya *baku sayang*,” pungkasnya menyudahi pembicaraan karena akhirnya taksi telah sampai di penginapan yang terletak persis di muka Pantai Boulevard yang tersohor itu.

Luka Sejarah

Rabu pagi, 17 Mei 2023.

Taksi yang kami tumpangi berjalan pelan menuju Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Sulawesi Utara di Kawasan Tikala, di jantung Kota Manado. Dengan bantuan seorang kolega staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, di sanalah kami mengadakan diskusi kelompok terarah bersama para undangan dari berbagai organisasi dan komunitas keagamaan di Manado.

Begitu tiba di lokasi, kami berkoordinasi dengan teman-teman panitia lokal untuk memasang *backdrop banner* dan menata kursi secara melingkar. Formasi semacam ini memang sengaja dipilih agar diskusi berjalan dua arah di antara para peserta dengan moderator sebagai pengatur lalu lintas dialog.

Kendati gerimis mengguyur, para peserta tampak bersemangat memenuhi undangan panitia sehingga semua kursi terisi. Afiliasi keagamaan dan organisasi para peserta begitu beragam, terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok keagamaan: Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, juga gereja-gereja dan lembaga pendidikan Kristen, organisasi profesional, lembaga adat, dan yang paling menarik adalah perwakilan dari komunitas pemeluk agama Yahudi dan agama-agama leluhur Sulawesi Utara.

Suasana pagi itu terasa menjanjikan, dan kami optimis, diskusi akan memberi banyak informasi dan masukan tentang hubungan antar umat beragama di Manado.

Diskusi dimulai dengan perkenalan para peserta. Keragaman latar belakang agama dan etnis mereka sungguh menakjubkan. Saya membayangkan betapa berwarnanya dinamika kehidupan orang-orang di Sulawesi Utara ini.

Bila Natal tiba, jalanan akan dipenuhi dengan salib-salib besar di depan lorong-lorong pemukiman, orang-orang pergi ke gereja dan sepulang gereja, tetangga muslim mereka datang beranjangsana. Makanan terbaik disajikan, minuman dikeluarkan untuk menambah kehangatan.

Begitu juga saat Idul Fitri datang, hiasan lampion berbentuk ketupat dipasang di sudut-sudut jalan, setelah menerangi malam-malam bulan Ramadhan. Di ujung rangkaian hari penuh berkah itu umat Muslim menunaikan Shalat Ied. Sekembalinya ke rumah, tetangga Kristiani mereka telah menunggu. Tua-muda semua berkumpul makan bersama. Tawa ceria anak-anak terdengar di seluruh ruang rumah.

Sempurna.

Akan tetapi, bayangan kesempurnaan relasi antar agama di Sulawesi Utara itu perlahan pupus. Pengalaman sehari-hari para peserta, memori mereka, mungkin juga luka batin, tersimpan dalam ingatan, terendap di dalam perasaan selama sekian waktu, lalu ditumpahkan dalam diskusi itu.

Pagi yang diterpa angin dingin itu sedikit demi sedikit memunculkan ketegangan.



Bayangan kesempurnaan relasi antar agama di Sulawesi Utara itu perlahan pupus. Pengalaman sehari-hari para peserta, memori mereka, mungkin juga luka batin, tersimpan dalam ingatan, terendap di dalam perasaan selama sekian waktu, lalu ditumpahkan dalam diskusi itu.



“Bapak jangan kaget, memang begini kalau *torang* ngobrol. Semua bisa bicara dengan bebas,” ungkap Flora Kalalo, koordinator panitia lokal sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, ketika mengamati perubahan di wajah kami saat mendengar cerita para peserta.

Para peserta membuka diskusi dengan berbagai cerita klise tentang toleransi dan keberagaman agama dan etnis di Sulawesi Utara, tentang beberapa tahun terakhir Kota Manado dan beberapa wilayah lain di Sulawesi Utara bertengger dalam jajaran 10 besar kota paling toleran di Indonesia, seolah-olah relasi di antara mereka terbangun tanpa cacat⁵.

⁵ Setidaknya sejak 2016, Kota Manado selalu masuk ke dalam sepuluh besar kota paling toleran yang ada di Indonesia dalam Indeks Kota Toleran versi SETARA Institute. Sedang kota-kota lain di Provinsi Sulawesi Utara seperti Kota Kotamobagu dan Kota Tomohon pernah masuk dalam jajaran 10 besar kota paling toleran selama beberapa tahun. Sumber: <https://SETARA-institute.org/wp-content/uploads/2024/10/Laporan-IKT-2023.pdf>

Ishak Pulukadang, seorang sesepuh masyarakat Jawa-Tondano sekaligus anggota dewan pakar organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah bercerita panjang lebar tentang Pancasila dan praktik-praktik kerukunan sehari-hari di antara umat Kristiani dan Muslim di Sulawesi Utara. Dia berasal dari Tondano, tempat di mana sebuah komunitas keturunan campuran Jawa dan Minahasa muncul dan berkembang pada 1800-an⁶.

Komunitas yang disebut sebagai Jawa-Tondano itu telah dianggap dan menganggap diri sebagai bagian dari komunitas masyarakat tempatan di Sulawesi Utara. Beberapa peserta lain, kemudian, menambahkan cerita-cerita yang serupa tentang kerukunan antar umat beragama di Kota Manado dan berbagai daerah lain di Sulawesi Utara.

Namun, setelah pembicaraan lapis permukaan relasi antar komunitas agama-agama yang berbeda itu, muncullah cerita-cerita yang lebih mendalam, tersembunyi dari narasi khalayak tentang keseharian orang-orang yang berbeda agama.

Sofyan Yosadi, seorang advokat sekaligus tokoh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Provinsi Sulawesi Utara yang juga merupakan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bercerita tentang kerusuhan bernuansa rasial yang menyasar komunitas Tionghoa pada 1970⁷.

⁶ Komunitas masyarakat Jawa-Tondano bermula dari ditangkapnya Kyai Modjo, seorang tangan kanan Pangeran Dipanegara sekaligus tokoh kunci dalam Perang Jawa, pada 1928. Ia dan pengikutnya lalu diasingkan oleh Belanda ke tanah Minahasa tepatnya di pinggir Danau Tondano. Di tempat yang baru itu para pengikutnya menikahi perempuan-perempuan Minahasa setempat. Keturunan dari para pengikut Kyai Modjo dengan isteri-istri Minahasa mereka itulah yang kelak dikenal sebagai orang Jawa-Tondano. Sumber:

<https://www.anthropology.id/kampung-jawa-tondano-di-sulawesi-utara/>

<https://tirto.id/dari-pengikut-kyai-mojolahir-lah-kampung-muslim-jawa-tondano-ck6T>

⁷ Sote, tanggal 14 Maret 1970, sebuah klenteng bernama Ban Hing Kiong dibakar oleh massa perusuh. Peristiwa itu terjadi akibat candaan seorang pemilik toko pada dua pelanggannya yang ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap agama para pelanggan. Tak lama, massa yang berasal dari Kampung Arab mulai bergerak menuju Kampung Cina dan melakukan perusakan terhadap sejumlah toko, rumah, dan bangunan tempat ibadah. Peristiwa itu terus dikenang sebagai Tragedi 14 Maret 1970. Sumber:

<https://www.tionghoa.info/sejarah-kampung-cina-di-manado-sulawesi-utara-bagian-ii/>

Menurut dia, meski menyakitkan namun peristiwa itu justru menjadi titik penting yang konstruktif bagi hubungan antara masyarakat Tionghoa di Manado dan Sulawesi Utara dengan masyarakat Minahasa, Sangir, Talaud, Mongondow, Gorontalo, dan masyarakat tempatan lainnya,

“Tapi yang terpenting sekarang situasinya sudah sama sekali berbeda. Sekarang terbukti Manado memiliki walikota beretnis Tionghoa sekaligus umat Konghucu. Ini kan luar biasa,” ujarnya, menutup uraiannya dengan kacamata yang positif.

Meski begitu, cerita-cerita lain tentang situasi yang konfliktual tak berhenti diungkapkan oleh peserta lain. Seorang peserta dari perwakilan organisasi adat bercerita tentang penolakan pendirian sebuah masjid di Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung pada 2015 dan di bekas tapak Kampung Texas Kota Manado pada 2016.

Dari peserta lain juga muncul sahuman tentang penolakan pendirian rumah ibadah Islam pada dua tempat lainnya di Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara serta rumah ibadah Kristen di Bolaang Mongondow. Cerita-cerita ini diamini oleh Sofyan Yosadi yang turut membantu penyelesaian sengketa-sengketa itu dalam kapasitasnya sebagai pengacara publik sekaligus pengurus FKUB Sulawesi Utara.

Menurut dia, meskipun Bumi Nyiur Melambai dikenal oleh masyarakat nasional sebagai tempat yang toleran, namun, dalam kenyataannya tetap ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa relasi antar agama di situ masih harus diperkuat.

“Tugas dari para pemuka agama adalah membina jemaatnya agar hidup rukun dengan umat beragama lainnya,” sambung Sofyan.

Perspektif lain diberikan oleh seorang peserta perwakilan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Manado yang menilai bahwa meski secara umum relasi antara umat Kristiani dan Muslim sudah baik, namun situasi politik di Jawa dapat mempengaruhi perkembangan situasi di Sulawesi Utara.

“Persoalan pengadilan Ahok diterima secara berbeda di sini dan berpengaruh pada kami,” ujarnya dengan *volume* suara yang rendah kepada saya di tengah paparan peserta lain.

Selain itu, muncul juga suara dari komunitas penghayat kepercayaan. Seperti halnya di tempat-tempat lain di Indonesia, secara statistik warga penghayat kepercayaan merupakan kelompok mikrominoritas di Sulawesi Utara. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, persentase warga penghayat kepercayaan pada tahun 2023 hanyalah sebesar 0,05% dari sekitar 2,7 juta jiwa populasi Sulawesi Utara⁸.

Iswan Sual, seorang pemimpin agama leluhur dalam organisasi Lalang Rondor Malesung (Laroma), mula-mula mengatakan bahwa komunitasnya dapat hidup berdampingan dengan umat beragama lainnya, terutama dengan umat Kristen.

Malesung, Agama Tua

Namun, kemudian dia bercerita tentang banyaknya kesalahpahaman dialamatkan pada komunitasnya, terutama terkait siapa yang disembah oleh para penganut agama Malesung, tata cara peribadatan dan mengapa mereka tidak beragama sama seperti orang kebanyakan saja.

Pertanyaan-pertanyaan yang serupa juga nampaknya didapatkan oleh para penganut agama leluhur lain di Sulawesi Utara seperti cerita yang dia dapatkan dari rekan-rekannya di Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Sulawesi Utara.

Tindakan diskriminatif terhadap penganut agama-agama leluhur di Indonesia juga dialami oleh penganut agama Malesung. Kesalahpahaman terhadap agama tua itu perlahan berubah menjadi kebencian yang diungkapkan melalui pernyataan-pernyataan bernada melecehkan dan menyesatkan, termasuk keengganan pemerintah lokal mengurus keperluan administrasi mereka.

⁸ <https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzMyZlI=/persentase-jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut.html>

Lalang Rondor Malesung, yang berarti ‘jalan kebenaran’ atau ‘jalan yang lurus’, adalah sebuah organisasi yang menghimpun para penganut agama Malesung di Tanah Minahasa. Secara formal-administratif, organisasi ini didirikan pada tahun 2016 dan mendapatkan pengakuan negara pada 2017 melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 97/2016⁹.

Malesung merupakan agama leluhur orang Minahasa di Sulawesi Utara. Sistem keyakinan itu mempercayai Apo’ Si Nimema’ En Tana’ Wo Lawa’ sebagai Tuhan Pencipta Bumi dan Langit yang menuturkan jalan kebajikan kepada leluhur orang-orang Minahasa yaitu Dotu Lumimuut dan Dotu Toar. Keyakinan leluhur ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya selama beratus tahun¹⁰.

Secara statistik, penganut Malesung merupakan kelompok keagamaan mikrominoritas di Sulawesi Utara. Penganutnya meyakini, manusia hendaknya hidup dalam sebuah relasi yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan makhluk ciptaan lainnya. Agama Malesung, oleh karenanya, menitikberatkan ajarannya pada dua hal yang utama; harmoni dan keseimbangan¹¹.

Sistem keyakinan agama leluhur Minahasa ini juga berbeda dari sistem keyakinan dua agama Abrahamik yang mendominasi sistem sosial dan budaya di Sulawesi Utara, yaitu Kristen dan Islam. Itu sebabnya membuat komunitas penganut agama Malesung ini tidak percaya diri dalam mengekspresikan keyakinannya di muka umum.

“Kami dulu beribadah di dalam hutan, jauh dari pemukiman,” tutur Iswan Sual dalam sebuah perbincangan di luar acara diskusi.

⁹ Pesik, K.M. (2023). Rekognisi Penganut Kepercayaan Lalang Rondor Malesung dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(2), Hal. 116-124.

¹⁰ <https://icrs.ugm.ac.id/2023/09/11/indigenous-religions-amid-diversity-stories-from-lalang-rondor-malesung-minahasa/>

¹¹ <https://www.icrs.or.id/news/indigenous-religions-amid-diversity-stories-from-lalang-rondor-malesung-minahasa>

Namun, sejak Laroma diakui secara hukum oleh negara pada 2017, perlahan mereka berani untuk menunjukkan identitasnya di depan muka umum, seperti mulai melakukan kegiatan ibadah di dalam pemukiman.

Kegiatan ibadah ini kadang juga direkam untuk kemudian diunggah di dalam platform media digital mereka. Menurut Iswan, hal ini sebagai upaya untuk memupus kesalahpahaman orang banyak tentang Laroma serta juga untuk memupuk kepercayaan diri para penganut agama Malesung.

Meskipun sejak 2017 Laroma telah diakui, namun hal itu tidak membuat masyarakat menerima eksistensi mereka dengan tangan dan hati yang terbuka. Komunitas itu seringkali masih menerima berbagai tuduhan, termasuk pelecehan dari masyarakat, selain tuduhan ‘sesat’ dan ‘penyembah setan’.¹²

Puncak dari diskriminasi adalah ketika tuduhan berubah menjadi tindakan main hakim sendiri berupa perusakan terhadap *wale paliusan* atau rumah yang difungsikan sebagai tempat berkumpul dan beribadah komunitas Laroma di Desa Tondei Dua, Minahasa Selatan.¹³

Perusakan itu terjadi sebanyak dua kali secara berurutan, yaitu pada 21 dan 22 Juni 2022. Perusaknya adalah anggota masyarakat sekitar yang terprovokasi oleh segelintir rohaniawan lokal.¹⁴

Meski perusak *wale paliusan* dikenakan hukuman kurungan selama delapan bulan¹⁵, namun sebetulnya peristiwa ini menjadi tanda adanya kesalahpahaman yang dibiarkan, bahkan ketidakpedulian yang akut, yang tersembunyi jauh di bawah permukaan struktur masyarakat Indonesia yang beragam.

¹² <https://SETARA-institute.org/perusakan-wale-paliusan-milik-penghayat-laroma-oleh-oknum-rohaniawan-ungkap-permasalahan-serius-stigma-terhadap-penghayat/>

¹³ https://manado.tribunnews.com/2022/07/15/mengenal-laroma-aliran-kepercayaan-dari-minahasa-sulawesi-utara?page=all#goog_rewarded

¹⁴ <https://SETARA-institute.org/perusakan-wale-paliusan-milik-penghayat-laroma-oleh-oknum-rohaniawan-ungkap-permasalahan-serius-stigma-terhadap-penghayat/>

¹⁵ <https://palakat.id/pelaku-perusakan-wale-paliusan-laroma-divonis-delapan-bulan-penjara/>

Mengungkap Yang Tersirat

Jarum jam mendekati pukul 12 siang. Tidak terasa kami telah mendengar cerita yang membuka mata selama lebih 2,5 jam. Berbagai kisah yang dituturkan secara langsung oleh mereka yang terlibat dalam praktik keseharian relasi antar umat beragama itu membuat Bumi Nyiur Melambai tampak lebih realitis, khususnya bagi saya.

Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sebelum saya menginjakkan kaki di sana, saya merasa telah mengenal tanah itu dengan baik; setidaknya lewat berbagai bacaan akademik di jurnal-jurnal ilmiah dan angka-angka yang saya dapatkan dari laporan-laporan tentang Sulawesi Utara. Sebagian besar dari tulisan dan deretan angka itu membuat Sulawesi Utara seperti utopia di mana lantunan adzan dan lonceng gereja, juga bau dupa yang mengalir dari klenteng-klenteng umat Konfusius menjadi penanda relasi antar umat beragama yang terjalin sempurna.

Namun, kenyataan hidup tidaklah seideal seperti dituliskan para cerdas pandai di buku dan artikel ilmiah. Kendati buku dan jurnal ditulis sebagai cara untuk mengungkapkan gagasan secara ilmiah tentang bagaimana kehidupan berjalan, tetapi sejatinya dunia nyata memiliki rumusnya sendiri. Hidup tidak bisa ditebak dan tidak sederhana, sehingga terlalu rumit untuk dirangkum dalam deretan angka-angka.

Pada awal abad ke-16, Thomas More seorang hakim di Britania Raya, yang kelak dihormati sebagai orang kudus dalam tradisi Gereja Katolik, menulis sebuah buku yang bercerita tentang 'utopia', sebuah lokasi nun jauh di seberang lautan yang berisi orang-orang yang hidup dalam situasi yang ideal.

Mungkin saja imaji tentang utopia itu ia ciptakan sebagai kritik sosial sekaligus sebetuk pelarian, setidaknya di dalam kepala, atas situasi Eropa saat itu yang dianggapnya sebagai sebuah distopia atau dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

Mendengar berbagai kisah yang terungkap dalam diskusi di hari Rabu pagi itu, membuat saya tersadar, bahwa gambaran tentang Sulawesi Utara yang damai dan setara, di mana semua orang bebas melakukan ritual ibadahnya adalah cara saya merespon berbagai peristiwa tidak mengenakan yang menimpa teman-teman dari komunitas keagamaan mikrominoritas di berbagai tempat di Indonesia.

Perjumpaan di Manado pagi itu sungguh menjadi bahan refleksi penting bagi saya.

Alih-alih memalingkan wajah dari distopia yang nyata dan mengangankan sebuah utopia yang kapan dan entah ada di mana, lebih baik mulai melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendorong terbentuknya suatu situasi seperti yang didaraskan dalam doa ‘Bapa Kami’: meskipun kita ada ‘di atas bumi’ namun kita merasa ‘seperti di dalam surga’.



Saya tersadar, bahwa gambaran tentang Sulawesi Utara yang damai dan setara, di mana semua orang bebas melakukan ritual ibadahnya adalah cara saya merespon berbagai peristiwa tidak mengenakan yang menimpa teman-teman dari komunitas keagamaan mikrominoritas di berbagai tempat di Indonesia.



Merajut Asa

Semarang, 27 November 2024. Sekitar pukul 10.00 WIB, beberapa orang telah berkumpul untuk sekali lagi bersama-sama menggali cerita-cerita tentang pengalaman perjumpaan sehari-hari dengan orang yang berbeda agama untuk kemudian dituliskan dalam sebuah karangan pendek.

Setelah sekian lama tidak bertemu, pagi itu saya bertemu kembali dengan Iswan yang kali ini datang ke Semarang. Di sela-sela kegiatan tukar pengalaman dan praktik menulis, dia bercerita tentang situasi di Sulawesi Utara yang telah membaik.

Penerimaan terhadap para penganut agama leluhur dinilainya mulai menunjukkan kemajuan, mungkin sebagai berkat terselubung dari peristiwa pahit perusakan *wale paliusan* dua tahun sebelumnya.

Dia bercerita bahwa Laroma diundang untuk mengikuti kegiatan Natalan bersama. Acara itu dihadiri oleh tokoh lintas agama di Tondano. Tondano adalah sebuah kota di pedalaman Sulawesi Utara yang sangat beragama. Di sana terdapat berbagai komunitas keagamaan, termasuk kelompok mikrominoritas seperti komunitas Baha'i dan Yahudi. Saat makan siang, Iswan juga bercerita tentang aktivitasnya dalam dialog antar agama di Tondano dan sekitarnya, "Termasuk mengunjungi sinagoga komunitas Yahudi," ungkapnya.

Kegiatan menulis bersama selama tiga hari itu diikuti oleh beberapa peserta yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan agama yang beragam. Selain Iswan Sual, seorang Minahasa yang menganut agama Malesung, hadir pula Frans Go dan Ida Bagus Subrahmaniam dari Denpasar.

Meskipun berasal dari Bali, namun, keduanya memiliki afiliasi keagamaan yang berbeda. Frans adalah keturunan Tionghoa dari Flores yang beragama Konghucu dan sudah puluhan tahun bermukim di Denpasar, sedangkan Gus Bram adalah orang Bali yang bekerja sebagai dosen teologi Hindu di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa di Kota Denpasar.

Dua peserta lain datang dari Depok, yaitu Abdul Hakim, seorang guru di SMP Lazuardi Al Falah, dan Cutra Sari yang bekerja sebagai penyuluh agama Islam di kantor wilayah Kementerian Agama Kota Depok. Selain kelima peserta tersebut terdapat pula dua peserta terakhir lainnya yaitu Maemunah Pelupessy, seorang aktivis perempuan dari Institut Tifa Damai Maluku di Ambon, dan Soesiana, tokoh agama Baha'i di Jawa Timur.

Keragaman latar belakang para peserta itu, menurut Iswan Sual, semakin menumbuhkan keinginannya untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan dialog lintas iman. Ketika makan malam sepulang dari jalan-jalan menikmati sore di Kota Lama Semarang, Iswan nampak terlibat perbincangan yang

seru bersama dengan Frans dan Soesiana, sementara saya menyimak sambil sesekali menyeruput teh hangat di atas meja.

Mereka bercerita tentang pengalaman dalam berelasi dengan orang-orang yang berbeda agama dalam konteks budaya di wilayah tempat tinggal masing-masing. Kendati beberapa cerita yang terlontar berisi kepedihan, namun senyum dan tawa tak pernah lepas dari bibir mereka.

Mungkin pengalaman tidak menyenangkan, yang terjadi berulang-ulang, menempa diri dan hati, bisa membuat mereka semakin tegar, sekaligus halus dan penuh pengampunan. Atau, justru sebaliknya, membuat perasaan menjadi kebal sehingga mudah bagi mereka bercerita pengalaman pahit sambil tersenyum, seolah kemalangan yang menimpa komunitas mereka tak ubahnya seperti komedi kehidupan belaka.

Entahlah, yang jelas pertemuan itu terasa sangat mengesankan. Selama beberapa bulan, saya bersama beberapa kolega pergi ke kota-kota yang dulu hanya kami ketahui dari lembaran peta di buku atlas. Datang sebagai orang asing yang ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana, saya justru menemukan kepingan-kepingan pelajaran hidup yang berharga melalui berbagai penuturan dari orang-orang yang ingin kisahnya didengarkan.

Mungkin itulah maksud Semesta memberi kita dua mata dan dua telinga agar lebih memperhatikan dan mendengarkan orang-orang di sekitar kita.

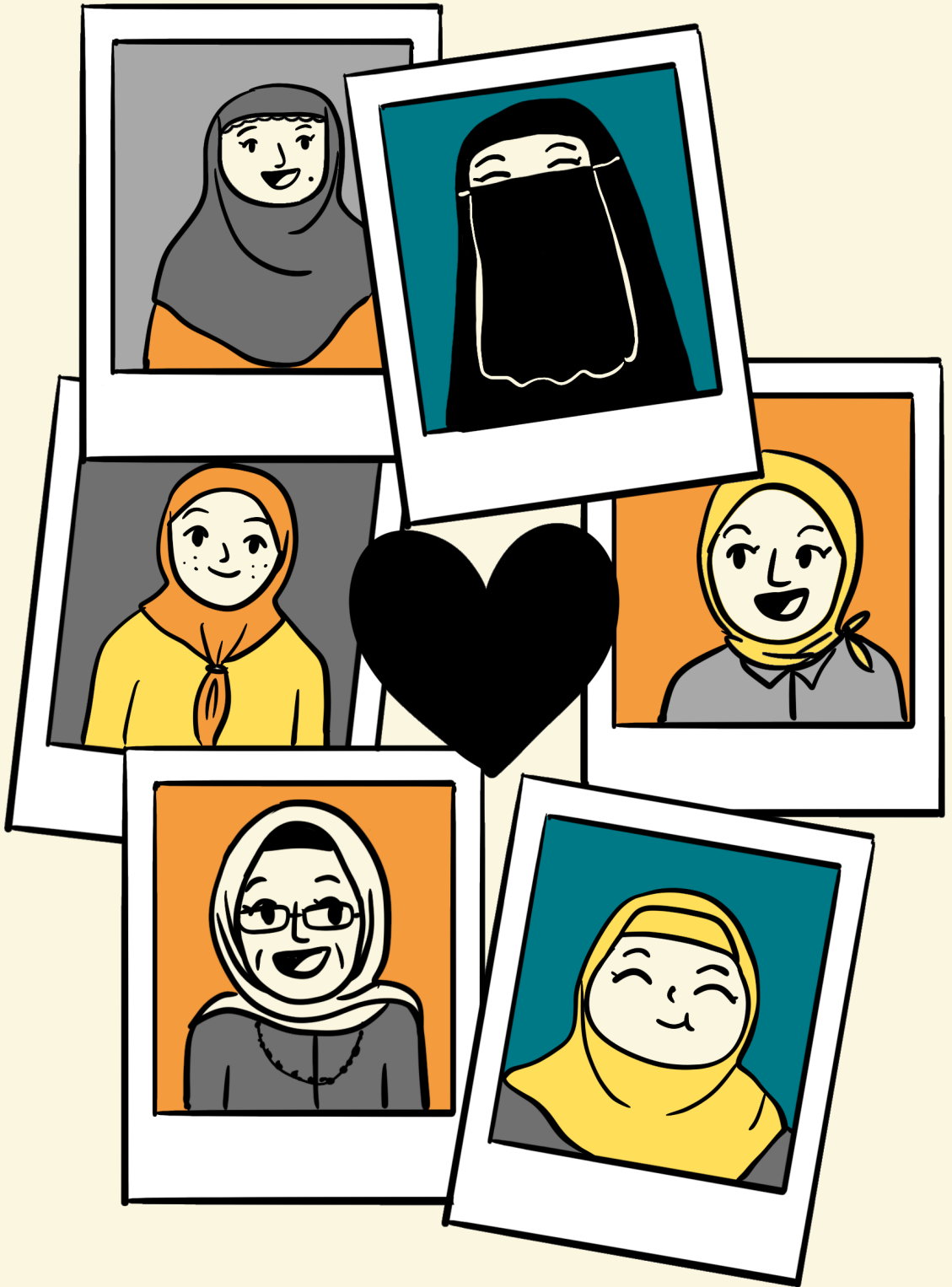
Berlimpah Berkah

Setelah sesi foto, kami berpisah. Pak Ridwan, Bu Tere, dan Pak Benny segera beranjak pulang karena ada kuliah online yang harus ditunaikan malam itu. Sedangkan, saya mengantar para peserta kembali ke penginapan untuk beristirahat malam sebelum esok pagi meninggalkan Semarang untuk kembali pulang ke kota masing-masing.

Harum segar tanah basah mulai semerbak, tanda rintik hujan mulai menyentuhkan tanah kering Kota Semarang. Dalam perjalanan membelah hujan saya mencoba mengingat-ingat kembali semua perjalanan, pengalaman, dan pertemuan yang saya alami selama beberapa bulan mengunjungi kota demi kota. Semuanya sangat membantu saya memahami alasan tentang mengapa kita, yang berbeda-beda ini, harus hidup bersama di negeri ini dengan damai.

Sesampai di penginapan, saya memastikan para peserta naik ke kamar masing-masing. Setelah mengenakan setelan baju hujan, saya menyongsong derasnya hujan untuk pulang ke rumah.

Kata para tetua, hujan adalah pertanda baik, karena langit mengguyur berlimpah berkah. Begitu juga malam itu. Saya percaya, kami semua yang terlibat pulang dengan membawa berkah, berupa pemaknaan dan harapan baru.***





**Saudara Dekat
Terasa Jauh,
Hanya Memandang
Tanpa Menyapa:**

Pengalaman
Perjumpaan dari
Jawa Timur

Saudara Dekat Terasa Jauh, Hanya Memandang Tanpa Menyapa:

Pengalaman Perjumpaan dari Jawa Timur

Ida Rochmawati

Fatayat NU Jawa Timur

Pagi itu suasana terasa datar. Para pemimpin Islam perempuan datang satu per satu tanpa saling menyapa. Hanya bersalaman lalu duduk menunggu acara dimulai. Di sinilah perjumpaan itu bermula.

Ketua Muslimah Ahlul Bait Indonesia, Perwakilan Perempuan Ahmadiyah Surabaya, Perwakilan Pengurus Perempuan LDII, Aisyiyah dari Sidoarjo dan Surabaya hadir memenuhi undangan Fatayat NU Jawa Timur.

Pengalaman pertama Fatayat NU Jatim mempertemukan para pemimpin Islam perempuan dalam satu forum Diskusi Islam Damai (DID) di Surabaya itu digelar atas Program Konsorsium INKLUSI.

Jawa Timur, Tahun 2022.

Tahun itu, Jawa Timur mengalami masa puncak pelanggaran Kebebasan Agama dan Berkeyakinan (KBB) dengan menempati posisi tertinggi menggeser Jawa Barat dengan 33 kasus menurut survei SETARA Institute. Meski, tahun 2023 laporan kondisi KBB Jawa Timur kembali menurun di urutan kedua setelah Jawa Barat dengan 29 kasus, namun ini bukanlah hal yang menggembirakan.

Salah satu penyebab tingginya angka pelanggaran KBB di tahun 2022, adalah soliditas penolakan terhadap penceramah yang mendukung kemajemukan sebagai upaya perlindungan terhadap tradisi lokal oleh NU. Namun, menurut analisis SETARA Institute, hal itu tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam perspektif HAM.

Di samping itu, peristiwa-peristiwa intoleransi di Jawa Timur masih menyisakan kurangnya pemahaman inklusif di antara pemimpin agama. Kasus Syiah di Sampang tahun 2012, sampai saat ini belum banyak menyentuh problem sosial ekonomi bagi pengikutnya.

Kondisi KBB di Jawa Timur itu menggugah Fatayat NU Jawa Timur melalui program INKLUSI bersama anggota Konsorsium lainnya, untuk menggagas Diskusi Islam Damai dan Sekolah Inklusi Perempuan. Sarana itu mempertemukan para pemimpin Islam perempuan dari beragam aliran dalam Islam, serta pemimpin pesantren perempuan di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Ketiga wilayah ini merupakan zona merah dari berbagai peristiwa intoleransi, radikalisme dan terorisme di Jawa Timur.



Peristiwa-peristiwa intoleransi di Jawa Timur masih menyisakan kurangnya pemahaman inklusif di antara pemimpin agama. Kasus Syiah di Sampang tahun 2012, sampai saat ini belum banyak menyentuh problem sosial ekonomi bagi pengikutnya.



Surabaya merupakan kota dengan peristiwa rangkaian bom bunuh diri yang melibatkan keluarga; terdiri dari perempuan (istri) dan anak-anak kandung pelaku, tahun 2018. Beberapa kasus penangkapan terhadap terduga yang berupaya melakukan pengeboman sepanjang tahun 2018, terjadi di Sidoarjo.

Sementara, Lamongan, menjadi satu wilayah yang sangat dikenal pasca bom Bali I dan II karena pelakunya berasal dari satu kerabat dari Solokuro, Lamongan. Belum lagi peristiwa penangkapan terduga teroris yang banyak ditemukan di Lamongan yang berlangsung hingga tahun 2021, termasuk kasus penangkapan seorang pemimpin pesantren dan dokter yang diduga teroris dari Lamongan.

Intoleransi, Pintu Radikalisme

Sebelum terjadi proses radikalisme dan terorisme, intoleransi dapat menjadi pintu awal bagi terjadinya pola pikir radikal di masyarakat. Berkembangnya asumsi, cara pandang tentang kelompok keagamaan tertentu, saling memberi stigma, menjadi hal biasa. Menganggap kelompoknya benar dan yang lain salah adalah satu hal yang lazim. Klaim kebenaran tidak hanya terjadi pada agama yang berbeda namun juga bisa terjadi dalam intern agama. Antara NU dan Muhammadiyah, antara Syiah dan Ahmadiyah, antara LDDI dan lainnya.

Para pemimpin Islam perempuan ini belum pernah berjumpa secara langsung. Forum-forum yang ada, seperti FKUB (Forum kerukunan Umat Beragama), FORGAMA (Forum antar Agama) biasa mempertemukan para tokoh lintas agama. Di forum ini mereka telah saling mengenal pemimpin pada agama yang berbeda.

Akan tetapi, pertemuan antarpemimpin Islam yang berbeda Aqidah belum pernah terjadi, khususnya di Jawa Timur. Antara pemimpin Perempuan NU dan Muhammadiyah jalinan kolaborasi sudah sering terjadi, namun pemimpin dari aliran lain seperti Syiah, Ahmadiyah dan LDII belum pernah duduk dalam satu forum.

UN Women mencatat, perempuan di seluruh dunia memainkan peran penting dalam mencegah konflik, membangun perdamaian dan membantu pemulihan dari krisis, kendati seringkali membahayakan nyawa mereka sendiri. Meskipun demikian, sebagian besar perempuan masih berada di pinggiran proses perdamaian formal dan pengambilan keputusan.

Dampak terpenting dari keterlibatan perempuan dalam proses menggapai damai adalah perhatian lebih besar terhadap elemen-elemen terkait gender dalam pertimbangannya dan perubahan dinamika dan perluasan isu. Selain itu, juga meningkatkan peluang keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan akar masalah, dan memberi tekanan lebih besar pada semua pihak untuk mencapai kesepakatan, atau kembali bertemu ketika menemui jalan buntu.

Studi The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) tahun 2015 menyoroti berbagai upaya perempuan dalam penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian. Studi itu juga menawarkan wawasan dan sarana pembelajaran penting bagi lembaga-lembaga internasional dan nasional dalam mendukung reformasi demokrasi dan pembangunan perdamaian.

Tujuan studi itu, adalah untuk meningkatkan visibilitas dan pengakuan terhadap perempuan, terutama dari komunitas terpinggirkan sebagai pemangku kepentingan dalam kegiatan perdamaian; sebagai aktor, baik yang mengganggu (*spoiler*) maupun yang mengupayakan (*fasilitator*)

66 **UN Women mencatat, perempuan di seluruh dunia memainkan peran penting dalam mencegah konflik, membangun perdamaian dan membantu pemulihan dari krisis, kendati seringkali membahayakan nyawa mereka sendiri.** 88

perdamaian dan keamanan. Selain itu juga meningkatkan kesadaran dalam strategi untuk meningkatkan partisipasi mereka.

Pada awal pertemuan DID, para peserta tampak masih menjaga jarak satu dengan lainnya. Suasana terasa kaku.

Apalagi, salah satu pembicara dalam DID di sesi kedua adalah Ketua Muslimah Ahlul Bait Indonesia (ABI) Jawa Timur, sehingga panitia harus meyakinkan masing-masing peserta untuk datang hingga detik-detik acara akan dimulai.

Aminah Yahya, Ketua Muslimah ABI, dalam paparannya menjelaskan bahwa dalam Syiah juga mengajarkan sikap moderat yang harus menghormati satu sama lain. Umat Islam seharusnya disatukan oleh *ukhuwah islamiyah*. Jika tidak, maka seharusnya *ukhuwah basyariyah* menjadi pemersatu umat manusia.

Sebagian besar peserta diam. Sesi tanya jawab pun terasa sepi. Masing-masing seperti mengamati satu sama lain, hingga ada satu peserta, yaitu, Nur Kholisoh dari PC Muslimat Sidoarjo, bertanya, “Selama ini saya mendengar bahwa Syiah itu radikal, Syiah itu seringkali mengharamkan ibadah orang NU. Contohnya, baca shalawat tidak boleh, dengan menyampaikan dalil-dalil yang sama dengan Wahabi dan HTI. Apakah yang dilakukan ini menjadi jalan Tengah?”

Suasana tegang semakin terasa. Aminah Yahya menjawab pertanyaan ini dengan tenang, bahwa Syiah itu tidak satu, banyak aliran yang memiliki perbedaan pandangan. Kemudian, tibalah pada sesi diskusi reflektif yang membagi peserta menjadi dua, kelompok Surabaya dan kelompok Sidoarjo.

Mereka diminta mendengarkan saat ada satu peserta yang menceritakan pengalaman hidupnya bersinggungan dengan radikalisme atau terorisme secara bergantian. Semua mendapat giliran bicara dan mengharuskan yang lain menjadi pendengar yang baik.

Sesi ini nampak mudah, namun terasa berat. Kebiasaan selalu berkomentar dan menilai membuat sesi refleksi ini awalnya kurang menarik dan membosankan.

Satu persatu bercerita. Dengan mata berkaca-kaca, perempuan Ahmadiyah Surabaya mengungkapkan pengalaman mereka mengalami diskriminasi, pembubaran saat beribadah, dan pengucilan saat berada di satu forum. Muslimah ABI memaparkan pengalaman mereka mendapatkan intimidasi, pelemparan dan pembubaran saat akan melakukan kegiatan keagamaan.

“Kami hanya melakukan pengajian di forum kami, kami sudah mengurus perizinan, kami tidak membuat onar, tetapi kami dikepung dan tidak boleh masuk ke lokasi pengajian. Sebenarnya salah kami apa?” tanya Aminah sambil menahan emosi yang muncul kembali setelah belasan tahun peristiwa itu terjadi.

Perempuan LDII menyampaikan bagaimana upaya LDII bertransformasi menjadi kelompok yang bisa menghargai perbedaan, dari Darul Hadis yang dilabeli sebagai kelompok eksklusif karena menganggap yang lain najis, hingga menjadi LDII saat ini yang lebih terbuka.

“Saya baru mendengar cerita dari Ahmadiyah dan Syiah ini secara langsung hari ini. Saya tidak menyangka peristiwanya tidak seperti apa yang saya baca di media,” salah seorang pemimpin pesantren perempuan di Surabaya memberikan komentarnya.

Prasangka yang menggumpal menjadi kebencian sebelum pertemuan sore itu, mulai mencair.

Informasi dari sumber utama itu mampu mengurai kesimpangsiuran informasi tentang kelompok agama yang telah mereka terima sehingga menciptakan kebencian dan klaim sesat. Dari sinilah tumbuh pemahaman bahwa kebencian karena doktrin keagamaan tertentu harus dikonfirmasi kebenarannya. Sesama Umat Islam seharusnya disatukan oleh *ukhuwah islamiyah*.

Proses Menggapai Kepercayaan

Perjumpaan para pemimpin Islam perempuan dalam Diskusi Islam Damai di Lamongan terasa hangat, namun masih terbentang jarak.

Kabupaten Lamongan menjadi satu wilayah dengan zona merah peristiwa radikalisme dan terorisme. Pada tahun 2002, saat bom Bali mengguncang dunia, masyarakat Lamongan mendapatkan stigma buruk sebagai Kabupaten sarang teroris karena Amrozi dan keluarganya berasal dari Lamongan. Rentetan penangkapan terduga teroris, pengibaran bendera ISIS, jaringan keluarga teroris di Lamongan, menjadi fakta nyata tumbuhnya akar intoleransi, radikalisme, dan terorisme di tempat ini.

Banyaknya organisasi masyarakat yang tumbuh dengan keragaman ideologi di Lamongan turut mewarnai tumbuhnya sikap intoleran. Meski organisasi besar yang menyumbang pemikiran dan gerakan radikal sudah lama dibubarkan, namun ideologi gerakan radikal bukan tidak mungkin masih tumbuh di dalam masyarakat Lamongan.

Diskusi Islam Damai di Lamongan menghadirkan pemimpin Islam perempuan dari beragam organisasi, seperti Muslimah Hidayatullah (MUSHIDA), Organisasi masyarakat Persaudaraan Muslimah (SALIMA), Perempuan LDII, Nasyiatul Aisyiyah, Muslimat NU, Fatayat NU, Aliansi Perempuan Lamongan (APEL), GOW, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Pemimpin pesantren Perempuan, FKUB, Karang Taruna, Gusdurian, dan sebagainya.

Mereka sudah biasa bertemu dalam forum-forum perempuan di Lamongan, namun belum pernah dipertemukan dalam konteks isu intoleransi, radikalisme maupun terorisme. Masyarakat Lamongan era kini ingin terlepas dari stigma tersebut, namun kasus-kasus intoleransi masih dijumpai dan belum diselesaikan. Kasus intoleransi yang paling mencolok adalah sengketa tanah kuburan di Desa Pancasila, Desa Balun, Kecamatan Turi Lamongan.

Desa ini menjadi ikon sikap toleransi warganya yang hidup berdampingan dengan keragaman agama. Namun, anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bercerita, dalam DID sebagian masyarakat Desa Balun ini mengalami kecemasan dan kekhawatiran akan urusan kematian. Percekcokan antar warga Muslim, Hindu, maupun Kristen soal pembagian lahan pemakaman menjadi konflik yang memicu keresahan masyarakat.

FKUB belum bisa menyelesaikan problem ini. FKDM merasa bekerja sendiri, dan mengajak semua pemimpin Islam perempuan ikut terlibat memikirkan dan mencari solusinya.

Maka, lahirlah ide membentuk sebuah forum pemimpin Islam perempuan Lamongan yang diberi nama FORISDAMA (Forum Islam Damai Lamongan). Gabungan Organisasi Wanita (GOW) sebagaimana di Kabupaten lainnya sudah eksis, namun organisasi ini bersifat umum dan tidak memiliki tujuan sebagai organisasi yang menyatukan pemimpin Islam perempuan.

FORISDAMA menjadi oase bagi para pemimpin Islam perempuan untuk merespons isu-isu internal Islam. Forum ini diharapkan dapat melakukan deteksi dini adanya intoleransi, radikalisme, maupun terorisme di Kabupaten Lamongan.

Perjumpaan para pemimpin Islam perempuan kedua di ToT (Training of Trainers, program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pelatih dalam memberikan pelatihan secara efektif) Sekolah Inklusi Perempuan (SIP) semakin menguatkan persaudaraan mereka. Sebagian pemimpin Islam perempuan yang pernah bertemu dalam DID di Surabaya dan Lamongan sebelumnya saling berpelukan saat sesi registrasi. Saling menanyakan kabar dan saling bercerita tentang keluarga.

Kegiatan selama tiga hari yang memberikan beragam materi tentang Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI), pendekatan implementasi Islam *rahmatan lil alamiin* serta metode pengorganisasian masyarakat memberikan insight baru para pemimpin Islam perempuan ini.

Berbeda dengan DID yang diwarnai kekakuan, pertemuan kedua ini menghadirkan kehangatan tanpa sekat, tanpa prasangka dan justifikasi. Mereka belajar tentang hal-hal baru yang belum pernah mereka dapatkan. Para pemimpin Islam perempuan ini selain belajar dekat dan melebur dalam perbedaan, juga merasa bahwa selama ini belum memiliki kepedulian pada kelompok disabilitas dan kelompok minoritas sosial lainnya.

Peserta pemimpin pesantren putri, belum pernah berpikir akan menerima santri disabilitas apalagi memiliki program untuk santri berkebutuhan khusus serta membangun dan menyediakan fasilitas khusus untuk santri difabel. Materi tentang GEDSI membuka mata bahwa anak-anak disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di pesantren.

Ruang-ruang perjumpaan yang mempertemukan dan saling mengenalkan kelompok-kelompok minoritas keagamaan dapat menciptakan cara pandang dan membuka diri untuk menerima perbedaan, agar tidak ada lagi prasangka di antara mereka.

Bukankah prasangka tumbuh karena adanya distorsi informasi? Mengapa kita menganggap mereka sesat? Karena kita tidak pernah berjumpa dan memahami satu sama lain.

Pemimpin Islam perempuan yang telah memiliki cara pandang terbuka ini mulai mengenalkan dan menyebarkan apa yang telah mereka peroleh kepada komunitas, santri ataupun orang lain.

“Bagaimana Cara Saya Keluar Dari Sikap Eksklusif?”

Aminah Yahya, Ketua Muslimah ABI Jawa Timur, menangis terharu saat menyampaikan kesannya setelah mengikuti ToT SIP. Dia mengaku selama ini menjadi kelompok eksklusif.

“Ini pertama kali saya bertemu dengan antum, saya sebagai ketua, tokoh dan guru di komunitas, merasa sangat kerdil. Saya merasa sangat

kecil karena ternyata saya tidak tahu apa-apa tentang perbedaan dan persaudaraan.”

Sebagai seorang penganut Syiah, sedari kecil sebenarnya dia sudah hidup dalam perbedaan. Ibunya seorang Sunni, namun Aminah memutuskan menjadi Syiah saat usia 15 tahun. Keluarganya terbiasa dengan perbedaan dan hidup saling berdampingan.

Pengalamannya sebagai Ketua Muslimah ABI yang mendapat beragam tekanan di masyarakat membuatnya menjadi eksklusif. Pengalamannya bersama Syiah yang selalu disudutkan sebagai kelompok aliran yang sesat, membuatnya membangun benteng yang tinggi, yang memisahkan dengan kelompok Islam lainnya.

Namun, saat Fatayat NU mengundangnya sebagai pembicara di forum DID, dia mulai berpikir kenapa Fatayat NU mau mengundangnya? Dia menilai, kegiatan ini cukup berani dan mengagetkan. Apalagi di forum tersebut juga ada pemimpin Islam perempuan lain yang selama ini juga dianggap sesat, yaitu Ahmadiyah dan LDII.

Selama mengikuti diskusi, berbagi cerita dan mengikuti ToT SIP membuat pandangan eksklusifnya sebagai kelompok minoritas berubah.

“Aura keberanian, kasih sayang dan ketulusan dalam ToT SIP membuat saya berpikir bagaimana cara saya keluar dari sikap eksklusif ini dan bagaimana saya bisa bergabung dengan masyarakat di desa saya yang mayoritas masih memandang saya dengan berbeda.”

Aminah mengakui bahwa Syiah di Indonesia memang minoritas, namun di negara lain bisa mayoritas. Kondisi ini bisa berbalik, Sunni bisa menjadi minoritas di negeri Syiah yang mayoritas.

“Siapa yang minoritas, siapa yang mayoritas, tidak penting. Yang terpenting adalah ketika ada kesatuan hati. Ilmu yang saya dapatkan sungguh luar biasa, jadi auranya sangat berbeda.”

Aminah meyakini, bahwa bukan mazhab yang membuat orang menjadi terbuka dan memiliki pemahaman inklusif, bukan pula pemahaman agama yang menjadikan orang hebat, melainkan empati, kepedulian dan ketulusan pada sesama seperti yang dibangun selama kegiatan SIP, yang menjadi inspirasi dalam menghargai orang lain.

“Siapa yang minoritas, siapa yang mayoritas, tidak penting. Yang terpenting adalah ketika ada kesatuan hati.”



“Saya merasa di sini sama sekali tidak ada sekat, semua saling menghargai, tidak ada saling mencaci dan membenci karena alasan perbedaan,” tegasnya.

Inisiasi Membangun Dialog

Setelah mengikuti program INKLUSI, Aminah meyakini bahwa kebencian antar kelompok Islam terjadi karena tidak pernah saling menyapa. Kebencian dipicu oleh ketidakpahaman tentang satu kelompok tertentu dan informasi kebencian yang terus menerus dijejalkan tanpa pernah melakukan *tabayun* dan konfirmasi langsung pada kelompok yang dibenci.

Aminah mencoba menulis surat ke beberapa pimpinan lembaga dan komunitas agama perempuan di Jawa Timur. Dia menulis surat ke Muslimat NU maupun Fatayat NU dengan tujuan ingin bertemu dan menjalin silaturahmi.

Aminah berharap komunikasi dengan lembaga perempuan lainnya akan dapat membangun jalan persaudaraan antar sesama pemimpin Islam perempuan di Jawa Timur sebagaimana pengalamannya mengikuti ToT SIP. Sebelumnya, Muslimah ABI sudah bisa bertemu dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, namun belum tersambung dengan Aisiyah.

Keberanian untuk mencoba mengawali proses membuka diri kepada lembaga Islam perempuan ini muncul karena dia mendambakan sebuah hubungan yang harmonis di dalam Islam tanpa adanya prasangka dan kebencian yang dapat memicu terjadinya kekerasan.

Upaya ini tidaklah mudah. Perjumpaan dengan pemimpin Islam perempuan untuk silaturahmi dan dialog dua arah masih belum menemukan jawaban secara formal.

Meski demikian, Aminah mewujudkan janji yang dia ucapkan untuk membuka diri, dengan membentuk forum studi yang diberi nama Zainabiyah; sebuah komunitas anak muda lintas keyakinan.

Forum ini diikuti oleh anak-anak muda yang haus pengetahuan agama di sekitar Bangil dari beragam keyakinan: Syiah, Sunni, Persis atau Muhammadiyah. Topik-topik diskusi mulai *fiqih* hingga filsafat yang diberikan oleh Aminah sering kali memicu mereka bertanya banyak hal tentang perbedaan di dalam internal Islam.

Aminah memakai perspektif GEDSI dan *Islam Rahmatan lil alamiin* untuk menjawab pertanyaan mereka. Harapannya, mereka saling memahami keyakinan yang berbeda, bukan saling mencaci dan merasa benar sendiri.

Dia melihat, isu disabilitas yang dikenalkan dalam ToT Sekolah Inklusi Perempuan sangat menjunjung nilai kemanusiaan. Maka, Aminah membawa konsep GEDSI pada pengurus Muslimah ABI, terutama perhatian terhadap kelompok disabilitas dalam Kongres Muslimah ABI tingkat nasional.

Dia menyampaikan bahwa Syiah juga harus mulai memikirkan bagaimana bentuk bangunan yang ramah terhadap kelompok disabilitas, dan berkomitmen untuk memperhatikan kelompok ini sebagai sesama yang harus dihargai hak-haknya.

Pengenalan wacana dan konsep disabilitas ini masih awal, namun Aminah berharap pimpinan di tingkat nasional mulai memikirkan kebutuhan kelompok disabilitas di Syiah ataupun masyarakat luas.

“Materi itu sangat berguna bagi saya,” ujarnya. “Sebelumnya saya sama sekali belum mengenal dua hal, yakni inklusi sosial dan disabilitas. Bahkan, dalam rapat besar Syiah saya mengungkapkan, NU punya kelebihan karena mengangkat isu disabilitas dan inklusi sosial, seperti kata bu Hanifah, dari segi infrastruktur diberikan akses jalan,” cerita Aminah. Kongres merespons positif masukan dari Aminah terkait isu disabilitas ini.

Momen pertemuan dengan sesama pemimpin Islam perempuan ini sangat membekas bagi Aminah. “Saya merasa punya saudara, kita tidak sendiri, kita harus bisa menjaga Islam bersama-sama.”

Ikatan persaudaraan yang telah dibangun dalam kegiatan INKLUSI berlanjut hingga sekarang. Pertemuan berlanjut dengan pertemuan dengan keluarga dan saling berkirim kabar sambil memberikan dukungan satu dengan lain. Antara Muslimah ABI dengan perempuan Ahmadiyah sering berkomunikasi meski hanya berkirim kabar atau silaturahmi ke rumah.

Kisah Perempuan Ahmadiyah

Perempuan Ahmadiyah Jawa Timur yang berpusat di Bubutan Surabaya telah terbiasa bekerja sama dengan komunitas lintas iman melalui forum Gusdurian. Komunitas Ahmadiyah, Kristen, maupun Konghucu, telah sering bertemu dan berkegiatan bersama.

Indah, seorang perempuan Ahmadiyah Gresik, bercerita, setiap hari Rabu dia bersama anggota Ahmadiyah lainnya membuka praktik pengobatan tradisional di Klenteng Kota Gresik. Warga sekitar banyak yang datang.

“Kami juga aktif di Forum Umat Beragama, sehingga sering berkegiatan bersama, seperti bakti sosial dengan pemeluk Kristen, Hindu, maupun Buddha. Tapi, di FKUB Gresik, kami tidak diakui, karena dicap sebagai aliran sesat.”

Pernah di sebuah forum, salah satu anggota FKUB berbicara sambil menunjuk kami, “itu Ahmadiyah sesat.” Ini justru memicu reaksi dari pemeluk agama lain yang bertanya, “Dia kan juga muslim ya, Bu? Kok seperti itu?”

Dengan senyum kecut, dia melanjutkan, “Kami seringkali jadi sasaran empuk ujaran kebencian, dan amukan massa, padahal kami tidak pernah berbuat onar atau merugikan orang lain. Kami beribadah sesuai dengan keyakinan kami. Kami juga tidak melanggar hukum dengan menyebarkan keyakinan kami, lagipula tidak ada aturan yang mengatakan kalau Ahmadiyah itu dilarang di Indonesia. Kami ini disesatkan oleh saudara kami sendiri.”

Bahkan, sampai saat ini mereka belum berhasil mendapatkan izin balik nama masjid, sehingga salah satu staf dari Kesbangpol Gresik meminta agar nama pengajuannya diganti, tidak pakai nama Ahmadiyah.

“Nah kita kan tidak bisa seperti itu, karena dari awal, masjid ini diwakafkan oleh pemiliknya untuk Masjid Ahmadiyah. Kita ini bukan organisasi terlarang, kita juga berbadan hukum, lho,” lanjutnya.

Pertemuan perempuan Ahmadiyah dengan pemimpin Islam perempuan di forum DID juga baru pertama kali dilakukan. Ahmadiyah belum pernah duduk bersama dengan orang-orang Syiah, LDII, atau NU, karena mereka khawatir dicap sesat lebih dulu.

“Di ToT SIP saya merasa surprise bisa bertemu dengan teman-teman dari Islam yang selama ini saling menyalahkan dan menyesatkan. Awalnya, saya canggung dan minder karena sebagian besar pesertanya para Bu Nyai, namun ternyata forumnya asyik banget. Tidak ada ketakutan karena disalahkan dan dicap sesat,” tutur Indah.

Karena pertemuan awal inilah, Indah tergugah untuk bisa saling menyapa dan selalu berkomunikasi dengan Muslimah ABI, LDII, Fatayat, maupun pemimpin pesantren perempuan. Saling menyapa dilanjutkan dengan menjalin kerja sama.

Selain aktif di FORMAGA, Indah juga aktif di perempuan pengusaha Gresik. Saat Pemilihan anggota Legislatif tahun 2024, Indah mengajak perempuan pengusaha Gresik serta anggota Ahmadiyah Gresik merapatkan barisan memilih Dewi Winarti, Ketua Fatayat NU Jatim periode 2019-2024 yang mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Provinsi Jawa Timur.

Ahmadiyah juga membuka diri jika ada mahasiswa yang melakukan penelitian di internal Ahmadiyah.

“Kami lebih suka mereka bertanya langsung ke kami daripada mendapatkan informasi tentang Ahmadiyah dari orang lain yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan,” paparnya.

Dari sinilah, melalui Indah, Ahmadiyah Jawa Timur ber kirim surat ke Rumah Moderasi Beragama UIN Sunan Ampel Surabaya untuk menjalin ikatan silaturahmi.

Perbedaan adalah rahmat, dan Islam adalah pembawa rahmat, sebagaimana materi yang diberikan dalam Sekolah Inklusi Perempuan. Sesama umat Islam seharusnya saling memahami, saling melihat persamaan, bukan perbedaan, agar bisa bersatu.

“Cintai sesama manusia dan tidak ada kebencian satu dengan yang lain” merupakan satu ajaran khalifah Ahmadiyah.

Pertemuan Ahmadiyah dengan Syiah, LDII, Muslimat NU maupun Aisyiyah membawa kesadaran tentang hal yang lebih penting dibanding melakukan pembenaran terhadap keyakinan tertentu.

Mencintai sesama manusia adalah bentuk empati tertinggi untuk menghargai sesama.

“Sayangnya Program Sekolah Inklusi Perempuan ini hanya untuk perempuan ya, coba jika ada sekolah inklusi untuk bapak-bapak,” kata Indah pada akhir perbincangan kami. ***

EPILOG

Maria Hartiningsih*)

"In every religion there is love, yet love has no religion."

- Rumi, 1207-1273

Jargon 'keberagaman', 'inklusi sosial' dan toleransi' dan seperti mantra yang berulang kali diucapkan, terutama dalam pidato dan 'omonomon' para pejabat. Kalau melihat intensitasnya, kita akan meyakini bahwa Indonesia sudah baik-baik saja.

Padahal, berbagai peristiwa terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, seperti diskriminasi, intimidasi, stigmatisasi, dan pengingkaran hak-hak penghayat, di luar enam agama resmi – Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu --terus terjadi.

Banyak teman dan tetua penganut aliran kepercayaan mengungkap, diskriminasi terhadap komunitas mereka akan terus dialami dari rahim ibu sampai ke liang kubur.

Hak kemerdekaan beragama, untuk waktu yang lama, tidak terjamin sepenuhnya. Jika mereka tidak menjadi penganut salah satu agama resmi maka kolom agama tidak diisi alias kosong. Atau, lebih ekstrem, sulit mendapat kartu identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang berimbas pada pemenuhan hak-hak lainnya.

Pada masa kelam, terkait Tragedi 1965, komunitas penghayat distigma sebagai komunis, kecuali mereka menjadi pemeluk salah satu agama yang diakui pemerintah.

Isu hak-hak penghayat terus berkembang di Indonesia. Dalam buku *Seri Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa* (2017), SETARA Institute menguakkan sejumlah potret diskriminasi terhadap kelompok penghayat.

Padahal, pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan para pemohon uji materi terhadap Pasal 61 Ayat (1), (2), dan Pasal 64 Ayat (1) dan (2) UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan¹⁶.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 itu dianggap sebagai kemajuan signifikan dalam kemerdekaan beragama. Dalam putusan itu dinyatakan penghayat kepercayaan bisa masuk kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Artinya, hak sosial-politik mereka sebagai warga negara dijamin secara konstitusional, sama seperti penganut agama lainnya.

Meski demikian, dalam kenyataan, mereka masih sulit menyalurkan aspirasi. Mereka juga terus mengalami diskriminasi dan kekerasan struktural, terkait fasilitas ibadah, pelayanan administrasi publik, fasilitas pendidikan dan lain-lain.

Anak-anak dari komunitas penghayat ini, terutama anak perempuan, rentan menjadi target perundungan di sekolah. Pelaku mulai dari teman sebaya, hingga guru. Diskusi tentang bullying hampir tidak pernah menyinggung masalah ini.

¹⁶ Telah berubah menjadi UU No 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

66 Mereka masih sulit menyalurkan aspirasi. Mereka juga terus mengalami diskriminasi dan kekerasan struktural, terkait fasilitas ibadah, pelayanan administrasi publik, fasilitas pendidikan dan lain-lain. 88

Pada bulan Juli 2020, tugu makam sesepuh Masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, disegel oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan. Alasannya, tak ada izin mendirikan bangunan, padahal IMB yang diajukan, ditolak.

“Subaltern”

Komunitas penghayat terus mengalami ancaman atas dasar asumsi dan prasangka. Sebenarnya, semua itu sudah dimulai sejak penjajah yang membawa agama baru dan pengetahuan modern, juga ketika pendatang membawa agama-agama baru ke Bumi Nusantara ini.

Pengetahuan dan kearifan lokal yang otentik semakin terdesak. Seluruh simbol alam, bumi, gunung, pohon, sungai, batu dan lain-lain yang menjadi subyek penghormatan mereka, dianggap berhala.

Para tetua pemegang teks pengetahuan tradisional, dilabeli dukun, yang konotasinya negatif. Bahkan, kemampuan perempuan-perempuan sepuh yang membantu proses kelahiran (dukun bayi), dianggap primitif, berbahaya, dan diabaikan. Padahal, banyak dari mereka memiliki keterampilan serta kemampuan langka, yang tidak dimiliki ilmu kedokteran modern.

Komunitas penghayat mengalami apa yang disebut *bell hooks* (1981) sebagai ‘dehumanisasi sistematis’. Dalam proses dehumanisasi ini, perempuan, anak, dan anak perempuan -- apalagi dari kelompok yang dimarjinalkan -- berada pada lapis terbawah. Artinya, mereka mengalami penindasan yang berlapis-lapis.

Dalam kajian postkolonial, komunitas penghayat bisa dimasukkan dalam kategori 'subaltern' (Spivak, 1998). Istilah itu merujuk pada individu atau kelompok sosial yang tertindas dan terpinggirkan oleh budaya dominan (baca: Barat, modernisme), tertekan dan disubordinasikan secara politik, sosial, dan ekonomi sehingga tidak punya ruang bersuara. Oleh sebab itu, dibutuhkan kaum intelektual sebagai 'wakil' mereka.

Namun, yang dimaksud 'subaltern' oleh Spivak, lebih dari itu. Spivak menunjukkan bagaimana hak dan sumberdaya 'subaltern' dirampas sehingga tidak mampu mencapai agensi; artinya, tidak punya kemampuan untuk bertindak dan membuat perbedaan dalam urusan sosial. Ini adalah konsep inti dalam teori strukturasi Giddens (1998) yang menganalisis antara agensi dan struktur.

Konflik Identitas

Diskriminasi, stigmatisasi, intimidasi, dan kekerasan struktural sebenarnya juga terjadi pada kelompok-kelompok 'minoritas' di dalam agama-agama resmi. Mereka juga mendapat label 'liyan' atau 'yang lain' atau 'the other' akibat perbedaan-perbedaan yang sulit dijumpai.

Konflik ormas Islam dengan komunitas Ahmadiyah merupakan konflik identitas yang disebabkan perbedaan keyakinan dan pandangan masyarakat Muslim pada umumnya terhadap Ahmadiyah yang dianggap menistakan keyakinan umat Islam.

Diskriminasi, stigmatisasi, intimidasi, dan kekerasan struktural sebenarnya juga terjadi pada kelompok-kelompok 'minoritas' di dalam agama-agama resmi. Mereka juga mendapat label 'liyan' atau 'yang lain' atau 'the other' akibat perbedaan-perbedaan yang sulit dijumpai.

Konflik dengan Jemaah Ahmadiyah melibatkan isu politik terkait pelanggaran hak warga negara dan memicu intoleransi. Khususnya, adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 2008 serta peraturan-peraturan gubernur yang melarang kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia di wilayah mereka.

Konflik antara kelompok Muslim Sunni dan Syiah bisa ditandai sebagai konflik identitas kelompok intra-religius yang disebabkan perbedaan ideologi, persepsi keliru, dan stigma negatif.

Komunitas Syiah tidak dilarang di Indonesia. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan Syiah ditolak di Indonesia. Ajaran Syiah dianggap bertentangan dengan ajaran Islam Sunni dan ada kesalahpahaman yang menggeneralisasi semua Syiah, ekstrem.

Jaminan Konstitusional di Atas Kertas

Sebenarnya, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI), khususnya pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, dan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), khususnya pada Pasal 22 UU HAM, menjamin kemerdekaan beragama dan kebebasan memeluk agama dan beribadat, selain Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016.

Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan. Salah satu yang diatur adalah jaminan hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.

Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 14 September 2022 itu menyatakan penegakan hak masyarakat adat, komunitas tradisi, dan penghayat kepercayaan, agar mereka dapat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pemajuan kebudayaan.

Tak lama setelah itu, Presiden Jokowi menandatangani Perpres No. 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2023. Perpres itu menjadi penyangga kuat Perpres No. 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama dalam menjalankan penguatan program moderasi beragama.

Namun, semua itu tampaknya tidak ‘bunyi’ di lapangan. Perundungan, persekusi dan kekerasan terus terjadi pada komunitas yang dilabel sebagai ‘liyan’.

Laporan Amnesty Internasional tanggal 6 Desember 2024, mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, melarang Jemaah Ahmadiyah mengadakan pertemuan tahunan Jalsah Salanah Jemaah Ahmadiyah Indonesia, tanggal 6-8 Desember 2024, di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Aparat bahkan memperlakukan jemaah sebagai kriminal.

Larangan itu tercantum dalam surat tertanggal 5 Desember 2024, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. Melalui surat itu, Pemkab mengultimatum Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia agar menghentikan kegiatan apapun terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Jalsah Salanah.

Amnesty International Indonesia mencatat, setidaknya terjadi 122 peristiwa intoleransi Januari 2021-September 2024, termasuk penolakan, penutupan, atau perusakan tempat ibadah, dan serangan fisik. Pelaku diduga berasal dari berbagai latar belakang, antara lain, pejabat pemerintah, warga, dan organisasi masyarakat sipil.

Saat berpidato dalam acara Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, NTT, pada 4 Desember 2024, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan dalam keberagaman sebagai kunci menuju kemakmuran bangsa.

Itu berarti, negara wajib segera mencabut Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tahun 2008 yang menjadi dasar diskriminasi dan represi terhadap warga Jemaah Ahmadiyah.

Negara juga secara tegas harus menentang segala bentuk intoleransi maupun diskriminasi atas dasar keyakinan agama dan alasan karakteristik manusia yang dilindungi oleh hukum internasional hak asasi manusia.

Menguatkan Identitas Sekaligus Rentan

Agama dan keberagaman adalah salah satu dari dimensi inklusi sosial. Persoalan di dalamnya ruwet dan menunjukkan lapisan-lapisan persoalan yang tak kalah rumit. Dimensi agama ini berkelindan dengan berbagai dimensi dalam inklusi sosial.

Sementara itu, Indonesia merupakan negara dengan 17.508 pulau besar dan kecil membentang dari Barat sampai Timur, dengan lebih dari 300 etnik, 1.340 suku bangsa, budaya, dan bahasa. Selain enam agama yang diakui, juga terdapat beragam kepercayaan lokal.

Keragaman ini merupakan berkah luar biasa kalau dikaitkan dengan kebanggaan sebagai bangsa dan penguatan identitas nasional. Bentang negeri ibarat taman yang indah, dengan beraneka bunga dan tanaman. Seperti hukum alam yang berlaku, keragaman ini menguatkan ekosistem, terutama, resiliensi dan keberlanjutan.

Meski demikian, keragaman Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak main-main. Secara geografis, Indonesia merupakan kepulauan, membentang dari Timur ke Barat dengan lima pulau terbesar.

Pulau Jawa merupakan wilayah paling padat dengan sekitar 55 persen populasi. Jakarta, ibu kota RI, yang sejauh ini masih merupakan pusat bisnis dan pemerintahan, menguasai lebih dari 70 persen perputaran uang di Indonesia.

Negeri seluas 1,90 juta kilometer persegi dengan luas daratan 1,81 juta kilometer persegi itu dipagari oleh lautan. Indonesia berada pada peringkat ke-15 negara terbesar di dunia berdasarkan luasnya, atau seperdelapan luas Rusia yang berada di peringkat pertama. Namun, populasinya dua kali lebih besar dibanding Rusia.

Dengan situasi ini, bisa dipahami mengapa pembangunan di Indonesia sangat tidak merata sehingga terjadi kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik, tak hanya antar pulau, tetapi juga antar wilayah, desa-kota, antar kota dan antar desa, di dalam wilayah, kota dan kabupaten, merupakan tantangan serius terkait inklusi sosial.

Human Development Report (HDR) Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP) tahun 2023-2024 berjudul *Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World* menyoroti meningkatnya ketimpangan global, termasuk ketimpangan ekonomi di Indonesia, meski ada pertumbuhan dan upaya pengentasan kemiskinan.

Laporan itu dikuatkan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) Jakarta, dalam *Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet Untuk si Kaya, Sepeda Untuk si Miskin*.

Hasil riset itu menunjukkan, kesenjangan ekonomi yang kian menganga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar.

Isu Kritis

Dengan data-data tersebut, inklusi sosial seharusnya menjadi isu kritis yang harus mendapatkan perhatian bersama.

Konflik politik yang menggunakan alasan agama, meruncing, terutama sejak kasus Ambon dan Palu, pada akhir tahun 1990-an. Konflik itu sebenarnya lebih disebabkan oleh masalah politik, ekonomi, sosial-budaya antar umat beragama, suku, etnis, antara warga dengan pelaku usaha, serta distribusi sumberdaya alam yang tidak seimbang di suatu tempat atau wilayah. Semua ini rentan memicu kecemburuan, rasa ketidakadilan, memecah belah, mengikis rasa persatuan dan kebersamaan yang inklusif.

Politik identitas hampir selalu bisa dimainkan terkait politik kekuasaan, termasuk dalam pilkada dan pemilu. Data BPS tahun 2024 menunjukkan, 87,2 persen penduduk di Indonesia beragama Islam, setara dengan sekitar 207 juta jiwa.

Pada awal tahun 2000-an tampak seperti ada perhatian terhadap isu perdamaian, bukan inklusi sosial. Namun, program-programnya pun tidak holistik dan tidak berkesinambungan.

Di antara banyak konflik yang terjadi pada tahun 2000-an, beberapa yang menyita perhatian di antaranya adalah insiden Monas di Jakarta, tepat pada hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 2008, ketika Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang melakukan aksi damai diserang oleh massa dengan atribut Forum Pembela Islam (FPI).

Kemudian, konflik di Tolikara (2015), antara kelompok yang mengatasnamakan Islam dan Kristen kembali menyita perhatian. Kemudian, juga kasus Lampung (2012) yang melibatkan suku Bali dengan warga Lampung

Konflik serius yang melibatkan komunitas Jemaah Ahmadiyah dengan warga dan ormas Islam dimulai tahun 1998 di NTB yang menyebabkan komunitas Ahmadiyah terusir. Konflik di wilayah itu terus berlanjut dari waktu ke waktu, juga di beberapa tempat lain dengan banyak korban.

Namun, insiden terburuk terjadi di Cikeusik, Pandeglang, Banten, pada 6 Februari 2011. Empat warga jemaah Ahmadiyah tewas akibat dianiaya massa.

Konflik antara kelompok Muslim Sunni dan Syiah di Sampang, Madura meletus pada bulan Agustus 2012. Keberadaan komunitas Syiah sebagai minoritas di tengah mayoritas Sunni di pulau garam itu sebenarnya memicu konflik panjang tetapi tersembunyi sebagai konflik intra-religius. Bupati Sampang sampai menyatakan menolak keberadaan masyarakat Syiah di wilayahnya.

Leave No One Behind

Potensi perpecahan karena keragaman dan politik ‘meliyankan’ itu sebenarnya mengancam banyak negara di dunia. Konflik yang mengatasnamakan agama, meski ujung-ujungnya menyangkut perebutan sumberdaya, juga terjadi di banyak tempat pada berbagai negara.

Ironisnya, inklusi sosial baru ramai digaungkan di Indonesia setelah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diluncurkan di Markas PBB di New York, 25 September 2015. SDGs merupakan agenda pembangunan global untuk mengatasi masalah-masalah mendesak di dunia sampai tahun 2030.

Inklusi sosial menjadi perhatian dalam SDGs karena merupakan syarat utama mencapai pembangunan berkelanjutan dan perdamaian di dunia. Inklusi sosial disebut secara eksplisit dalam dua dari delapan tujuan SDGs, yang sebenarnya merupakan kesatuan tak terpisahkan¹⁷.

Semua itu bekerja di atas prinsip SDGs adalah ‘Leave No One Behind’, yang menekankan pentingnya untuk memastikan tak seorang pun dipinggirkan dari manfaat pembangunan dan kemajuan, termasuk perempuan, anak (perempuan) serta difabel, apalagi kalau berasal dari kelompok minoritas dan kelas sosial-ekonomi terbawah.

Inklusi sosial adalah upaya untuk memastikan semua individu dan komunitas atau kelompok -- yang dibentuk oleh unsur-unsur identitas seperti agama/kepercayaan, ras, gender dan preferensi seksual, kecacatan, kelas dan strata sosial, pendidikan, dan lain-lain -- memiliki akses yang setara terhadap kesempatan, sumber daya, dan pelayanan dasar, serta berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

¹⁷ Delapan tujuan SDGs itu adalah penghapusan kemiskinan, menemukan solusi pembangunan berkelanjutan yang inklusif, menjamin hak asasi manusia bagi semua orang, melindungi planet Bumi, menjamin perdamaian dan kemakmuran, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, mendukung perdamaian dan masyarakat inklusif, serta mengurangi ketidaksetaraan.

66

Inklusi sosial adalah upaya untuk memastikan semua individu dan komunitas atau kelompok memiliki akses yang setara terhadap kesempatan, sumber daya, dan pelayanan dasar, serta berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

66

Perserikatan Bangsa-bangsa mendefinisikan inklusi sosial sebagai konsep multifaset, yang melibatkan pengakuan atas martabat manusia, penghormatan terhadap hak-hak manusia dan memastikan setiap orang dapat berpartisipasi secara bermakna di dalam masyarakat. Konsep ini dapat diukur dan dianalisis pada berbagai tingkatan mulai dari tingkat individual hingga tingkat nasional.

Dalam laporannya mengenai situasi sosial dunia, *Leaving No One Behind: The imperative of inclusive development* (2016), Komisi Ekonomi dan Sosial PBB menguraikan, inklusi sosial, seperti halnya eksklusi (pengucilan) sosial merupakan fenomena multidimensi. Dalam dimensi ekonomi, misalnya, tidak terbatas pada isu kemiskinan materi.

Butuh Pijakan

Keberagaman memainkan peran penting dalam inklusi sosial, karena merupakan bagian penting dari budaya apa pun. Aktivis hak-hak sipil, seperti Jesse Jackson dan pakar isu inklusi, seperti Mel Ainscow dan Geraldine Cochran, menyatakan, inklusi berarti kesetaraan dan penerimaan, yang terfokus pada perubahan sistem.

Peneliti pada the Helen Suzman Foundation, Anthony Egan (2014), menyatakan, agama dapat bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan budaya berbeda melalui ideologi yang sama, tetapi juga dapat menghalangi kesamaan antara yang satu dengan yang lain.

Inklusivisme berbeda dengan pluralisme agama, yang menyatakan bahwa semua kepercayaan sama-sama valid dalam konteks khusus penganutnya. Proses inklusi sosial dalam dimensi agama melibatkan penghargaan terhadap keragaman, kesetaraan, dan menghapus hambatan bagi warga untuk mengakses peluang dan sumber daya.

Dalam kajian agama dan teologi, inklusivisme adalah keyakinan bahwa meski pun hanya satu sistem kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh penganutnya, aspek-aspek kebenaran dapat ditemukan dalam agama-agama lain.

Menurut Egan, dalam agama Kitab – khususnya Kristen, dan sampai batas tertentu Islam– terdapat pemahaman yang jauh lebih dalam, bahwa ‘agama kita’ adalah satu-satunya agama yang benar.

Terkadang bahkan menyatakan bahwa ‘merek’ agama tertentu adalah yang paling benar dibandingkan tradisi-tradisi lain. Aturan praktisnya adalah bahwa semakin konservatif suatu tradisi agama, semakin besar kemungkinan untuk menyatakan bahwa hanya tradisi itu yang memegang kebenaran.

Oleh sebab itu, seperti dinyatakan Egan, promosi inklusi sosial terkait agama membutuhkan pijakan, entah ekonomi, kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, kekerasan termasuk kekerasan seksual, atau isu lain yang menjadi keprihatinan bersama. Tanpa itu, landasan teoritis menjadi licin.

Contoh itu bisa kita lihat pada pengalaman yang diungkapkan teman-teman Fatayat NU di Jawa Barat.

Pengalaman itu menunjukkan tentang apa yang disebut Bourdieu (1990) sebagai logika praktik. Logika teori tak lengkap, atau bisa dikatakan ‘tak berkaki’ tanpa logika praktik.

Logika praktik adalah logika teori yang berhadapan dengan realitas sosial yang meruang dan mewaktu. Dalam logika praktik ada *urgency*,

kemendesakkan; ada arena ‘pertarungan’ yang spesifik, pelakunya spesifik, lokus dan tradisinya spesifik.

Jadi, meski isu dari pijakan (kepentingan) itu sama, tetapi aturan mainnya berbeda karena manusia dan tradisinya juga berbeda. Cara menjelaskan pentingnya kesehatan reproduksi pada perempuan di Tasikmalaya, Jawa Barat, misalnya, berbeda dengan di Manado, Sulawesi Utara.

Jadi, jika agama ingin mempertahankan integritasnya, maka, pertanyaannya adalah; sejauh mana mereka dapat menjadi agen dari inklusi sosial? Dapatkah agama-agama itu menemukan semacam ‘jalan tengah sosial’ dengan melakukan sosialisasi yang bermakna, di mana mereka dapat menyambut “Yang Lain” sambil pada saat yang sama mengakui bahwa dirinya termasuk “Yang Lain” juga?

Pada zaman di mana konflik politik ‘disahkan’ oleh agama (sebagai alasan untuk melakukan kekerasan terkait isu nasionalisme atau eksklusi sosial-ekonomi), penting untuk mempertanyakan dan mencari cara bagaimana agama saling berhubungan satu sama lain dan dengan masyarakat sekuler.

Jargon tokoh perdamaian, Hans Küng, bahwa, tanpa perdamaian antar agama, tidak akan ada perdamaian di antara warga masyarakat, cukup berguna – seperti tesis ‘benturan peradaban’ Samuel Huntington (1996) – tetapi mungkin berlebihan, karena adanya kebutuhan lebih besar bagi inklusi sosial untuk memperhatikan ketegangan yang ditimbulkan oleh perbedaan agama (baik di dalam maupun di antara tradisi).

“Jika agama ingin mempertahankan integritasnya, maka, pertanyaannya adalah; sejauh mana mereka dapat menjadi agen dari inklusi sosial?”

Dapatkah agama-agama itu menemukan semacam ‘jalan tengah sosial’ dengan melakukan sosialisasi yang bermakna, di mana mereka dapat menyambut “Yang Lain” sambil pada saat yang sama mengakui bahwa dirinya termasuk “Yang Lain” juga?



Perempuan dan Etika Kepedulian

Seluruh konflik, termasuk yang mengatasnamakan agama yang terjadi pada banyak tempat, termasuk di Indonesia, selalu menempatkan perempuan (dan anak) sebagai korban terdepan. Mereka menghadapi berbagai dampak dan segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual.

Namun, seperti dicatat UN Women, perempuan juga berpotensi menjadi agen perdamaian dan memainkan peran penting dalam pencegahan konflik, dengan berbagai cara membangun kesepahaman dan perdamaian, serta membantu agar hubungan-hubungan dalam masyarakat kembali harmoni.

Dalam konflik bersenjata, mereka bisa membantu menghentikan kekerasan dengan berbicara kepada milisi. Mereka dapat mengorganisasi diri untuk meningkatkan kesadaran dan membangun perdamaian, membantu pemulihan krisis kendati membahayakan nyawa mereka. Meski demikian, mereka masih berada di pinggiran proses perdamaian dan pengambilan keputusan.

Keberanian dan sikap perempuan itu didasari oleh pengalaman sebagai perempuan yang berkaitan dengan naluri keibuan dan kepedulian. Kesadaran menolak kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, melintasi demarkasi garis 'publik-privat', 'aku-kamu' dan 'kami-kalian', menjadi landasan kuat untuk membangun kesepahaman dan solidaritas di antara sesama perempuan; sebagai 'kita'.

Etika kepedulian, dalam berbagai manifestasinya, merupakan unsur konstitutif perempuan (Gilligan, 1982). Meski pandangan yang melahirkan tafsir esensialisme itu menjadi perdebatan panjang di kalangan ilmuwan feminis, etika kepedulian perlu diperhitungkan dalam setiap penilaian moral.

Bagi F. Magnis Suseno (2002), di balik etika kepedulian ada logika psikologis mengenai hubungan personal dengan orang lain.

Etika yang memadai harus mencakup baik kepedulian mau pun prinsip keadilan. Tanpa keadilan, tidak ada moralitas, dan tanpa kepedulian, tidak ada keadilan. Prinsip keadilan menuntut kita terlibat pada keselamatan makhluk lain.

Memperjuangkan keadilan tanpa kepedulian terhadap keselamatan dan kebahagiaan orang secara konkret dengan mudah menjadi ideologis. Dengan kata lain, hal yang lebih mendasar dari penegakan keadilan adalah solidaritas dengan orang yang membutuhkan kita.

Inklusi Sosial, Kesetaraan, GESI dan GEDSI

Keberagaman dan agama berkaitan dengan keragaman kepercayaan dan praktik keagamaan dalam suatu masyarakat. Seiring dengan semakin beragamnya agama di masyarakat, muncul pertanyaan tentang cara mengelola keragaman ini.

Agama, menurut Egan, mendukung inklusi sosial dengan beberapa solusi. Di antaranya adalah pendidikan yang inklusif, dengan mengembangkan materi pembelajaran, melatih pendidik, dan berkolaborasi dengan komunitas agama-agama.

Selain itu, dibutuhkan tempat kerja yang inklusif, dengan memahami demografi tenaga kerja, meninjau kembali keragaman agama dan kebijakan yang diimplementasikan di tempat kerja, menggunakan bahasa dan komunikasi yang inklusif, menciptakan perspektif yang seimbang, serta mendidik karyawan tentang bias bawah sadar dan dampaknya.

Di luar itu, yang sangat penting juga adalah dialog antaragama dan antarkeyakinan, untuk menciptakan perspektif yang seimbang dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai agama.

Inklusi sosial tak bisa dipisahkan dari tindakan memperlakukan orang lain secara setara. Dalam konteks keragaman agama, berlaku 'the Golden Rule'¹⁸; prinsip dasar etika, prinsip timbal-balik, yang menyarankan kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.

Inklusi sosial mengasumsikan laki-laki dan perempuan tidak homogen, tetapi dikelompokkan berdasarkan usia, ras, agama, asal etnis, kepercayaan dan praktik, serta konteks sosial budaya.

Terkait hal itu, pendekatan kesetaraan gender dalam inklusi sosial sangat penting karena bertujuan untuk mengembalikan martabat mereka yang kurang beruntung karena identitasnya, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara bermakna dalam masyarakat.

Kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) merupakan dua konsep yang berkelindan untuk menghilangkan hambatan dan meningkatkan akses terhadap sumber daya untuk semua orang, termasuk mereka yang terpinggirkan, khususnya perempuan. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua populasi yang terpinggirkan sama-sama dirugikan atau dikecualikan.

Untuk memastikan pendekatan yang lebih inklusif dengan memenuhi kebutuhan serta hak-hak khusus penyandang disabilitas dan memastikan suara mereka tercakup dalam kebijakan publik, GESI beralih menjadi GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*).

Pendekatan GEDSI diyakini dapat menemukan solusi yang lebih komprehensif, dengan memperhatikan lapisan-lapisan dalam setiap dimensi inklusi sosial, selain mempromosikan kebijakan yang inklusif, berfokus pada peningkatan keberdayaan mereka yang terpinggirkan.

¹⁸ The Golden Rule adalah komitmen atas perlakuan secara manusiawi terhadap sesama manusia dan upaya menegakkan keadilan. Komitmen itu merupakan etika utama dalam dokumen Declaration Toward a Global Ethic yang diyakini dapat membantu mempromosikan dunia yang lebih damai. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Parlemen Agama-agama Dunia di Chicago, AS, tanggal 4 September, 1993 untuk mengidentifikasi prioritas etika dalam etika umum dianut oleh semua tradisi keagamaan.

Toleransi dan Hakikat Pragmatisnya

Banyak pihak meyakini inklusi sosial hanya mungkin terwujud melalui toleransi. Kata itu menjadi seperti janji, tetapi sulit dipenuhi karena tak dipahami betul maknanya.

Toleransi senantiasa mengandung paradoks. Hal tersulit dari toleransi terkait dengan keyakinan atau nilai yang kita pahami secara moral dan secara obyektif palsu atau berbahaya.

Salah satu pendekatan paling mudah dari toleransi adalah hakikat pragmatisnya. Pendekatan itu terutama menyangkut kebijakan politik. Dalam konteks ini, toleransi diharapkan membawa perdamaian dan menyelamatkan co-eksistensi sosial dalam masyarakat yang berbeda konsepsi moral dan agamanya.

Sejarah toleransi pada abad ke-16 dan 17 mengacu pada konsep kompromi dari toleransi seperti itu. Komitmen moral dikesampingkan bukan karena ada pilihan lain yang sah, tetapi karena tidak ada jalan lain untuk menjaga stabilitas sosial.

Imbauan toleransi bagi Yahudi sekuler dan ortodoks di Israel, misalnya, lebih didasari oleh gagasan saling mengakomodasi (pragmatis), bukan saling mengakui. Tentu saja tak ada yang salah dengan prinsip politik rekonsiliasi pragmatis itu. Namun, tentu saja hal itu tidak menyentuh inti dari gagasan toleransi.

Secara ideal, sikap kompromi seperti itu kehilangan dimensi penting dari hubungan dengan mereka yang dianggap sangat berbeda, karena secara alamiah didasari pertimbangan *ad hoc* dari kekuasaan relatif, dan oleh tujuan yang mensahkan konsesi dalam setiap kompromi.

Toleransi adalah suatu sikap yang berlandaskan prinsip, suatu kebijakan yang tidak didasari pertimbangan pragmatis yang bersifat sementara.

Maka, disarankan agar terfokus pada toleransi sebagai pegangan prinsipil guna menghindari pengaruh negatif pada pemikiran dan tindakan yang secara obyektif bertentangan dengan moral.

Fenomena yang ditoleransi biasanya berada di antara apa yang tidak dapat ditolerir (kekerasan) dan apa yang seharusnya dari awal tak boleh dipertanyakan (perbedaan rasial dan preferensi seksual).

Tiada Ujung

Toleransi membutuhkan argumen filosofis. Ketika menerima perbedaan, harus ada argumen untuk menerima perbedaan itu. Misalnya, bahwa manusia setara, sederajat, atau apa pun yang mendukung penerimaan kita itu.

Michael Walzer dalam *On Toleration* (1999) menguraikan tentang rangkaian kesatuan sikap yang sering disebut sebagai "toleran". Dia menyebut beberapa bentuk penerimaan; yakni *resignation*, *indifference*, *stoic endurance*, *openness* dan *full endorsement*.

Bentuk penerimaan berupa '*resignation*', berarti belum tentu seseorang setuju pada perbedaan itu, tetapi tak berbuat apa pun untuk melawannya. Jadi, ya diterima saja; apa boleh buat. '*Indifference*' berarti menerima perbedaan, tetapi bukan karena prinsip, melainkan karena tidak peduli atau bisa juga apatis. Dua sikap penerimaan itu tak memenuhi inti dari toleransi.

'*Stoic endurance*' adalah sikap ketabahan menghadapi perbedaan. Kalau ada diskriminasi, dia bertahan, ya dijalani saja. Sikap seperti ini juga belum menyentuh dengan benar inti dari toleransi.

Sikap '*openness*' dan '*endorsement*', meski sepintas dapat diartikan terbuka dan bahkan mendukung perbedaan, juga bermasalah, karena bisa jadi ada keharusan. Ini bisa menimbulkan konflik batin.

Poin penting dalam perdebatan mengenai toleransi adalah kebutuhan pada pengakuan beserta alasannya. Keberwargaan yang demokratis bergerak dari jenis toleransi yang ikhlas kepada jenis toleransi dengan pengertian yang lebih dalam mengenai perbedaan. Ini tertuang dalam gagasan saling menghargai dan kepekaan terhadap identitas, tujuan yang dipilih, serta cara hidup mereka yang dianggap ‘liyan’.

Sikap yang lebih terbuka terhadap perbedaan adalah persyaratan bagi co-eksistensi sosial dalam masyarakat demokratis multikultural, di mana posisi setiap orang, kelompok, golongan, tak ada yang lebih tinggi dari yang lain.

Dengan kata lain, toleransi hanya dimungkinkan kalau kebenaran yang satu tidak berada di atas kebenaran yang lain. Toleransi tak pernah dimungkinkan kalau yang satu menganggap kebenarannya lebih tinggi dari kebenaran pihak lain.

Inilah yang disebut tanggapan yang ‘beralasan’ terhadap perbedaan. Ini bukan perkara sederhana, karena kebenaran diproses di dalam pikiran dan kemudian dibatinkan (Heyd, 2003).

Kalau toleransi mempunyai rangkaian kesatuan sikap dengan tahapan yang semuanya membutuhkan pemeriksaan hati nurani, maka bisa ditengarai sejauh mana upaya yang kita lakukan untuk mewujudkan inklusi sosial.

Ibarat pintu masuk, bisa jadi yang kita lakukan sebagai bangsa baru sampai di depan pintu, baru mulai mendekat, hampir mengetuk. Akan tetapi, bisa jadi langkah itu diam di tempat, atau malah mundur lagi.

Inklusi sosial adalah proses panjang dan senantiasa menjadi proses; tidak linier, bisa seperti *roller coaster*, bahkan *bumping*, sehingga dibutuhkan komitmen politik yang kuat, selain tentu saja, stamina serta ketekunan untuk menjaganya. Tetapi setidaknya kita sudah melangkah....

**) Maria Hartiningsih, penulis, pembaca, pejalan kaki, wartawan harian pagi Kompas, 1984-2015.*

Bahan Bacaan

1. Anthony Egan (2014), "Religion and Social Inclusion: The Struggle to Include The Excluded – and The Excludable?", *The Journal of the Helen Suzman Foundation*/ ISSUE 73 /August 2014, diunduh tanggal 1 April 2025 pukul 10.00 dari https://hsf.org.za/publications/focus/focus-73-social-inclusion/aegan_73.pdf
2. Anthony Giddens (1998), *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*, cetakan ke-2, Cambridge, UK: Polity Press in association with Blackwell Publishers
3. bell hooks (1981), *Ain't I a Woman?* New York: South End Press.
4. Carol Gilligan (1982), *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, Cambridge MA : Harvard University Press
5. David Heyd, 'Education to toleration: some philosophical obstacles and their resolution' dalam Catriona McKinnon & Dario Castiglione (ed), *The culture of toleration in diverse societies: Reasonable tolerance* (2003)
6. F. Magnis Suseno, "Perkembangan Baru dalam Etika", Majalah *Diskursus*, Vol.1.No.1. April 2002
7. Gayatri C, Spivak, "Can the Subaltern Speak" dalam Cary Nelson dan Lawrence Grossberg (Eds), *Marxism and the Interpretation of Culture*. London: Macmillan, 1988.
8. Hans Kung (1998), *A Global Ethic for Global Politics and Economics*. Oxford: Oxford University Press
9. Michael Walzer, *On Toleration*, New Haven, CT and London: Yale University Press, 1997
10. Pierre Bourdieu (1990), *The Logic of Practice*, Redwood City, CA: Stanford University Press
11. Samuel P. Huntington (1996), *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, New York: Simon&Schuster





**NGO in Special Consultative Status
with Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035**

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org